

**PEMBINGKAIAN BERITA PADA IMPLEMENTASI  
JURNALISME PRESISI**

**(Analisis *Framing* Robert Entman pada Pemberitaan Pemutaran  
Ulang Film *Penghianatan G30S* di Tirto.id Periode September  
2017)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Ilmu Komunikasi Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh:

**Silsilia Novi Andani**

**NIM. 115120201111027**



**JURUSAN ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2018**

# LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**Pembimbingan Berita pada Implementasi Jurnalisme Presisi  
(Analisis *Framing* Robert Entman pada Pemberitaan Pemutaran Ulang Film  
*Penghianatan G30S* di Tirta.id Periode September 2017)  
SKRIPSI**

Disusun Oleh:

**SILSILIA NOVI ANDANI**

**NIM. 115120201111027**

**Telah diuji dan dinyatakan LULUS dalam ujian Sarjana pada tanggal**

**17 Juli 2018**

**Tim Penguji**

Ketua Majelis Sidang



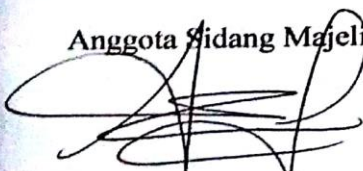
**Idya Pujarama, S.I.Kom., M Communication**  
**NIP/NIK. 198511302015042001**

Sek. Majelis Sidang



**Arif Budi Prasetya, S.I.Kom., M.I.Kom**  
**NIP/NIK. 2004058606241001**

Anggota Sidang Majelis Penguji I



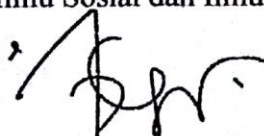
**M. Fikri AR., S.I.Kom., M.A.**  
**NIP/NIK. 198704092015041003**

Anggota Sidang Majelis Penguji II



**Ika Rizki Yustisia, S.I.Kom., M.A.**  
**NIP/NIK. 2016078907022001**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Prof. Dr. Unti Ludigdo, S.E., M.Si.AK**  
**NIP. 1969081419940210 01**

**LEMBAR DAFTAR PENGUJI SKRIPSI**

Skripsi ini telah diuji oleh tim penguji pada tanggal 17 Juli 2018 dengan daftar penguji sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN PENGUJI
1	Widya Pujarama, S.I.Kom., M Communication	Ketua Majelis Sidang
2	Arif Budi Prasetya, S.I.Kom., M.I.Kom	Sekretaris Majelis Sidang
3	M. Fikri AR, M.A.	Anggota Sidang Majelis Penguji 1
4	Ika Rizki Yustisia, S.I.Kom, M.A	Anggota Sidang Majelis Penguji 2

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Silsilia Novi Andani

NIM : 115120201111027

Jurusan : Ilmu Komunikasi

Peminatan : Komunikasi Massa

Judul Skripsi : Pembingkatan Berita pada Implementasi Jurnalisme Presisi

(Analisis *Framing* Robert Entman pada Pemberitaan Pemutaran

Ulang Film *Penghianatan G30S* di Tirto.id Periode September

2017)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa ini adalah karya asli saya dan tidak ada bagian dari karya ini yang mengkopir atau mengambil karya orang lain tanpa mencantumkan sumber maupun citasi yang ditunjukkan dalam daftar pustaka.
2. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Malang, 17 Juli 2018



**Silsilia Novi Andani**

NIM. 115120201111027



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Nama : Silsilia Novi Andani  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 13 November 1993  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Alamat : Jalan Raung No.295, Pecalukan - Pasuruan  
 Telp/HP : 081233940488  
 Email : silsilianovi@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1999-2005 SDN Pecalukan 4 Pasuruan  
 2005-2008 SMP Negeri 2 Pandaan  
 2008-2011 SMA Negeri 1 Pandaan  
 2011- 2018 Universitas Brawijaya Malang

### C. Pengalaman Organisasi

- Societo Sineklub
- Himanika FISIP UB
- B-Art Event Organizer

### D. Pengalaman Kerja

- 2014 News Reporter Intern di TVRI Mataram
- 2016 – 2017 Content Writer di LYT Media

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Hormat saya,  
 Silsilia Novi Andani

Silsilia Novi Andani, 115120201111027, 2018. Minat Komunikasi Massa, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang. Skripsi Pembimbingan Berita pada Implementasi Jurnalisme Presisi: Analisis *Framing* Robert Entman pada Pemberitaan Pemutaran Ulang Film *Penghianatan G30S* di Tirto.id Periode September 2017. Dibimbing oleh Widya Pujarama, S.I.Kom., M Communication dan Arif Budi Prasetya, S.I.Kom., M.I.Kom

---

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang bagaimana media online Tirto.id sebagai jurnalisme presisi membingkai pemberitaannya. Penelitian ini berfokus pada pemberitaan tentang pemutaran ulang film *Penghianatan G30S* yang dimuat oleh Tirto.id pada bulan September 2017. Penelitian ini menggunakan *framing* model Robert Entman yang melihat pembingkai sebagai proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari sebuah peristiwa lebih menonjol daripada yang lain. Metode analisis ini digunakan untuk menganalisis tujuh artikel yang dimuat oleh Tirto.id yang berupa teks dan foto dengan mengutamakan empat konsep analisis yaitu *define problems*, *diagnose cause*, *make moral judgement* serta *treatment recommendations*. Hasil analisis dari data-data tersebut menunjukkan bahwa dalam mengkontruksi berita polemik pemutaran ulang film *Penghianatan G30S*, Tirto.id cenderung melihat polemik ini sebagai permasalahan politik yang dimana Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai aktor permasalahan dinilai telah melakukan propaganda politik.

Kata kunci: *Analisis Framing, Robert Entman, Penghianatan G30S, Tirto.id, Jurnalisme Presisi*

Silsilia Novi Andani. 115120201111027. 2018. Communication Sciences. Social and Political Sciences Faculty. Brawijaya University. Malang. News Framing on the Implementation of Precision Journalism: Robert Entman's Framing Analysis on News Coverage of Film *Penghianatan G30S*'s Re-screening in Tirto.id Period September 2017. Supervised by Widya Pujarama, S.I.Kom., M Communication and Arif Budi Prasetya, S.I.Kom., M.I.Kom

---

### ABSTRACT

This research examines how online media Tirto.id as a precision journalism frames the news. The research focuses in particular on the coverage of the film *Penghianatan G30S*'s re-screening that was published in September 2017 by Tirto.id. This research uses Robert Entman's model of framing, it looks framing as a selection process from various aspects of reality so that certain parts of an event are more prominent than others. This model is used as methodology for analyzing seven articles published by Tirto.id in the form of text and photograph with emphasis on four concept of analysis that is define problems, diagnose cause, make moral judgment and treatment recommendations. The analysis of these materials demonstrates that in constructing the polemical news of film *Penghianatan G30S*'s re-screening, Tirto.id tends to see this polemic as a political problem in which General Gatot Nurmantyo as a problematic actor is considered to have conducted political propaganda.

Key words: *Framing Analysis, Robert Entman, Penghianatan G30S, Tirto.id, Precision Journalism*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan seluruh rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul *“Pembingkaian Berita pada Implementasi Jurnalisme Presisi (Analisis Framing Robert Entman pada Pemberitaan Pemutaran Ulang Film Penghianatan G30S di Tirto.id Periode September 2017)”* ini dapat diselesaikan dengan baik. Selama proses penelitian hingga penulisan skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bimbingan, pelajaran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT beserta Rasulnya, atas perlindungan dan cinta-Nya pada peneliti melalui berbagai cerita kehidupan.
2. Bapak Antoni, S.Sos., M.Si selaku ketua jurusan yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
3. Ibu Widya Pujarama, S.I.Kom, M.Communication dan Bapak Arif Budi Prasetya, S.I.Kom., M.I.Kom selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih atas bimbingan dan saran-saran yang membangun sejak persiapan hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan Bapak dan selalu memudahkan jalan Bapak dan keluarga Bapak.
4. Kedua orang tua Bapak Nur Salam, S.Si dan Ibu Astukah atas dukungan serta doanya yang tak terbalaskan.
5. Linda Susanti Oktorarini, S.Psi dan Adi Wicaksono, S.Psi yang selalu membimbing aku selama di Malang, yang selalu memberikan wejangan – wejangan yang dapat membuat aku menjadi pribadi yang lebih dewasa.
6. Sulfian Ari Susanto, Arifatul Munawaroh serta Robiatus Sa’diyah, keluarga yang tak henti hentinya memberikan dukungan agar aku bisa segera lulus.



7. M. Fikri. AR, S.Kom., MA dan Ika Rizki Yustisia, S.I.Kom, M.A selaku dosen Penguji Skripsi, atas bimbingan dan saran-saran yang membangun sejak persiapan hingga terselesaikannya skripsi ini diujikan.
8. Sahabat seperjuangan Ilmu Komunikasi, Geng Horibble, Ajeng Mutiara Tomy, Dwi Tyas Wijayanti, Putri Dian Nitami yang selalu mengingatkan, memberikan semangat dan dukungan. Terimakasih saja tidak cukup untuk kalian, dwity pidi dan tomy kalian sahabat yang luar biasa. Tanpa kalian aku tidak akan sampai di garis *finish* ini
9. Emak Sunarmi, Bapak Misdianto, Mama Umi, Bapak Kartono serta Papa Erie, terimakasih sudah membimbing saya selama di Malang, terimakasih sudah melahirkan putri – putri yang luar biasa
10. Teman-teman seangkatan Ilmu Komunikasi 2011 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi, semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini, semoga kita akan bertemu lagi sebagai sahabat bahkan saudara di lain waktu.
11. Serta beberapa pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, untuk itu peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti selama ini.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Peneliti juga berharap agar skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Malang, 17 Juli 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR ORISINALITAS .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR DAFTAR PENGUJI SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	14
1.3 Tujuan Penelitian .....	14
1.4 Manfaat Penelitian .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Jurnalisme Online .....	15
2.2 Jurnalisme Presisi.....	18

2.3 Analisis <i>Framing</i> .....	22
2.4 Penelitian Terdahulu .....	30
2.5 Kerangka Pemikiran.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Metode Penelitian .....	38
3.3 Fokus Penelitian .....	40
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	41
3.5 Teknik Analisis Data.....	42
3.6 Uji Keabsahan Data .....	44
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Singkat Tirto.id.....	45
4.2 Analisis <i>Framing</i> Berita Pemutaran Ulang Film <i>Penghianatan G30S</i> di Tirto.id .....	49
4.3 Pembahasan .....	92
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	97
5.2 Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	100
<b>LAMPIRAN</b> .....	104

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Screenshot</i> Berita Tirto.id tentang Laporan Allan Nairn .....	3
Gambar 2. Grafik Jumlah Pemberitaan Isu Komunisme di Tirto.id .....	5
Gambar 3. <i>Screenshot</i> Berita Pemutaran Ulang Film <i>Penghianatan G30S</i> di Tirto.id.....	7
Gambar 4. Teknik Framing Robert Entman.....	43
Gambar 5. Infografik berita " <i>Cara Gatot Nurmantyo Cari Panggung Sebelum Pensiun</i> " .....	53
Gambar 6. Infografik berita " <i>Film 'G30S' yang dianggap Narasi Sejarah oleh TNI &amp;Sekolah</i> " .....	77
Gambar 7. Gambar Berita " <i>TNI Dinilai Tak Sejalan dengan Jokowi Soal Rekonsiliasi 65</i> " .....	85
Gambar 8. Gambar Berita " <i>Warga Kwitang dan sekitarnya antusias nonton bareng Film G30S PKI</i> " .....	88
Gambar 9. Infografik " <i>Nonton Kembali Film Propaganda Anti PKI</i> " .....	90



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Definisi <i>Framing</i> Menurut Beberapa Ahli .....	23
Tabel 2. Penelitian Terdahulu .....	33
Tabel 3. Rekapitulasi Pemberitaan Pemutaran Ulang Film <i>Penghianatan G30S</i> di Tirto.id Periode September 2017 .....	41
Tabel 4. Penjelasan Elemen <i>Framing</i> Robert Entman .....	43
Tabel 5. Analisis Framing “ <i>Cara Gatot Nurmantyo Cari Panggung Sebelum Pensiun</i> ” .....	51
Tabel 6. Analisis Framing “ <i>Catatan Sejarawan Soal Pembuatan Ulang Film G30S/PKI</i> ” .....	57
Tabel 7. Analisis Framing “ <i>PFN: Perlu Tafsir Ulang Jika Film G30S/PKI Diproduksi Lagi</i> ” .....	62
Tabel 8. Analisis Framing “ <i>Pembuatan Ulang Film G30S/PKI Harus Ungkap Fakta Sejarah</i> ” .....	68
Tabel 9. Analisis Framing “ <i>Film 'G30S' yang dianggap Narasi Sejarah oleh TNI &amp; Sekolah</i> ” .....	76
Tabel 10. Analisis Framing “ <i>TNI Dinilai Tak Sejalan dengan Jokowi Soal Rekonsiliasi 65</i> ” .....	83
Tabel 11. Analisis Framing “ <i>Mempropagandakan Film Seram G30S PKI</i> ” ..	86

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Pemikiran.....	34
Bagan 2. Teknik <i>Framing</i> Robert Entman.....	38
Bagan 3. Grafik pemberitaan polemik pemutaran ulang film G30S di media online Tirto.id.....	49



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. <i>Screenshot</i> Berita Tirto.id Berjudul “ <i>Cara Gatot Nurmantyo Cari Panggung Sebelum Pensiun</i> ” .....	104
Lampiran 2. <i>Screenshot</i> Berita Tirto.id Berjudul “ <i>Catatan Sejarawan Soal Pembuatan Ulang Film G30S/PKI</i> ” .....	108
Lampiran3. <i>Screenshot</i> Berita Tirto.id Berjudul “ <i>PFN: Perlu Tafsir Ulang Jika Film G30S/PKI Diproduksi Lagi</i> ” .....	110
Lampiran4. <i>Screenshot</i> Berita Tirto.id Berjudul “ <i>Pembuatan Ulang Film G30S/PKI Harus Ungkap Fakta Sejarah</i> ” .....	112
Lampiran5. <i>Screenshot</i> Berita Tirto.id Berjudul “ <i>Film 'G30S' yang dianggap Narasi Sejarah oleh TNI&amp;Sekolah</i> ” .....	113
Lampiran 6. <i>Screenshot</i> Berita Tirto.id Berjudul “ <i>TNI Dinilai Tak Sejalan dengan Jokowi Soal Rekonsiliasi 65</i> ” .....	116
Lampiran 7. <i>Screenshot</i> Berita Tirto.id Berjudul “ <i>Mempropagandakan Film Seram G30S PKI</i> ” .....	117

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kritik terhadap jurnalisme modern menghadirkan sebuah jurnalisme baru yang dikenal sebagai jurnalisme ilmiah atau jurnalisme presisi. Jurnalisme modern dianggap mengabaikan cerita penting, terlalu bergantung pada siaran pers, mudah dimanipulasi oleh politisi dan kepentingan khusus serta kurang efektif dalam menyampaikan pesannya (Meyer, 1979, h.2). Jurnalisme presisi adalah bentuk jurnalisme baru yang memperlakukan jurnalisme sebagai ilmu pengetahuan, mengadopsi metode ilmiah, objektivitas ilmiah dan tujuan ilmiah ke dalam keseluruhan proses komunikasi massanya (Meyer, 1979, h.5). Di dalam jurnalisme presisi, jurnalis memiliki tempat yang sama seperti ilmuwan atau peneliti sosial (Meyer, 1979, h.4).

Cranberg (dikutip Meyer, 1979, h.6) mengemukakan bahwa akan selalu ada fakta yang tersembunyi dan jurnalis yang terlatih perlu untuk menemukan fakta tersembunyi tersebut. Sama halnya dengan ilmuwan, jurnalis juga tertarik untuk menguji kebenaran suatu realita (Meyer, 1979, h.11). Jurnalis dalam jurnalisme presisi memiliki skemata atau hipotesis tertentu terhadap suatu realita yang nantinya hal tersebut dijadikan sebagai model teoritikal (Meyer, 1979, h.8). Kemunculan jurnalisme presisi bermula dari jurnalis di Amerika Serikat yang selalu tertarik pada isu publik dan opini publik. Mereka menggunakan *straw poll*



untuk memprediksi tentang pemilihan presiden (McCombs, Cole, Stevenson, & Shaw, 1981, h. 26).

Di Indonesia sendiri beberapa media massa juga menggunakan sistem jurnalisme presisi ini. Salah satu media massa yang menganut sistem tersebut adalah media online Tirto.id. Tirto.id milik PT Tirta Adi Surya merupakan situs berita online yang didirikan oleh Atmaji Sapto Anggoro, mantan Sekretaris Jenderal APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) periode 2012-2015. Media online Tirto.id diresmikan pada tanggal 3 Agustus 2016 di Jakarta (Gromico, 2016). Nama dari instansi tersebut diambil dari nama Bapak Pers Indonesia, Tirto Adhi Soerjo (Tim Redaksi Tirtoid, 2016).

Akan tetapi, sekalipun Tirto.id menganut sistem jurnalisme presisi (jurnalisme ilmiah), media online tersebut pernah dilaporkan ke Dewan Pers Indonesia dikarenakan berita yang mereka muat dianggap tidak berimbang dan hanya mengumpulkan data dari satu pihak saja. Pada tanggal 19 April 2017, Tirto.id di laporkan ke Dewan Pers Indonesia oleh TNI setelah situs berita online tersebut mempublikasikan berita yang berisi laporan investigasi *in depth* seorang jurnalis luar negeri bernama Allan Nairn tentang upaya kudeta militer Indonesia dan beberapa politisi terhadap kasus pencemaran agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama (Yohanes, 2017). Berita *in depth* oleh Allan Nairn di Tirto.id tersebut menjelaskan secara detail upaya kudeta militer Indonesia yang dinilai mengulang sejarah Gerakan 30 September (G30S). Di dalam laporan investigasi tersebut, upaya kudeta terhadap kasus Ahok disebutkan

beberapa politisi yang terlibat antara lain Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Hary Tanoesoedibjo (Nairn, 2017).

**Gambar 1. 1**  
**Screenshot Berita Tirto.id tentang Laporan Allan Nairn**

**Investigasi Allan Nairn: Ahok Hanya  
Dalih untuk Makar**



Sumber : Nairn, 2017

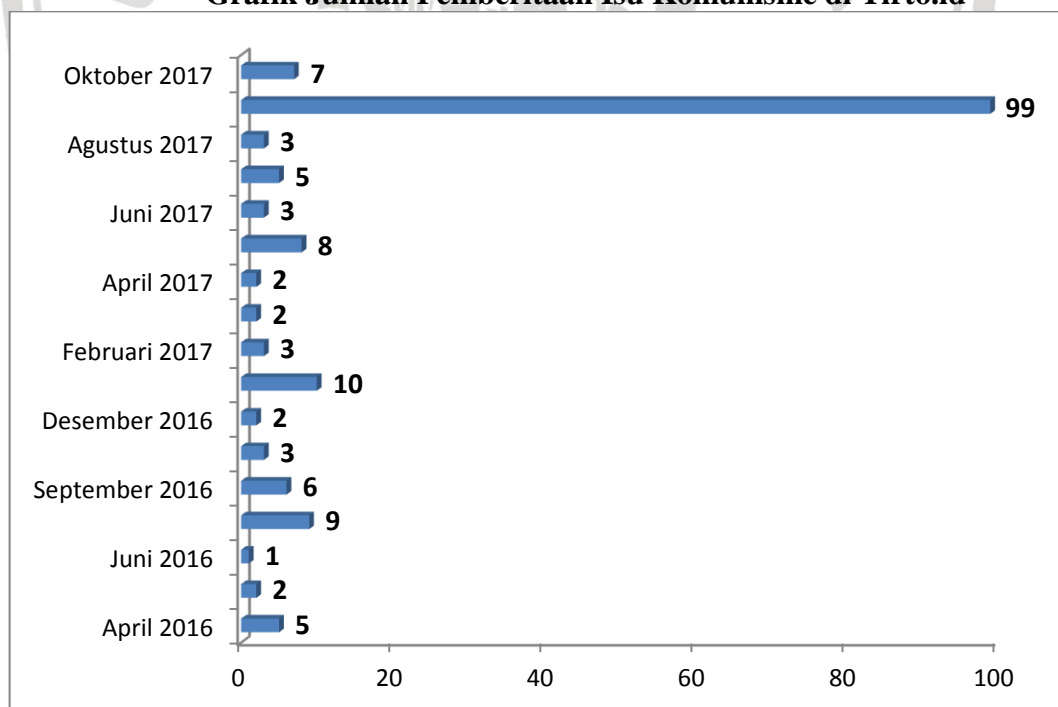
Investigasi mendalam oleh Allan Nairn yang dikutip oleh Tirto.id tersebut mengungkapkan bahwa Hary Tanoesoedibjo, pengusaha sekaligus ketua umum Partai Perindo, telah mendanai demo yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) untuk memprotes pidato yang dibawakan oleh Basuki Tjahya Purnama (Ahok) yang dinilai telah menistakan agama Islam (Nairn, 2017). Dalam berita tersebut, demo yang dilakukan oleh FPI dinilai sebagai alibi untuk melengserkan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dari jabatannya. Nairn menyebutkan

bahwa demo tersebut juga merupakan upaya agar para militer Indonesia tidak diadili atas peristiwa pembantaian G30S yang terjadi pada tahun 1965 oleh sebab itu lah Presiden Joko Widodo menjadi sasaran dari upaya kudeta. Lebih lanjut ia melaporkan bahwa demonstrasi tersebut juga memiliki tujuan untuk meng kudeta beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan dalih bahwa mereka adalah sekumpulan orang yang memiliki paham komunisme gaya baru yang dimana komunisme sudah dilarang dipraktekkan di Indonesia (Nairn, 2017).

Dalam laporan *indepth* tersebut, upaya kudeta terhadap Ahok memposisikan komunisme sebagai alat untuk menumbangkan presiden yang memiliki sejarah yang sama seperti peristiwa lengsernya Presiden Soekarno dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia sedangkan militer Indonesia diposisikan sebagai penyelamat untuk melawan komunisme (Nairn, 2017). Setelah memuat berita laporan *in depth* Allan Nairn tentang kasus komunisme di Indonesia, Tirto.id dinilai sebagai media yang tidak berimbang karena menerjemahkan dan menyebarkan berita tanpa melakukan verifikasi terhadap kedua belah pihak (Wahyudi, 2017). Dewan Pers Indonesia menyatakan bahwa media online Tirto.id dianggap tidak berimbang dan melanggar kode etik jurnalistik dikarenakan tidak adanya porsi atau pernyataan verifikasi dari pihak TNI dalam laporan Allan Nairn tersebut (Wahyudi, 2017). Anggota Komisi I DPR, Sukamta berpendapat bahwa berita tentang hasil laporan Allan Nairn yang dimuat oleh Tirto.id dapat memunculkan persepsi negatif tentang citra militer Indonesia (Asril, 2017).

Tirto.id merupakan salah satu bentuk media massa yang secara aktif mempublikasikan berita tentang isu nasional yang dimana berita yang ada di Tirto.id disertai dengan data dan analisis (Tim Redaksi Tirtoid, 2016). Salah satu isu nasional yang diliput oleh Tirto.id adalah isu tentang komunisme di Indonesia seperti pada salah satu berita hasil *indepth reporting* Allan Nairn. Tidak hanya laporan *indepth* tersebut saja, portal Tirto.id secara rutin memuat berita lainnya dengan topik komunisme setiap bulannya. Pada portal berita Tirto.id, berita tentang isu komunisme meningkat menjelang peringatan G30S sebanyak total 99 berita. Berikut grafik pemberitaan tentang isu komunisme pada portal berita Tirto.id dalam rentang waktu April 2016 – Oktober 2017.

**Gambar 1. 2**  
**Grafik Jumlah Pemberitaan Isu Komunisme di Tirto.id**



Sumber: Diolah oleh penulis

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh *Indonesia Indicator* (I2) pada media sosial, isu tentang komunisme meningkat sejak tahun 2016 dan



menjadi bahasan tertinggi netizen Indonesia pada bulan September 2017 (Saputri, 2017). Isu komunisme yang dibahas antara lain tentang peristiwa bentrok di gedung YLBHI, tentang peristiwa pada masa orde baru, narasi munculnya lagi paham komunisme di Indonesia melalui penemuan kaos bergambar palu arit yang merupakan simbol dari PKI serta penemuan temuan kuburan massal korban peristiwa G30S, simposium nasional yang membahas tentang PKI dan tentang polemik pemutaran ulang film *Penghianatan G30S* (Saputri, 2017). Pada bulan September 2017, berita tentang komunisme meningkat di beberapa media online Indonesia setelah adanya ajakan pemutaran ulang Film *Penghianatan G30S* oleh arahan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Polemik pemutaran ulang Film *Penghianatan G30S* tersebut mendapatkan porsi 31% dari total bahasan di media sosial wilayah Indonesia (Saputri, 2017).

Sedangkan menurut tabel pemberitaan di Tirto.id, dari 99 berita tentang komunisme, Tirto.id sendiri mempublikasikan polemik pemutaran ulang Film *Penghianatan G30S* tersebut sebanyak 49 berita dari total 99 berita tentang komunisme (Tirto, 2017). Pemutaran ulang film tersebut menjadi kontroversi dikarenakan Film *Penghianatan G30S* sudah berhenti ditayangkan pada tahun 1988 dengan mempertimbangkan berbagai alasan (Samanhudi, 2017). Beberapa alasan tersebut adalah karena film tersebut memiliki pengulangan adegan keterlibatan TNI AU serta film tersebut juga hanya berfokus pada tokoh Soeharto (Samanhudi, 2017). Seperti halnya kasus laporan Allan Nairn, Tirto.id menilai pemutaran ulang Film *Penghianatan G30S* memiliki kaitan dengan propaganda

politik di Indonesia. Berikut salah satu contoh *screenshot* berita tentang polemik tersebut di media online Tirto.id.

**Gambar 1.3**  
**Screenshot Berita Pemutaran Ulang Film *Penghianatan G30S* di Tirto.id**



Berita tersebut berisi tentang Panglima TNI (Gatot Nurmantyo) yang dianggap Tirto.id mendapatkan perhatian dari beberapa media melalui isu agama (Islam) dan isu tentang bangkitnya komunisme gaya baru di Indonesia. Pada berita tersebut merujuk laporan Allan Nairn, Gatot Nurmantyo mendapatkan perhatian publik setelah mengikuti aksi bela Islam dalam cakupan Pilkada DKI Jakarta untuk menggulingkan Basuki Tjahaya Purnama dan Presiden Joko

Widodo. Pada berita tersebut, Tirto.id melaporkan bahwa Gatot Nurmantyo melakukan propaganda politik sebagai usaha untuk “mencuri panggung” Pemilu Presiden 2019. Cara Gatot Nurmantyo “mencuri panggung” adalah dengan memunculkan kembali isu kebangkitan PKI sehingga perlunya pemutaran ulang Film *Penghianatan G30S* PKI. Tirto.id melaporkan bahwa beberapa penonton dalam acara pemutaran ulang film tersebut adalah pemilih pemula dalam pemilu Presiden di tahun mendatang (Kresna, 2017).

Gatot Nurmantyo juga dinilai oleh media Tirto.id telah melakukan propaganda kepada santri dan ulama di Indonesia dengan cara menyuarakan bahwa para ulama di Indonesia merupakan pejuang kemerdekaan. Jenderal Gatot Nurmantyo juga dinilai telah menyebarkan isu tentang munculnya komunisme gaya baru di Indonesia. Adanya isu komunisme gaya baru tersebut memunculkan ketakutan atas sistem politik di Indonesia (Kresna, 2017). Seperti halnya laporan Allan Nairn (2017), pada berita ini komunisme juga dianggap sebagai alat untuk melakukan propaganda politik.

Sekalipun Tirto.id telah terbukti melanggar kode etik jurnalistik karena telah memuat laporan Allan Nairn yang tidak berimbang (Wahyudi, 2017), akan tetapi media online tersebut merupakan media online pertama di Indonesia yang lolos validasi dari *International Fact-Checking Network* (IFCN) (Yulika, 2018). IFCN merupakan organisasi internasional yang melakukan pemeriksaan data dan fakta terhadap media dengan tujuan untuk mencegah adanya berita kurang akurat atau berita palsu. Keakuratan data dan komitmen Tirto.id sebagai media non partisipan (politik atau kepentingan) menjadi salah satu penilaian dalam validasi

tersebut (Yulika, 2018). Tirto.id dinyatakan lolos IFCN pada bulan Januari 2018 dikarenakan sistem jurnalisme presisi yang dianut yang dipublikasikan Tirto.id dalam bentuk berita infografik dan *indepth reporting*.

Dalam jurnalisme presisi, jurnalis memiliki hipotesis atau skemata agar dapat menentukan kerangka teoritik untuk menguji suatu realita (Meyer, 1979, h.10). Akan tetapi skemata antara seseorang dengan orang yang lain akan berbeda – beda. Jurnalis memiliki konstruksi terhadap suatu realitas menurut hasil pemahamannya yang dikenal dengan istilah *framing*. Jurnalis merupakan bagian dari media massa dan media massa bukanlah suatu yang bebas. Media massa bukanlah suatu yang independen akan tetapi ia memiliki keterkaitan dengan realitas sosial dan kepentingan tertentu (Sobur, 2012, h.30). Media massa bukanlah saluran yang bersifat bebas dan objektif akan tetapi media massa justru mengkonstruksi suatu realitas (Eriyanto, 2008, h.2).

Informasi yang terdapat dalam media massa bukanlah suatu kebenaran mutlak akan tetapi merupakan hasil dari pembingkai wartawan terhadap suatu fakta dalam bentuk *angle* yang dianggap menarik (Wazis, 2012, h.126). Sebelum berita disebarkan oleh audiens, media membingkai suatu isu agar isu tersebut dapat diterima dengan baik oleh audiens (Domke, 1998). Lebih lanjut Domke mengemukakan bahwa jurnalis memahami suatu peristiwa yang nantinya peristiwa tersebut dibingkai sesuai pemahaman jurnalis kemudian hasil pembingkai tersebut disampaikan kepada audiens. Pembingkai atau *framing* merupakan sebuah proses pembingkai pesan dengan tujuan untuk membuat suatu pesan



agar lebih menonjol dari pesan yang lain sehingga masyarakat akan lebih fokus terhadap pesan tersebut (Eriyanto 2002, h.252).

Di sisi lain, Krosnick (dikutip dari Brewer, 2003) berpendapat bahwa audiens menilai suatu peristiwa (politik) bukan berdasarkan dari pengetahuan relevan yang ada di memori mereka, akan tetapi audiens melakukan penilaian berdasarkan dari potongan – potongan informasi yang paling mudah diterima dalam ingatan mereka. Sejalan dengan pendapat Higgins (dikutip dari Domke, 1998), audiens dapat memahami suatu isu atau peristiwa apabila isu tersebut familiar dalam kognisi mereka. Lebih lanjut Higgins mengemukakan bahwa agar isu menjadi familiar ke dalam kognisi audiens, media melakukan *salience* (penonjolan) terhadap suatu isu atau informasi yang akan disampaikan.

Tirto.id sebagai media massa memiliki fungsi untuk menyebarkan informasi melalui berita yang disajikan kepada audiens, salah satu topik berita yang banyak dimuat oleh Tirto.id adalah berita tentang isu komunisme tentang polemik pemutaran ulang Film *Penghianatan G30S*. Dalam mengumpulkan beritanya, Tirto.id menganut sistem jurnalisme presisi (Tim Redaksi Tirtoid, 2016). Berita yang ada dalam jurnalisme presisi harus objektif dan menggunakan hasil penelitian sebagai referensi dari bahan berita (Meyer, 1979, h.4). Akan tetapi, menurut kasus pelanggaran kode etik pada berita laporan Allan Nairn, Tirto.id terbukti tidak berimbang atau tidak memenuhi unsur *cover both side* dan diksi kata yang digunakan cenderung persuasif.

Informasi yang terdapat dalam media massa bukanlah suatu kebenaran mutlak akan tetapi merupakan hasil dari pembingkaihan wartawan terhadap suatu

fakta dalam bentuk *angle* yang dianggap menarik (Wazis, 2012, h.126). Pembingkai yang dilakukan oleh media massa pada dasarnya melibatkan seleksi dan penonjolan (*salience*). Pembingkai tersebut memiliki peran utama terhadap kekuatan politik dan memiliki peran untuk membingkai identitas suatu aktor politik (Entman, 1993, h.55). Media online Tirto.id mempublikasikan berita tentang komunisme pada bulan September 2017 sebanyak 99 berita dengan topik polemik pemutaran ulang Film *Penghianatan G30S* memiliki porsi pemberitaan yang besar sebanyak total 49 berita. Pada topik pemberitaan tersebut, terdapat penonjolan aktor jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang dianggap menjadi penyebab polemik tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk diteliti untuk mengetahui seperti apa pembingkai yang dilakukan oleh Tirto.id terhadap polemik pemutaran ulang Film *Penghianatan G30S* yang diinstruksikan oleh Jenderal Gatot Nurmantyo.

Peneliti menggunakan analisis *framing* model Robert Entman. Menurut Entman (dikutip dari Eriyanto, 2008, h.187) mengungkapkan bahwa *framing* adalah suatu wacana di rekomendasikan, dijelaskan dan dievaluasi dengan menonjolkan kerangka berfikir tertentu dari realitas yang diwacanakan. Lebih lanjut dikemukakan, model analisis Entman memiliki 4 konsep untuk menganalisis suatu wacana antara lain pendefinisian masalah, mencari sumber masalah, membuat keputusan moral dan memberikan penyelesaian (Eriyanto, 2002, h.187). Alasan peneliti menggunakan analisis ini adalah karena peneliti ingin melihat bagaimana pandangan media Tirto.id tentang polemik pemutaran ulang Film *Penghianatan G30S* dilihat dari masalah apa yang ditonjolkan, siapa

pelakunya dan bagaimana evaluasi moral terhadap masalah tersebut sejalan dengan model *framing* yang dikemukakan oleh Robert Entman.

Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi penelitian diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Andi Sitti Maryandani (2016) dengan judul *Analisis Framing Berita Kasus Korupsi Dewi Yasin Limpo di Harian Tribun Timur Makassar* dan penelitian yang dilakukan oleh Siti Sarohmawati (2017) dengan judul *Sikap Media terhadap Isu Politik dan Agama Islam pada kasus Ahok..*

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Andi Sitti Maryandani (2016) meneliti tentang pembingkaihan yang dilakukan oleh Tribun Timur Makassar terhadap kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh politisi Dewi Yasin Limpo dengan menggunakan analisis *framing* Robert N. Entman. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa kasus tersebut merupakan masalah hukum (*define problems*), dimana Dewi Yasin Limpo sebagai sumber dari masalah tersebut (*diagnose cause*). Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa uang suap sebagai penyebab utama terjadinya kasus korupsi (*make moral judgement*) sedangkan penyelesaian masalah (*treatment recommendation*) dari kasus tersebut adalah media Tribun Timur Makassar berusaha menyeimbangkan sikap Dewan Kehormatan partai Hanura dan KPK dalam menangani kasus dugaan korupsi Dewi Yasin Limpo.

Penelitian kedua dilakukan oleh Siti Sarohmawati (2017) dengan judul *Sikap Media terhadap Isu Politik dan Agama Islam pada kasus Ahok*. Pada penelitian ini ditemukan bahwa situs [Republika.co.id](http://Republika.co.id) melihat kasus ini sebagai

masalah hukum dan menilai Ahok sebagai sumber dari masalah tersebut. Evaluasi moral yang ditemukan pada berita Republika.co.id adalah bahwa seharusnya pemimpin Negara harus menjaga kesatuan dan tidak menistakan agama. Sedangkan pada situs metrotvnews.com menilai bahwa kasus Ahok merupakan masalah politik dan penyebab masalahnya adalah aktor politik yang melaporkan Ahok. Evaluasi moral yang ditemukan pada berita metrotvnews.com adalah Ahok sebagai korban dari propaganda politik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian yang dilakukan Andi Sitti Maryandani (2016) tidak ada kajian lanjutan mengapa sebuah isu tentang dugaan korupsi Dewi Yasin Limpo dibingkai sedemikian rupa oleh media Tribun Makassar. Sedangkan pada penelitian kedua oleh Siti Sarohmawati (2017) ditemukan bahwa pembungkaihan oleh media berkaitan erat dengan teori ekonomi politik media dimana politikus sebagai pemilik media dapat mempengaruhi keobjektifan dari informasi yang dibagikan oleh media. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, media online Tirto.id sebagai subjek penelitian mengklaim dirinya menerapkan jurnalisme presisi yang tidak menganut sistem politik apapun dan bersifat non partisipan (Tim Redaksi Tirtoid, 2016). Hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian oleh Siti Sarohmawati (2017) dimana pembungkaihan oleh media dipengaruhi oleh pemilik media sebagai bagian dari pelaku politik. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti pembungkaihan berita pemutaran ulang film *Penghianatan G30S* yang dilakukan Tirto.id sebagai jurnalisme presisi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan melakukan penelitian tentang pembingkai berita polemik pemutaran ulang Film *Penghianatan G30S* pada portal online Tirto.id dengan menggunakan analisis *Framing* model Robert Entman untuk mengetahui bagaimana pembingkai realitas yang dilakukan oleh portal berita Tirto.id. Dengan melakukan penelitian ini, peneliti berharap dapat melengkapi kajian mengenai analisis *framing* dan implementasinya pada jurnalisme presisi.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana Tirto.id sebagai jurnalisme presisi membingkai berita pemutaran ulang film *Penghianatan G30S*?”

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana media online Tirto.id sebagai jurnalisme presisi membingkai realitas tentang pemutaran ulang film *Penghianatan G30S* dilihat dari sudut pandang *framing* oleh Robert Entman antara lain apa yang menjadi masalah, siapa yang menyebabkan masalah, evaluasi moral dan apa solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini memiliki manfaat dari segi teoritis, yaitu penelitian tentang *framing* dengan mengaitkan jurnalisme presisi sangat jarang dilakukan,



oleh karena itu peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan tentang kajian *framing* di dalam jurnalisme presisi melalui media online.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Jurnalisme Online

Berita adalah seseorang, benda, atau peristiwa yang dianggap sebagai pilihan subjek untuk perlakuan jurnalistik atau bahan berita (Janssen, 2010, h. 2) Definisi ini menghubungkan berita dengan jurnalisme. Hubungan ini ditekankan lebih dalam di *The Dictionary of Media and Communications* (Danesi, 2009, h. 212) di mana berita didefinisikan sebagai laporan kejadian saat ini atau kejadian di surat kabar, di televisi, di radio, atau di situs Web. Jurnalisme, di sisi lain, selalu dikaitkan dengan *news organization*. Jurnalisme menurut *Random House Webster's Unabridged Dictionary* (Janssen, 2010, h. 2) adalah pekerjaan pelaporan, menulis, mengedit, memotret, atau menyiarkan berita atau melakukan organisasi berita apa pun sebagai sebuah bisnis. Definisi ini menunjukkan bahwa jurnalisme merupakan bagian dari institusi media. Definisi yang lebih umum diberikan dalam *Dictionary of Media and Communications* (Danesi, 2009, h. 166), yang mencirikan jurnalisme sebagai tindakan menulis, mengumpulkan, menyiapkan, dan mendistribusikan berita dan komentar terkait melalui media massa.

Pada akhir 1990, Internet dikenal karena cepatnya inovasi teknologi dan jumlah penggunaannya tumbuh secara pesat. Surat kabar khawatir bahwa media yang sedang berkembang ini dapat ‘mencuri’ banyak dari pembaca mereka. Dengan demikian, surat kabar memutuskan bahwa satu-satunya kesempatan

mereka adalah dengan berpartisipasi di dalamnya (Janssen, 2010, *h.* 18). Surat kabar melihat diri mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa audiens mereka telah berubah. Internet tidak mendorong masyarakat menjauhi berita, namun, hal ini membuat masyarakat menjadi lebih pemilih. Pembaca menyadari kekuatan mereka sendiri dalam *new media* ini. Suplai informasi tumbuh dari hari ke hari dan masyarakat dapat memilih apa pun yang menarik bagi mereka (Janssen, 2010, *h.* 18). Pergeseran terjadi dalam penekanan antara *supply* dan *demand*. Trend ini disebut sebagai '*news personalization*' atau '*news customization*' (Gunter, 2003, *h.* 25). Di Indonesia sendiri, media online pertama yang lahir adalah Republika Online (1994) kemudian disusul Tempo.com dan beberapa media online lainnya (Nurkinan, 2017, *h.* 35).

*News organization* profesional harus menghasilkan keuntungan, wartawan mereka harus mempertimbangkan banyak faktor ketika menulis sebuah cerita. Jurnalis *online* harus memuaskan bukan hanya pembaca mereka, tetapi juga *news organization* mereka dan pengiklan. Pandangan politik dan pengaruh kuat secara ekonomi juga dipertimbangkan. Hal ini menjadikan wartawan tidak bisa menyesuaikan pilihan mereka tentang apa yang harus ditutupi untuk memenuhi kebutuhan semua orang yang terlibat. Banyak media massa saat ini (*online* maupun *offline*) membuat upaya penghapusan informasi yang terlalu jelas (Janssen, 2010, *h.* 20). Karena wartawan tidak dapat mempengaruhi fakta yang sebenarnya, mereka harus menyempurnakan keterampilan mereka dalam membingkai berita. Dengan begitu, mereka memiliki alat untuk mengarahkan penyerapan berita sampai batas tertentu (Janssen, 2010, *h.* 20).

Masyarakat khususnya generasi muda cenderung memilih berita online dibandingkan dengan koran, hal tersebut dikarenakan berita online lebih modern, *real time* dan biaya mengaksesnya lebih murah. Sedangkan berita di koran harus menunggu satu hari setelah suatu peristiwa tersebut terjadi (Nurkinan, 2017, h.30). Lebih lanjut, Nurkinan (2017, h.30) mengemukakan beberapa kelebihan dari media online antara lain berita online dapat diakses beberapa kali, dapat diakses dimana saja dan tidak terbatas waktu, selalu *update* dan biaya akses yang cenderung murah. Selain itu, media online memiliki format tulisan yang berbeda dengan koran dikarenakan harus menyesuaikan dengan layar monitor dan media online juga memungkinkan terjadinya proses interaktif antara komunikan dengan komunikatornya (Nurkinan, 2017, h. 32-33). Di dalam internet memungkinkan adanya interaktivitas yang dimana jurnalis bisa mengikutsertakan pengguna internet berinteraksi di dalamnya, dan adanya email yang dapat menghubungkan dengan jurnalis atau pegawai media, dokumen – dokumen yang dapat diakses serta data dan hyperlink (Smith, 2005, h.1). Di dalam online jurnalisme terdapat fitur multimedia yang dimana menambahkan audio, video, grafik atau metode lainnya yang berhubungan dengan cerita ke dalam bagian suatu berita (Smith, 2005, h. 2).

Sedangkan kekurangan dari media online adalah beberapa berita online memiliki judul berita yang cenderung *click bait* dan menipu dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah pengunjung (Nurkinan, 2017, h. 31). Selain itu, dari 43 ribu media online di Indonesia, hanya 230 media online saja yang sudah terverifikasi sehingga pengguna internet kemungkinan akan mendapatkan berita yang kurang

kredibel (Nurkinan, 2017, h. 30). Kehadiran media online sendiri juga membuat hilangnya eksklusifitas sebuah berita dengan hadirnya *citizen journalism* yang dapat menggantikan kerja dari seorang wartawan (Nurkinan, 2017, h.34).

## 2.2 Jurnalisme Presisi

Jurnalis memiliki dua peran profesional utama untuk dimainkan dan karenanya perlu dua perangkat keterampilan yang cukup berbeda. Keterampilan yang paling umum yang terkait dengan jurnalisme adalah menulis, kemampuan untuk menangkap peristiwa-peristiwa penting, situasi dan kepribadian secara singkat, kalimat bermuatan informasi yang dapat dipahami dengan mudah oleh khalayak besar dari media massa. Namun yang sering diabaikan adalah keterampilan penting lainnya, kemampuan untuk melaporkan, untuk memastikan detail yang relevan dari berita melalui pengamatan yang cermat. Jurnalisme presisi, baik sebagai teori berita dan sebagai serangkaian teknik observasi, berfokus pada keterampilan pelaporan dan penerapannya dalam mendefinisikan berita. Jurnalisme presisi mengasumsikan adanya keterampilan menulis yang solid (McCombs, Cole, Stevenson, & Shaw, 1981, h. 23).

Meyer (1979, h.1) mendefinisikan jurnalisme presisi sebagai bentuk jurnalisme baru. Jurnalisme presisi merupakan bentuk protes terhadap berita – berita di masa modern yang dianggap mengabaikan peristiwa penting, tergantung pada *press release* serta dengan mudah dimanipulasi oleh politikus dan kepentingan tertentu (Meyer, 1979, hal 2). Jurnalisme presisi menempatkan proses jurnalisme ke dalam suatu ilmu pengetahuan, menggunakan metode ilmiah, obyektifitas yang bersifat ilmiah, dan menggunakan proses ilmiah terhadap



keseluruhan proses komunikasi massa. Jurnalisme presisi adalah cara untuk memperluas alat wartawan untuk membuat topik yang sebelumnya tidak dapat diakses, atau sangat sulit diakses. Jurnalisme ini sangat berguna dalam memberikan audiensi kepada kelompok minoritas dan pembangkang yang sedang berjuang untuk mendapatkan perwakilan (Meyer, 1974, hal 230).

Dalam jurnalisme presisi, pengumpulan berita dilakukan dengan cara teknik observasi. Tipologi sederhana teknik observasi dapat diorganisasikan dengan dua dimensi: pertimbangan tentang apakah observasi tersebut *direct* atau *indirect*, dan *systematic* atau *unsystematic* (McCombs, Cole, Stevenson, & Shaw, 1981, p. 24). Dalam tipologi ini, sebagian besar observasi jurnalistik bersifat *indirect* dan *unsystematic*. Jurnalis bergantung pada sumber berita dalam melaporkan apa yang terjadi dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Banyak penelitian tentang isu publik dan berita tentang pemerintah mengutip juru bicara resmi, pengumuman resmi, dan konferensi pers dalam liputan ini. Terutama jika seseorang berpendapat bahwa *news value* yang sebenarnya bukan dalam tindakan-tindakan diskrit itu sendiri, tetapi dalam kebijakan dan situasi yang lebih umum yang mereka definisikan dan cerminkan, cakupannya jauh dari sistematis. Dan hal ini juga bersifat tidak langsung, disaring sedikit demi sedikit kepada wartawan melalui aktor besar maupun kecil dalam berita (McCombs, Cole, Stevenson, & Shaw, 1981, p. 25).

Jurnalisme presisi adalah menghubungkan dua benang merah jurnalistik yang konvergen. McCombs, Cole, Stevenson dan Shaw telah mengilustrasikan konvergensi perspektif jurnalistik presisi tentang apa itu berita (teori) dan teknik

pelaporan jurnalistik presisi (metodologi). Kemunculan jurnalisme presisi bermula dari jurnalis di Amerika Serikat selalu tertarik pada isu publik dan opini publik, tetapi teknik observasi mereka secara tradisional bersifat informal dan tidak tepat. Pada awal 1824, beberapa surat kabar melaporkan pertemuan-pertemuan informal politik untuk mencoba memprediksi tentang pemilihan presiden. Bahkan sebelumnya, pada tahun 1810, surat kabar *North Carolina* melakukan survei surat primitif di seluruh negara bagian, menilai berbagai topik, mulai dari kualitas tanah dan produksi tanaman hingga keaksaraan, sekolah dan keadaan masyarakat dan kemajuan peradaban (McCombs, Cole, Stevenson, & Shaw, 1981, p. 26)

Dari pemungutan suara informal awal ini, penggunaan *straw polls* ini meningkat baik dalam jurnalisme maupun politik. Kualitas jajak pendapat meningkat secara dramatis pada 1930-an ketika George H. Gallup memutuskan untuk menguji teknik *sampling* ilmiah yang dikembangkannya untuk gelar Ph.D. disertasi. Ibu mertua Gallup mencalonkan diri sebagai sekretaris negara di Iowa, dan Gallup memperkirakan pemilihan ibu mertuanya dengan benar. Hingga saat ini, nama George H. Gallup sering diidentikkan dengan *polling* tentang opini publik di seluruh dunia (McCombs, Cole, Stevenson, & Shaw, 1981, p. 26)

Dalam jurnalisme presisi, data dikelola menurut tahapan berikut (Meyer (1979, h.7):

1. Cari data. Realita didapat setelah data – data atau fakta – fakta dikumpulkan karena data bukanlah sesuatu yang ada melainkan data adalah sesuatu yang dicari.

2. Simpan data. Setelah data ditemukan, jurnalis mengumpulkan data dan mengorganisasikan data tersebut pada berkas mereka atau pada komputer.
3. Dapatkan kembali. Setekah data disimpan dan ditata, jurnalis dapat sewaktu – waktu mengumpulkan kembali data yang sama sesuai dengan berkas yang disimpan.
4. Analisis data. Dalam menganalisa, jurnalis seringkali mencari dan menemukan data yang memiliki hubungan yang sama kemudian hal tersebutlah yang akan memunculkan fenomena penyebab dari suatu implikasi.
5. Reduksi data. Sebuah cerita yang menarik ditentukan oleh apa data yang harus dikurangi dan apa data yang harus ditambahkan.
6. Komunikasikan. Sebuah laporan berita yang tidak dipahami audiens akan menjadi sebuah laporan yang sia – sia. Oleh karena itu wartawan menggunakan perumpamaan agar data tersebut dipahami oleh audiens.

Data mentah yang dikumpulkan oleh wartawan akan menjadi bermanfaat atau dapat dipahami, jika data tersebut diproses ke dalam kerangka konseptual atau lebih dikenal dengan istilah skemata (Meyer, 1979, h. 8)

Jurnalisme presisi menempatkan jurnalis dan ilmuwan kedalam posisi yang sama. Terdapat 5 karakteristik persamaan tersebut antara lain skeptis, keterbukaan, insting terhadap operasionalisasi, merasakan kebenaran yang bersifat sementara serta kesederhanaan (Meyer, 1979, h. 12). Karakteristik yang pertama yaitu skeptis, jurnalis maupun ilmuwan merasa ragu dengan kebenaran publik, kebenaran dinilai bersifat sementara dan dapat diperbaiki. Selanjutnya

karakteristik keterbukaan memiliki arti bahwa jurnalis bersifat terbuka terhadap hasil temuannya. Karakter yang ketiga adalah insting terhadap operasionalisasi. Untuk menguji suatu model, suatu ilmuwan menentukan suatu model untuk menguji suatu fenomena apakah hal tersebut dapat dibuktikan benar atau tidak. Model ini disebut sebagai operasionalisasi (Meyer, 1979, h. 12).

Karakteristik persamaan yang keempat adalah kebenaran yang bersifat sementara. Kebenaran dalam suatu ilmu pengetahuan dianggap sesuatu yang bersifat relatif dimana nantinya akan berubah sesuai dengan fenomena maupun teknologi di masa yang akan mendatang (Meyer, 1979, h. 12). Karakter yang terakhir adalah kesederhanaan. Jurnalis menggunakan model teori yang dianggap sederhana agar dapat mudah dijelaskan. Teori dalam menguji fenomena sosial didapatkan melalui teori yang sudah ada sebelumnya kemudian wartawan mengambil hipotesis yang nantinya dapat dioperasionalkan (Meyer, 1979, h. 15).

### **2.3 Analisis Framing**

Dalam meliput berita, wartawan media massa memiliki beberapa definisi tertentu tentang realitas sosial yang dimana hal tersebut menjadi acuan wartawan dalam menentukan judul berita, struktur berita dan keberpihakan media terhadap seseorang atau sekelompok orang (Mulyana dalam Eriyanto, 2008, h. xi). Media massa bukanlah saluran yang bersifat bebas dan objektif akan tetapi media massa justru mengkonstruksi suatu realitas (Eriyanto, 2008, h.2). Media massa bukanlah suatu yang independen akan tetapi ia memiliki keterkaitan dengan realitas sosial

dan kepentingan tertentu (Sobur, 2012, h.30). Analisis *framing* merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui bagaimana suatu realitas (aktor, kelompok, peristiwa dan lainnya) dibingkai oleh media (Eriyanto, 2008, h.2). *Frame* memiliki makna sebagai struktur kepercayaan yang mengatur pandangan, wacana dan kebijakan politik serta menyediakan standar – standar untuk memahami suatu realitas (Sobur, 2012, h. 162).

Eriyanto (2008, h.2) mengemukakan bahwa analisis *framing* memiliki tujuan untuk melihat bagaimana suatu aspek tertentu ditekankan atau ditonjolkan oleh media sehingga aspek tertentu menjadi mudah diingat oleh audiens sedangkan aspek – aspek yang lain dalam suatu peristiwa diabaikan. Analisis *framing* tidak menekankan kepada apakah media memberitakan suatu peristiwa secara negatif atau positif melainkan analisis *framing* lebih menekankan kepada bagaimana realitas atau peristiwa dikonstruksi oleh media (Eriyanto, 2008, h. 7). Ada beberapa definisi dari *framing* menurut beberapa ahli yang dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 2.1**  
**Definisi *Framing* Menurut Beberapa Ahli**

Robert N. Entman	Proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi – informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lain.
William A. Gamson	Cara bercerita atau gugusan ide – ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa – peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam sebuah kemasan ( <i>package</i> ). Kemasan itu semacam skema atau struktur pemahaman yang digunakan individu untuk mengkonstruksi makna pesan - pesan yang ia terima.
Todd Gitlin	Strategi bagaimana realitas/dunia dibentuk dan



	disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca. Peristiwa-peristiwa ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian khalayak pembaca. Itu dilakukan dengan seleksi, pengulangan, penekanan, dan presentasi aspek tertentu dari realitas.
David E. Snow dan Robert Benford	Pemberian makna untuk menafsirkan peristiwa dan kondisi yang relevan. <i>Frame</i> mengorganisasikan sistem kepercayaan dan diwujudkan dalam kata kunci tertentu, anak kalimat, citra tertentu, sumber informasi, dan kalimat tertentu.
Amy Binder	Skema interpretasi yang digunakan oleh individu untuk menempatkan, menafsirkan, mengidentifikasi, dan melabeli peristiwa secara langsung atau tidak langsung. <i>Frame</i> mengorganisasikan peristiwa yang kompleks ke dalam bentuk dan pola yang mudah dipahami dan membantu individu untuk mengerti makna peristiwa.
Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki	Strategi konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa, dan dihubungkan dengan rutinitas dan konvensi pembentukan berita.

Sumber: Eriyanto, 2008, h. 67-68

Secara sederhana *framing* disimpulkan sebagai pendekatan dengan melibatkan dua aspek yaitu untuk mengetahui perspektif wartawan dalam memilah suatu isu dan cara wartawan dalam menulis berita (Eriyanto, 2008, h. 68). Aspek pertama, dalam memilih suatu fakta, wartawan akan mempersepsikan realitas menurut pemahamannya sehingga nantinya terdapat dua kemungkinan yaitu fakta apa yang dipilih (*included*) dan fakta apa yang diabaikan (*excluded*). Wartawan menekankan aspek tertentu dalam suatu realita berdasarkan pada fakta – fakta yang sudah mereka pilih yang nantinya hal tersebut menyebabkan penggambaran peristiwa dari suatu media dengan media lain akan menghasilkan sudut pandang yang berbeda. Sedangkan aspek kedua, bagaimana realitas digambarkan melalui penulisan berita. Wartawan mengolah berita dengan cara memilih kata, gambar, pengulangan kata, penempatan berita, menambahkan grafis sebagai data pendukung serta *labeling* terhadap suatu tokoh atau peristiwa yang

nantinya komponen tersebut dapat menyebabkan menonjolnya aspek tertentu dari suatu peristiwa dan peristiwa tersebut akan lebih bermakna dan diingat oleh *audiens* (Eriyanto, 2008, h. 68-69).

Proses *framing* berkaitan erat dengan teori skema (skemata). Teori skema merupakan suatu teori yang menjelaskan bagaimana suatu individu melakukan proses kognitif dalam hal memahami dunia sekitarnya (Eriyanto, 2008, h. 85). Terdapat empat konsep yang mendasari skema suatu individu. Pertama konsep simplifikasi yaitu bagaimana individu memahami realitas sesuai dengan pemahamannya. Setiap individu memiliki alur dalam kognisi mereka untuk menjelaskan suatu peristiwa yang dimana alur tersebut sudah disederhanakan (simplifikasi) agar peristiwa lebih mudah diamati. Persepsi individu terhadap suatu realitas bukanlah bagian dari informasi yang utuh akan tetapi dalam proses kognisi individu, ia cenderung memahami suatu peristiwa berdasarkan apa yang ia anggap penting (Eriyanto, 2008, h. 86).

Konsep kedua adalah konsep klasifikasi yaitu bagaimana individu mengklasifikasikan suatu peristiwa, orang atau kegiatan tertentu dengan tujuan agar hal tersebut bermakna dan mudah dipahami. Semisal individu melabeli peristiwa tertentu dengan klasifikasi baik atau buruk sesuai hasil kognisi individu tersebut (Eriyanto, 2008, h. 87). Konsep ketiga yaitu generalisasi, bagaimana individu mengelompokkan suatu peristiwa atau orang – orang berdasarkan hasil klasifikasi yang sudah ia buat sebelumnya. Dan yang terakhir konsep asosiasi. Skema tidak hanya membuat individu melakukan penyederhanaan, membedakan atau menyamakan saja akan tetapi skema juga dapat membuat individu

mengaitkan hubungan suatu peristiwa dengan peristiwa lain (Eriyanto, 2008, h. 89).

*Framing* tidak hanya berkaitan pada persepsi individual seorang wartawan akan tetapi proses *framing* juga berkaitan dengan media dimana wartawan tersebut bekerja. Media sebagai suatu institusi memiliki seperangkat aturan dan nilai yang dimana hal tersebut akan mempengaruhi wartawan dalam memproses berita (Eriyanto, 2008, h.99). Media massa memiliki fungsi menyebarkan ideologi sebagai bagian integrasi sosial dengan tujuan untuk menjaga nilai sosial dan mengontrol bagaimana nilai – nilai tersebut dijalankan (Eriyanto, 2008, h. 124). Ideologi menjadi acuan bagi media untuk melihat suatu peristiwa (Eriyanto, 2008, h. 130). Menurut Daniel Hallin (dalam Eriyanto, 2008, h.127), dalam menyebarkan ideologi, media massa melihat suatu peristiwa melalui tiga sudut pandang antara lain bidang penyimpangan (*sphere of deviance*), bidang kontroversi (*sphere of legitimate controversy*) dan bidang konsensus (*sphere of consensus*).

Pertama, bidang penyimpangan, media didefinisikan membingkai peristiwa tertentu sebagai bentuk yang menyimpang. Seperti pada peristiwa PKI yang dinilai sebagai bentuk penyimpangan dan dipandang sebagai sesuatu yang buruk (Eriyanto, 2008, h. 127). Bidang selanjutnya adalah bidang kontroversi. Pada bidang ini media melihat peristiwa tertentu sebagai realitas yang masih diperdebatkan atau masih dianggap kontroversional. Bidang yang terakhir adalah bidang konsensus. Bidang konsensus melihat media menunjukkan suatu realitas

yang dipahami secara bersama – sama oleh masyarakat sebagai realitas yang sesuai dengan nilai masyarakat (Eriyanto, 2008, h. 128).

Realitas merupakan hasil pembingkaihan, oleh karena itu antara satu media dengan media lain akan memiliki sudut pandang yang berbeda (Eriyanto, 2008, h.139). Lebih lanjut Eriyanto mengemukakan bahwa pembingkaihan oleh media massa bersifat tidak objektif dan pembingkaihan tersebut akan memiliki efek. Terdapat tiga efek dari pembingkaihan media antara lain efek pertama yaitu media mendefinisikan realitas tertentu sesuai dengan ideologi yang mereka anut sehingga media akan melupakan bahwa realitas tersebut memiliki definisi yang lain. Sebagai contoh perang sipil suku tertentu yang dianggap media hanya sebagai kerusuhan semata (Eriyanto, 2008, h. 140). Efek kedua adalah media hanya menonjolkan topik - topik pemberitaan tertentu sehingga topik - topik yang lain akan memiliki porsi yang sedikit. Efek selanjutnya adalah media hanya menampilkan satu sisi dari realitas atau hanya fokus pada tokoh tertentu sehingga sisi lain dari realitas atau tokoh – tokoh yang lain akan diabaikan.

### **2.2.1 Analisis *Framing* Robert Entman**

*Framing* pada dasarnya melibatkan seleksi dan penonjolan (*salience*). *Framing* adalah memilih beberapa aspek realitas yang dipaksakan dan membuat mereka lebih menonjol dalam berkomunikasi teks dengan tujuan untuk mempromosikan definisi masalah tersendiri, interpretasi kausal, evaluasi moral, dan rekomendasi perawatan untuk item yang dijelaskan (Entman, 1993, h.52). Penonjolan itu sendiri adalah membuat suatu informasi lebih terlihat, bermakna, atau berkesan bagi pemirsa. Penonjolan (*salience*) memungkinkan bahwa

penerima akan merasakan informasi, memahami makna dan dengan demikian memprosesnya, dan disimpan dalam bentuk memori (Fiske dikutip Entman, 1993, h. 53). Teks dapat membuat informasi sedikit lebih menonjol melalui penempatan atau pengulangan dan dengan mengasosiasikannya lewat simbol budaya yang akrab di kognisi individu (Entman, 1993, h.53).

*Frame* adalah elemen inti dari setiap budaya, meskipun kehadirannya seringkali sangat halus. Gamson (Janssen, 2010, h. 24) mencatat bahwa proses dari konstruksi sosial tidak terlihat. Reese (2001, h. 11) berpendapat, *frame* adalah pengorganisasian prinsip-prinsip yang dibagi secara sosial dan gigih dari waktu ke waktu, yang bekerja secara simbolis untuk memaknai struktur dunia sosial. Budaya bergantung pada *frame* untuk berfungsi seperti itu. Menurut Goffman (Janssen, 2010, h. 24), seseorang peka terhadap *frame* tertentu tergantung pada latar belakang budaya mereka. Namun, orang dapat menjadi peka pada *frame*, tergantung pada ketekunan *frame* tersebut. Entman (Janssen, 2010, h. 24) merujuk fenomena ini sebagai '*cultural stock of frames*'. Ini harus diingat oleh wartawan atau individu lain yang menerapkan *frame* untuk menyampaikan pesan tertentu.

Menurut Robert Entman (1993, h. 52), *frame* dimanifestasikan oleh ada atau tidaknya kata kunci tertentu, stok frasa, stereotip gambar, sumber informasi, dan kalimat-kalimat yang secara tematis menguatkan kumpulan fakta atau penilaian. Baldwin van Gorp (2007, h. 68) menunjukkan bahwa perbedaan antara *framing* oleh media dan *framing* melalui media harus dipahami. *Framing* melalui media mengacu pada pengaruh dari *frame* sponsor, yang dapat berupa kelompok kepentingan, *spin doctor*, atau pengiklan yang peduli dengan mengarahkan



persepsi dan pemilihan bingkai jurnalis sesuai dengan minat mereka. Dalam hal ini, wartawan digunakan sebagai alat untuk menerapkan bingkai yang diinginkan. Pembingkai oleh media berarti bahwa pengaruh eksternal terhadap jurnalis tidak diperhitungkan. Namun, sulit untuk memisahkan pengaruh eksternal, karena jurnalis adalah subyek dari pembentukan budaya seperti halnya individu lainnya (Janssen, 2010, *h.* 25).

Sebelum masuk lebih dalam ke konsep analisis *framing* untuk menempatkannya dalam fenomena *frame*, penting untuk menyebutkan bahwa *frame* memainkan peran dalam setidaknya empat lokasi dari proses komunikasi, seperti yang dijelaskan oleh Entman (1993, *h.* 52-53). Lokasi-lokasi ini adalah komunikator, teks, penerima, dan budaya. Komunikator (penulis teks) membuat penilaian *framing* dan menerapkan bingkai sesuai dengan sistem kepercayaan mereka sendiri. Teks berisi bingkai aktual. Penerima pesan (pembaca) dapat merasakan atau tidak merasakan *frame* yang diterapkan. Akhirnya, budaya digambarkan sebagai stok bingkai yang lazim digunakan. Budaya didefinisikan sebagai kumpulan bingkai umum yang ditunjukkan secara empiris dalam wacana dan pemikiran kebanyakan orang dalam kelompok sosial.

Menurut pengelompokan ini, analisis bingkai terjadi di dalam lokasi keempat yaitu budaya. Bagian dari budaya ini, khususnya penelitian media, mencoba memahami keterkaitan ini untuk menjelaskannya kepada anggota lain dari budaya yang sama yaitu publik (Janssen, 2010, *h.* 26). Van Gorp (2007, *h.* 64) menunjukkan bahwa komunikator, teks, penerima, dan budaya tidak hanya dapat ditemukan di lokasi yang berbeda tetapi pada tingkat yang berbeda juga. Dia

mengatakan bahwa *framing* melibatkan interaksi yang terjadi antara level tekstual (*frame* yang diterapkan di media), level kognitif (skema di antara penonton dan pembuat media), level extra media (wacana *sponsor frame*), dan, akhirnya, stok *frame* yang tersedia dalam budaya tertentu.

Potret *framing* ini memiliki implikasi penting untuk komunikasi politik. *Frame* memperhatikan beberapa aspek realitas saat mengaburkan elemen lain, yang dapat menyebabkan audiens memiliki reaksi yang berbeda. Para politisi yang mencari dukungan dipaksa untuk bersaing dengan masing-masing lawan dan juga bersaing dengan wartawan di atas bingkai berita (Entman, 1993, h.55). *Framing* dalam ini memainkan peran utama untuk mengarahkan kekuatan politik. Bingkai dalam teks berita merupakan tanda kekuasaan itu sendiri. *Frame* memperkenalkan identitas suatu aktor atau kepentingan yang bersaing untuk mendominasi teks (Entman, 1993, h.55).

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi bagi peneliti adalah skripsi milik Siti Sarohmawati (2017) dengan judul *Sikap Media terhadap Isu Politik dan Agama Islam pada kasus Ahok*. Pada penelitian ini ditemukan bahwa situs Republika.co.id melihat kasus ini sebagai masalah hukum dan menilai Ahok sebagai sumber dari masalah tersebut. Evaluasi moral yang ditemukan pada berita Republika.co.id adalah bahwa seharusnya pemimpin Negara harus menjaga kesatuan dan tidak menistakan agama.

Sedangkan pada situs metrotvnews.com (2016), menilai bahwa kasus Ahok merupakan masalah politik dan penyebab masalahnya adalah aktor politik yang melakukan makar. Evaluasi moral yang ditemukan pada berita metrotvnews.com adalah Ahok sebagai korban dari propaganda politik politik. Manfaat dari penelitian ini adalah peneliti dapat memahami penerapan analisis *framing* model Robert Entman melalui penelitian yang dilakukan oleh Siti Sarohmawati dengan melakukan analisis berita dilihat dari definisi masalah, sumber masalah, evaluasi moral dan solusi untuk masalah tersebut. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah pada hasil penelitian ditemukan bahwa pembingkaihan berita dipengaruhi oleh pemilik media sebagai bagian dari aktor politik sedangkan Tirto.id merupakan media non partisipan (politik).

Penelitian selanjutnya adalah penelitian dari Andi Sitti Maryandani (2016) tentang dugaan kasus korupsi yang dilakukan terhadap Dewi Yasin Limpo oleh berita harian Tribun Timur. Penelitian ini menemukan bahwa Dewi Yasin Limpo sebagai subjek penelitian memiliki *proximity* dengan Gubernur Sumatera Selatan sehingga terjadinya *salience* pemberitaan di media Tribun Timur. Manfaat penelitian ini adalah peneliti mendapatkan gambaran tentang bagaimana media mengkontruksi aktor dari politik. Sedangkan kekurangan dalam penelitian ini adalah peneliti hanya melihat penyebab pembingkaihan dari segi subjek berita yaitu *proximity* Dewi Yasin Limpo sebagai adik dari Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo akan tetapi peneliti tidak dapat menemukan kaitannya antara pembingkaihan berita tersebut dengan media Tribun Timur.

Kesenjangan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian yang dilakukan Andi Sitti Maryandani (2016) tidak ada kajian lanjutan mengapa sebuah isu tentang dugaan korupsi Dewi Yasin Limpo ditinggalkan sedemikian rupa oleh media Tribun Makassar. Sedangkan pada penelitian kedua oleh Siti Sarohmawati (2017) ditemukan bahwa pembungkaman oleh media berkaitan erat dengan teori ekonomi politik media dimana politikus sebagai pemilik media dapat mempengaruhi keobjektifan dari informasi yang dibagikan oleh media. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, media online Tirto.id sebagai subjek penelitian mengklaim dirinya menerapkan jurnalisme presisi yang tidak menganut sistem politik apapun dan bersifat non partisipan (Tim Redaksi Tirtoid, 2016). Hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian oleh Siti Sarohmawati (2017) dimana pembungkaman oleh media dipengaruhi oleh pemilik media sebagai bagian dari pelaku politik.

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

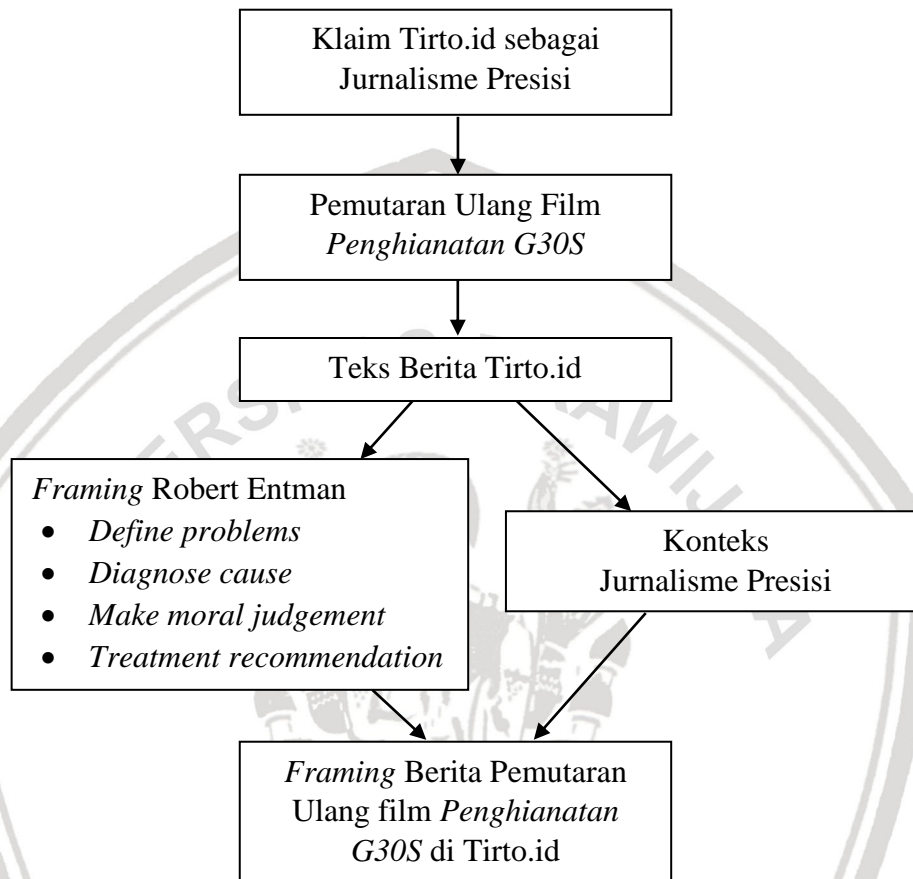
No	Penulis	Judul Penelitian	Relevansi Penelitian	Perbedaan Penelitian	Manfaat Penelitian
1	Andi Sitti Maryandani (2016)	<i>Analisis Framing Berita Kasus Korupsi Dewi Yasin Limpo di Harian Tribun Timur Makassar</i>	Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana <i>framing</i> media dalam sebuah issue yang diberitakan dengan menggunakan analisis <i>framing</i> model Robert Entman. Penelitian ini juga memilih satu subjek penelitian, dalam hal ini yaitu <i>Harian Tribun Timur Makassar</i> .	Dalam penelitian ini, Maryandani belum dengan detail menjelaskan mengapa kasus korupsi Limbo cenderung dibingkai tidak hanya sebagai kasus hukum, namun juga terkait dengan <i>proximity</i> sosok subjek yaitu Limpo.	Peneliti dapat memahami bahwa pembingkaiian pemberitaan media juga berhubungan dengan <i>proximity</i> media dengan sosok subjek yang diceritakan.
2	Siti Sarohmawati (2017)	<i>Sikap Media terhadap Isu Politik dan Agama Islam pada kasus Ahok.</i>	Penelitian ini membahas tentang analisis <i>framing</i> model Robert Entman terhadap kasus politik.	Pada penelitian ini ditemukan bahwa <i>framing</i> suatu media dipengaruhi tokoh politik sebagai pemilik media. Sedangkan Tirto.id sebagai objek penelitian tidak berpihak pada politik apapun.	Peneliti dapat memahami bahwa ideologi media membentuk formulasi pembingkaiian yang dilakukan.

Sumber: Diolah oleh penulis



## 2.5 Kerangka Pemikiran

**Bagan 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber: Diolah oleh penulis

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dimulai dengan permasalahan Tirto.id mengklaim bahwa Tirto.id merupakan salah satu bentuk media massa menganut sistem jurnalisme presisi, yang mendasarkan beritanya pada data dan analisis, serta tidak menganut sistem politik apapun dan bersifat non partisipan (Tim Redaksi Tirtoid, 2016). Tetapi hal tersebut bertentangan dengan Dewan Pers Indonesia yang menyatakan bahwa Tirto.id dianggap tidak berimbang dan melanggar kode etik jurnalistik karena mempublikasikan berita yang berisi laporan investigasi *in depth* Allan Nairn (Wahyudi, 2017). Berita *in depth* oleh

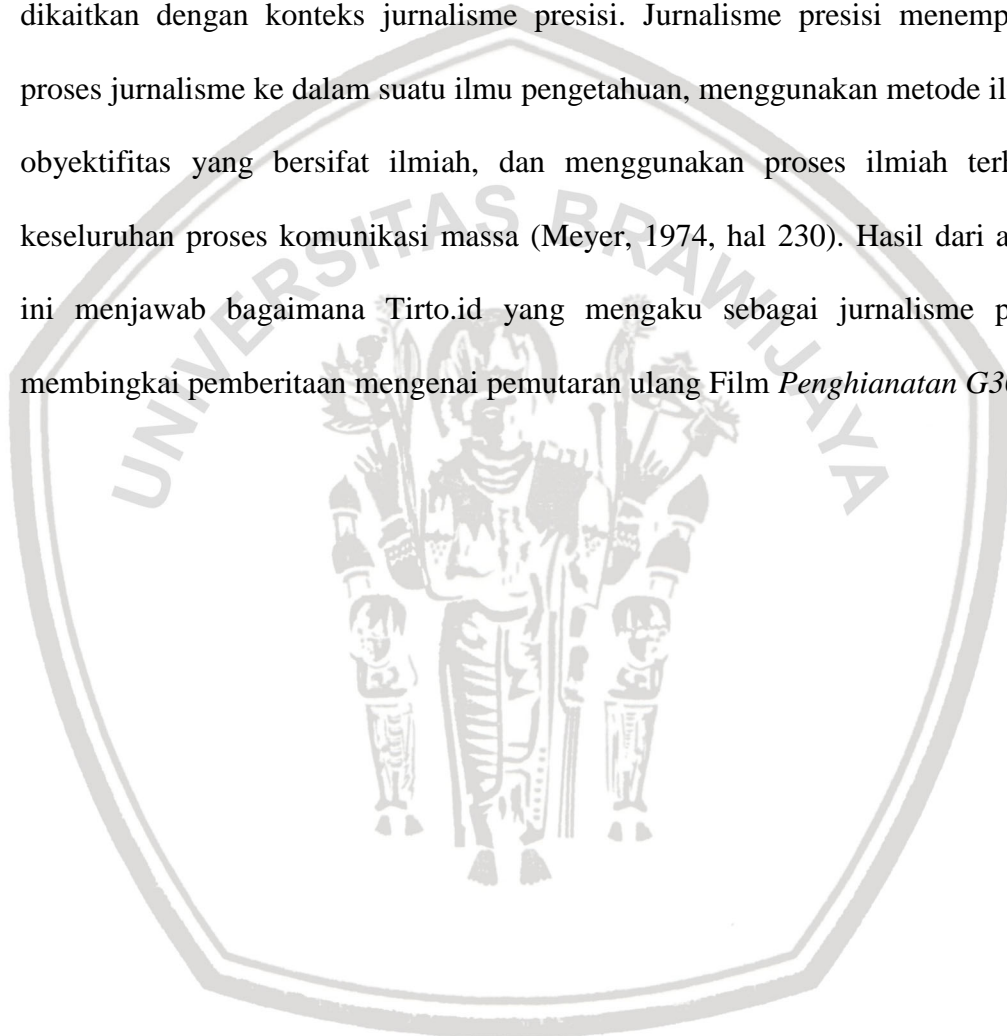
Allan Nairn di Tirto.id tersebut menjelaskan secara detail upaya kudeta militer Indonesia yang dinilai mengulang sejarah Gerakan 30 September (G30S), dan salah satu aktor yang terlibat adalah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (Nairn, 2017).

Pada bulan September 2017, berita tentang komunisme meningkat di beberapa media online Indonesia setelah adanya ajakan pemutaran ulang Film *Penghianatan G30S* oleh arahan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Tirto.id mempublikasikan polemik pemutaran ulang Film *Penghianatan G30S* tersebut sebanyak 49 berita pada September 2017 (Tirto, 2017). Seperti halnya kasus laporan Allan Nairn, Tirto.id menilai pemutaran ulang Film *Penghianatan G30S* memiliki kaitan dengan propaganda politik di Indonesia yang dilakukan oleh Gatot Nurmantyo sebagai usaha untuk “mencuri panggung” Pemilu Presiden 2019 (Kresna, 2017).

Tirto.id yang mengaku menganut jurnalisme presisi dapat dilihat melalui teks berita yang dipublikasikannya. Dalam jurnalisme presisi, jurnalis memiliki hipotesis atau skemata agar dapat menentukan kerangka teoritik untuk menguji suatu realita (Meyer, 1979, h.10). Akan tetapi skemata antara seseorang dengan orang yang lain akan berbeda – beda. Jurnalis memiliki konstruksi terhadap suatu realitas menurut hasil pemahamannya yang dikenal dengan istilah *framing* (Eriyanto, 2008, h. 85).

Untuk mengetahui *framing* Tirto.id dalam pemberitaan tentang pemutaran ulang Film *Penghianatan G30S*, teks berita Tirto.id dianalisis menggunakan model *framing* Robert Entman. Rober Entman memandang *framing* sebagai

proses memilih beberapa aspek realitas yang dipaksakan dan membuat mereka lebih menonjol dalam berkomunikasi teks dengan tujuan untuk mempromosikan definisi masalah tersendiri, interpretasi kausal, evaluasi moral, dan rekomendasi perawatan untuk item yang dijelaskan (Entman, 1993, h.52). Hasil analisis ini dikaitkan dengan konteks jurnalisme presisi. Jurnalisme presisi menempatkan proses jurnalisme ke dalam suatu ilmu pengetahuan, menggunakan metode ilmiah, obyektifitas yang bersifat ilmiah, dan menggunakan proses ilmiah terhadap keseluruhan proses komunikasi massa (Meyer, 1974, hal 230). Hasil dari analisis ini menjawab bagaimana Tirto.id yang mengaku sebagai jurnalisme presisi membingkai pemberitaan mengenai pemutaran ulang Film *Penghianatan G30S*.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

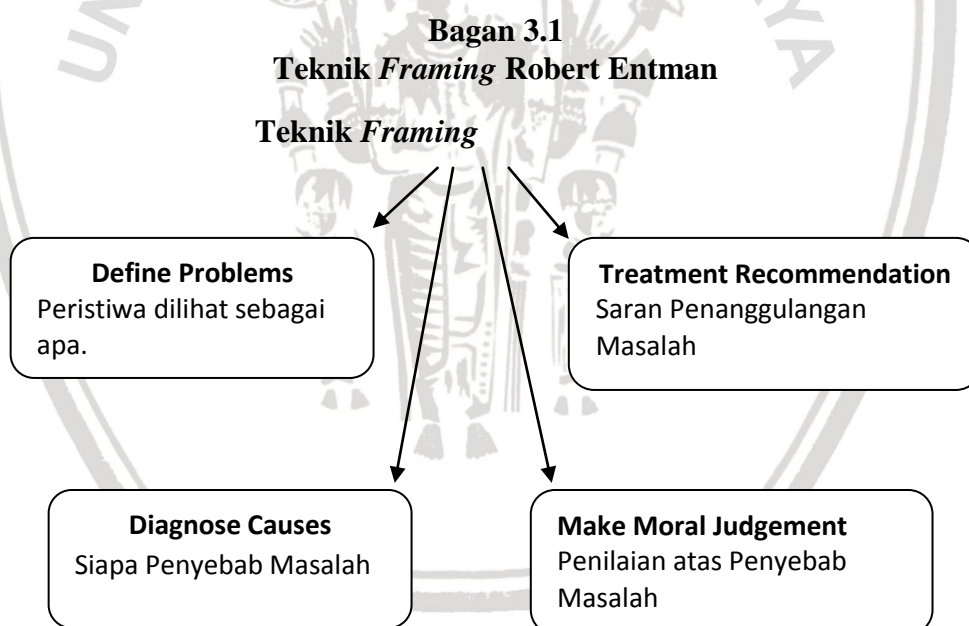
##### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk menerangkan pembingkai yang dilakukan Tirto.id pada pemberitaan tentang pemutaran ulang film *Penghianatan G30S*. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang hasil temuannya tidak berdasarkan hasil perhitungan statistik atau bentuk hitungan lainnya (Sugianto, 2017, h.8). Lebih lanjut Sugianto mengemukakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali proses dan makna suatu pesan dari sudut pandang subjek yang dimana peneliti menjadi instrumen kunci dari penelitian.

Penelitian kualitatif bersifat induktif dan deskriptif (Sugianto, 2017, h.8). Tujuan penelitian deskriptif adalah menyajikan gambaran tentang rincian spesifik situasi, *setting* sosial, atau hubungan. Sebuah penelitian deskriptif dimulai dengan permasalahan atau pertanyaan yang terdefinisi dengan baik dan mencoba untuk menggambarannya secara akurat. Hasil penelitian adalah gambaran rinci tentang masalah atau jawaban atas pertanyaan penelitian. Sebuah studi deskriptif menyajikan gambaran tentang tipe orang atau kegiatan sosial dan berfokus pada pertanyaan 'bagaimana' dan 'siapa'. Penggambaran bagaimana sebuah isu lebih diperhatikan daripada menjelaskan mengapa isu tersebut terjadi (Neuman W. L., 2014, hal. 39).

### 3.2 Metode Penelitian

Metode yang peneliti gunakan adalah metode *framing* oleh Robert Entman. Entman melihat *framing* melalui dua dimensi yaitu seleksi suatu isu dan penonjolan aspek tertentu dari suatu realitas (Eriyanto, 2008, h. 186). Seleksi isu merupakan pengolahan data dengan memilih apa fakta yang dimasukkan (*included*) dan fakta apa yang diabaikan (*excluded*). Sedangkan penonjolan suatu isu berhubungan dengan cara penulisan fakta yang berkaitan dengan pemakaian kata, gambar atau stereotip tertentu (Eriyanto, 2008, h. 187). Analisis *framing* model Robert Entman memiliki 4 tahapan antara lain dijelaskan pada gambar berikut.



Sumber: Eriyanto, 2002, h. 223

*Define problems* adalah bagaimana suatu peristiwa dimaknai oleh wartawan atau sebagai masalah apa peristiwa tersebut dilihat. *Diagnose causes* adalah menentukan apa yang menjadi masalah atau menentukan siapa tokoh yang dianggap sebagai penyebab masalah dari peristiwa. *Make moral judgement* adalah



memberikan argumentasi terhadap definisi masalah yang telah dibuat melalui gagasan pendukung yang mengandung nilai moral. Dan yang terakhir adalah *treatment recommendation* merupakan solusi untuk menyelesaikan masalah dari peristiwa tersebut (Eriyanto, 2008, h. 186-191).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan paradigma konstruksionis untuk mengkaji fenomena yang akan diamati. Hal tersebut dikarenakan peneliti menggunakan analisis *framing* yang dimana *framing* merupakan analisis teks yang berada pada paradigma konstruksionis (Eriyanto, 2008, h.37) . Paradigma konstruksionis adalah sebuah pandangan untuk mengamati bagaimana suatu peristiwa dikonstruksi dan dengan cara apa peristiwa tersebut dikonstruksi (Eriyanto, 2008, h. 37). Paradigma konstruksionis memiliki pandangan bahwa komunikasi bukanlah proses satu arah saja akan tetapi manusia saling memproduksi dan saling bertukar makna. Terdapat dua ciri utama dalam paradigma ini. Pertama, paradigma konstruksionis berfokus pada proses pemaknaan yaitu bagaimana individu membentuk suatu realitas. Kedua, paradigma konstruksionis memandang proses komunikasi sebagai sesuatu yang dinamis. Makna sebuah pesan dianggap berubah (dinamis) karena manusia secara aktif memaknai suatu realita. Suatu pesan bukanlah fakta yang bersifat apa adanya melainkan fakta adalah hasil penggambaran dari kognisi individu (Eriyanto, 2008, h. 41).

Dalam paradigma konstruksionis, peneliti berusaha memahami bagaimana suatu media memberitakan peristiwa tertentu. Penelitian akan dianggap berhasil jika peneliti mampu memahami apa yang ingin disampaikan oleh media tersebut

atau apa yang diinginkan oleh media tersebut (Eriyanto, 2008, h. 47). Paradigma konstruksionis tidak menganggap fakta itu sudah ada melainkan fakta itu dibentuk dalam konsep pikiran seseorang. Hasil penelitian dengan menggunakan paradigma konstruksionis bukanlah sebuah temuan yang objektif akan tetapi merupakan suatu temuan yang melibatkan proses interaksi antara peneliti dengan objek yang diamati (Eriyanto, 2008, h. 48). Metode penelitian *framing* model Robert Entman dengan paradigma konstruktivis ini dipilih untuk mengetahui bagaimana Tirto.id melakukan pembingkaihan pada berita pemutaran ulang film *Penghianatan G30S*.

### 3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan lingkup penelitian yang dijadikan sebagai wilayah pelaksanaan penelitian, sehingga peneliti memperoleh gambaran jelas tentang situasi yang diteliti. Limitasi penelitian ini adalah pembingkaihan berita pemutaran ulang film *Penghianatan G30S* yang berkaitan dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Tirto.id pada periode September 2017. Periode ini dipilih karena arahan untuk memutar ulang film *Penghianatan G30S* oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pada bulan September 2017 menjadi pemicu banyaknya pemberitaan tentang isu tersebut. Selain itu, pada bulan tersebut polemik pemutaran ulang Film *Penghianatan G30S* mendapatkan porsi 31% dari total bahasan di media sosial wilayah Indonesia (Saputri, 2017). Pada bulan September 2017, terdapat total 49 pemberitaan Tirto.id tentang isu tersebut. Oleh karena banyaknya pemberitaan, peneliti kembali mengerucutkan penelitian

ini hanya pada pemberitaan yang memenuhi empat elemen *framing* Robert Entman yaitu, *define problems*, *diagnose cause*, *make moral judgement* dan *treatment recommendation*. Dari hasil seleksi dengan alasan-alasan tersebut, peneliti menemukan tujuh berita yang sesuai dengan fokus penelitian.

**Tabel 3. 1**  
**Rekapitulasi Pemberitaan Pemutaran Ulang Film *Penghianatan G30S* di Tirta.id Periode September 2017**

No	Tanggal Muat	Judul Berita
1	19 September 2017	PFN: Perlu Tafsir Ulang Jika Film G30S/PKI Diproduksi Lagi
2	19 September 2017	TNI Dinilai Tak Sejalan dengan Jokowi Soal Rekonsiliasi 65
3	20 September 2017	Catatan Sejarahwan Soal Pembuatan Ulang Film G30S/PKI
4	20 September 2017	Pembuatan Ulang Film G30S/PKI Harus Ungkap Fakta Sejarah
5	29 September 2017	Film 'G30S' yang dianggap Narasi Sejarah oleh TNI & Sekolah
6	29 September 2017	Cara Gatot Nurmantyo Cari Panggung Sebelum Pensiun
7	29 September 2017	Mempropagandakan Film Seram G30S PKI

Sumber: diolah penulis

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berita Tirta.id yang berkaitan dengan pemutaran ulang Film *Penghianatan G30S* di periode September 2017. Berita tersebut berupa teks dan foto. Terdapat total 7 pemberitaan pada periode tersebut. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan permasalahan *framing* dan jurnalisme presisi.

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah instrumen pengumpulan data yang sering

digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data, tujuannya untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data. Dokumen dapat berbentuk dokumen publik atau dokumen privat (Kriyantono, 2012, hal. 120). Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti diawali dengan pengumpulan data berupa dokumentasi pemberitaan pemutaran ulang film *Penghianatan G30S* di Tirto.id pada periode September 2017. Peneliti melakukan dokumentasi data dengan mengambil *screenshot* pada tujuh berita terpilih dan menjadikannya *file* pada komputer. Kemudian peneliti melakukan *framing* analisis kepada tujuh berita tersebut menggunakan model *framing* analisis Robert Entman.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif yaitu cara untuk mendeskripsikan secara holistik fokus kajian penelitian melalui hasil interpretasi peneliti (Taufan, 2016, h. 106). Menurut Bogdan & Biklen (dalam Moleong, 2014 h. 248), analisis data kualitatif adalah cara untuk memilah data atau menyusun data agar data tersebut dapat dikelola, menemukan pola dan apa yang dianggap penting sehingga dapat dideskripsikan lebih lanjut. Data dalam penelitian ini adalah berita tentang kasus komunisme yang ada pada media Tirto.id dengan rentang waktu September 2017 sampai dengan Oktober 2017. Langkah – langkah untuk menganalisis data penelitian adalah sebagai berikut.

1. Peneliti membaca satu per satu berita tentang polemik pemutaran ulang film *Penghianatan G30S* yang ada di media online Tirto.id
2. Peneliti memilah berita tersebut untuk disesuaikan dengan fokus penelitian
3. Berita yang telah dipilah selanjutnya dianalisis dengan *framing* model Robert N.Entman meliputi pendefinisian masalah (*define problems*), menemukan akar permasalahan (*diagnose causes*) , melakukan evaluasi moral (*make moral judgement*) dan menemukan solusi permasalahan (Eriyanto, 2008, h. 186).
4. Peneliti merangkum hasil temuan pada berita tentang polemik pemutaran ulang film *Penghianatan G30S* di media Tirto.id
5. Peneliti kemudian menganalisa kembali secara keseluruhan hasil temuan dengan konsep jurnalisme presisi. Hasil analisa tersebut kemudian dikaitkan kembali dengan tinjauan pustaka.
6. Peneliti membuat kesimpulan berdasarkan analisa yang berkaitan dengan *framing* berita tentang polemik pemutaran ulang film *Penghianatan G30S* di media Tirto.id

Penelitian ini menggunakan teknik analisis *framing* model Robert Entman yang meliputi *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgement* dan *treatment recommendation* (Eriyanto, 2008, h. 186). Secara lebih rinci akan dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 3.2**  
**Penjelasan Elemen *Framing* Robert Entman**

<b><i>Define Problems</i></b> <b>(Pendefinisian Masalah)</b>	Bagaimana suatu realitas atau peristiwa dilihat dari sudut pandang media. Atau diliat sebagai permasalahan apakah suatu realitas
---	--



	tersebut.
<b><i>Diagnose Causes</i></b> <b>(Memperkirakan sumber dari masalah)</b>	Siapa penyebab dari permasalahan tersebut. Suatu realitas dilihat dari siapa aktor atau pelaku penyebab dari masalah.
<b><i>Make moral judgement</i></b> <b>(Membuat keputusan moral)</b>	Nilai moral apakah yang digunakan untuk menghakimi atau menilai suatu tindakan.
<b><i>Treatment Recommendation</i></b> <b>(Menemukan penyelesaian)</b>	Apa saja penyelesaian yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan dari peristiwa tersebut.

Sumber: Eriyanto, 2008, h. 223

### 3.6 Uji Keabsahan Data

Menurut Taufan (2016, hal. 108) dalam penelitian kualitatif, suatu data dinyatakan absah atau valid apabila memenuhi empat syarat antara lain kebergantungan (*dependability*), kepercayaan (*credibility*), kepastian (*confirmability*) serta keteralihan (*transferability*). Kebergantungan (*dependability*) memiliki makna bahwa proses penelitian mulai dari penentuan masalah hingga penarikan kesimpulan merupakan sebuah rangkaian yang berkesinambungan dan harus bersifat *reliable*. Sedangkan kepercayaan (*credibility*) memiliki makna bahwa validitas internal dari penelitian didapatkan melalui kecocokan antara kerangka berpikir peneliti dengan hasil penelitian. *Credibility* dapat diperoleh melalui teknik triangulasi yaitu menganalisis data emik menjadi data etik. Selanjutnya kepastian (*confirmability*) adalah proses untuk menguji keterkaitan hasil dan proses penelitian. Dan keteralihan (*transferability*) merupakan bentuk validitas eksternal yang bertujuan untuk mengetahui apakah hasil penelitian dapat diterapkan pada fenomena sosial yang berbeda atau tidak (Taufan, 2016, hal. 108).

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Singkat Tirto.id

Tirto.id merupakan media online milik PT Tirta Adi Surya dengan penerbit yang dijalankan oleh PT Tujuh Cahaya Sentosa. Tirto.id diresmikan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2016. Nama Tirto diambil dari bahasa Jawa yang memiliki arti “air”. Nama Tirto.id memiliki filosofi seperti air mengalir yang mengisi lubang, yang dapat dimaknai sebagai penyampai pesan atau berita. Selain itu, Tirto.id juga memiliki filosofi seperti air yang jernih yang menunjukkan kedalaman, yang dapat dimaknai sebagai dalamnya atau detailnya berita yang disampaikan.

Tirto.id merupakan media online yang menganut sistem jurnalisme presisi. Berita yang disajikan menggunakan hasil analisis dan riset dari berbagai sumber media massa. Hasil analisis dan riset tersebut disajikan ke dalam bentuk *timeter* yaitu suatu pengukuran pandangan terhadap kasus, lembaga, tokoh yang selanjutnya diterbitkan melalui *indepth reporting*. Data – data yang ada dalam Tirto.id baik itu data statistik, foto, video atau kutipan seseorang disajikan melalui infografik. Selain itu Tirto.id merupakan media non partisipan atau media yang tidak berpihak pada tokoh atau politik (Redaksi Tirto.id, 2016). Tirto.id pernah memenangkan website terbaik versi PANDI pada tahun 2016 (Indra, 2016). Tirto.id juga meraih penghargaan dari Anugerah Jurnalistik Adinegoro sebagai

media online terinovatif pada tahun 2017, selain itu pada Januari 2018 Tirto.id dinyatakan lolos verifikasi sebagai media credible oleh International Fast-Checking Network (Damaledo, 2018).

Tirto.id memiliki perbedaan dalam hal proses *news gathering* dibandingkan dengan media online yang lain. Tirto.id memiliki metode khusus antara lain riset yang dilakukan mandiri dan metode periksa data. Metode pertama dalam proses *news gathering* di Tirto.id adalah metode riset yang dilakukan secara mandiri. Riset mandiri adalah survei langsung yang dilakukan oleh tim peneliti Tirto.id. Sedangkan metode kedua berupa periksa data dilakukan dengan dua struktur antara lain *live fact-check* dan analisis (Tim redaksi Tirto.id, 2017).

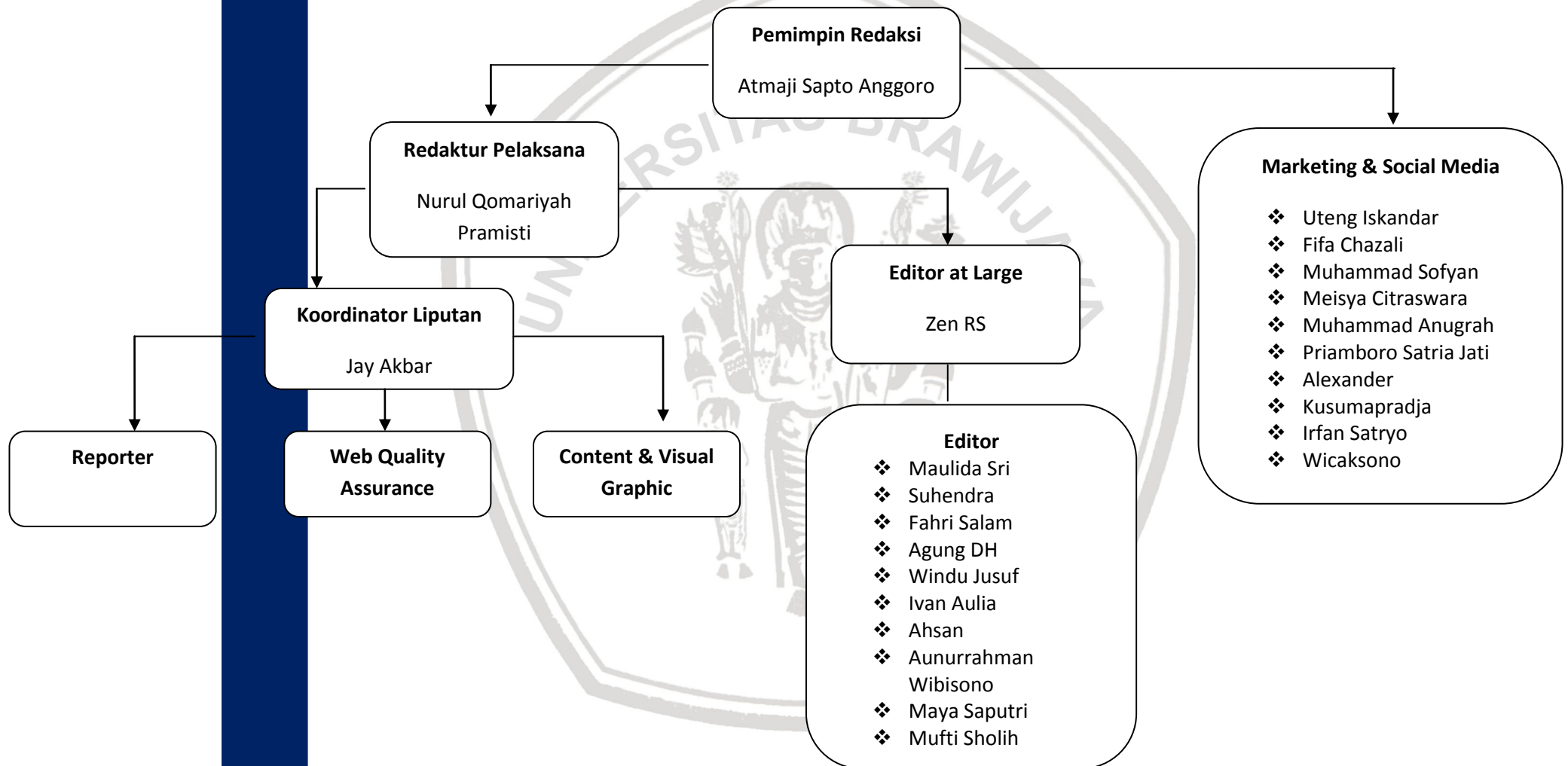
*Live fact-check* merupakan perbandingan langsung antara data resmi dengan pernyataan narasumber. Metode periksa data ini dilakukan langsung pada acara tertentu seperti pernyataan narasumber yang didapatkan pada acara debat atau dapat berupa pidato kepresidenan. Selanjutnya struktur kedua dalam proses periksa data adalah analisis, yaitu menganalisis suatu isu kontemporer. Isu tersebut nantinya akan diverifikasi menggunakan data resmi dan disajikan dalam bentuk laporan singkat (*mild-report*). *Mild-report* di Tirto.id dipublikasikan dalam bentuk artikel dengan periode seminggu dua kali (Tim redaksi Tirto.id, 2017).

Data yang ada di periksa data disajikan dalam bentuk infografik. Data – data tersebut didapatkan melalui sumber – sumber tertentu yang memiliki beberapa level. Level pertama, sumber didapatkan melalui Bursa Efek, Pemerintah Pusat dan Daerah, Badan Statistik Negara atau Daerah serta melalui

laporan perusahaan. Level kedua, sumber didapatkan melalui organisasi internasional seperti IMF, ASEAN, PBB dan lain-lain. Pada level ketiga, sumber data didapatkan melalui jurnal ilmiah yang kredibel seperti Mckinsey, BCG, Nielsen, *MIS Quarterly*, *The Quarterly Journal of Economics* dan konsultan besar. Data – data online yang digunakan ditautkan pada berita dalam bentuk *hyperlink* (Tim redaksi Tirto.id, 2017).



#### 4.1 Struktur Redaksi



Sumber : [tirto.id/insider/redaksi](https://tirto.id/insider/redaksi)

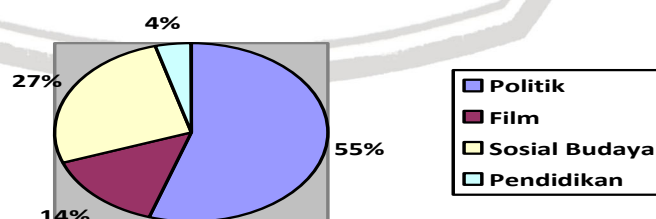


#### 4.2 Analisis Framing Berita Polemik Pemutaran Ulang Film G30S

Polemik pemutaran ulang film G30S bermula ketika Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengintruksikan kepada seluruh korps TNI mulai dari tingkat Babinsa (Bintara Pembina Desa), Koramil (Komando Rayon Militer) hingga tingkat Kodim (Komando Distrik Militer) untuk memutar ulang film tersebut. Pemutaran ulang film G30S menjadi polemik dikarenakan film tersebut sudah berhenti ditayangkan pada Oktober 1998 dengan mempertimbangkan bahwa film tersebut tidak sesuai dengan dinamika reformasi (Sudarsono, 2017). Beberapa media online memberitakan polemik tersebut salah satunya adalah media online Tirto.id . Pada bulan September 2017, menjelang peringatan G30S, Tirto.id memberitakan polemik pemutaran ulang film tersebut sekitar 49 berita dari total 99 berita tentang topik komunisme. Dari 49 berita tersebut, polemik pemutaran ulang film G30S mendapatkan porsi terbanyak di rubrik politik sebesar 27 berita.

Bagan 3

Grafik pemberitaan polemik pemutaran ulang film G30S di media online Tirto.id.



Sumber : Data Olahan Peneliti

Dari total 27 berita tentang polemik pemutaran ulang film G30S di rubrik politik, peneliti memilih 7 berita yang menurut peneliti memiliki unsur 4 elemen *framing* model Robert Entman meliputi *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgement* dan *treatment recommendation*. Selain itu berita tersebut menggambarkan penonjolan yang dilakukan oleh media online Tirto.id terhadap aktor Jenderal TNI Gatot Nurmantyo terhadap polemik pemutaran ulang G30S.

#### 4.2.1 Analisis Berita Berjudul “Cara Gatot Nurmantyo Cari Panggung Sebelum Pensiun”

**Tabel 5**  
**5W+1H dalam Berita**

<b>What</b>	Cara Gatot Nurmantyo mencuri panggung
<b>How</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Pemutaran Ulang di tempat ramai. Beberapa penonton diantaranya adalah Generasi Z (pemilih pemula dalam pemilu Presiden)</li> <li>2. Melakukan pendekatan terhadap beberapa ulama dan kelompok muslim dengan melakukan aksi “Bela Islam”</li> </ol>
<b>Who</b>	Jenderal Gatot Nurmantyo
<b>Where</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemutaran Ulang di Taman Cijantung</li> <li>2. Pendekatan dengan beberapa ulama dan kelompok muslim (bela Islam pada kasus Ahok, istighasah di Pangkalan Udara Soewondo Medan, Pertemuan dengan ulama di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Safari Ramadhan di Lapangan Apel Yonif Malang, Buka puasa di Tarakan, Mengunjungi Santri di tasikmalaya, Ceramah kebangsaan di Universitas Ahmad Dahlan, Tausiah Kebangsaan di Semarang)</li> </ol>
<b>When</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemutaran film yang dilakukan mendekati hari peringatan G30S (Sabtu petang)</li> <li>2. Aksi bela Islam mulai dari November 2016 hingga menjelang Gatot Nurmantyo pensiun dari jabatannya (Maret 2018)</li> </ol>
<b>Why</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapatkan panggung sebelum Gatot Nurmantyo pensiun dari jabatannya</li> <li>2. Mempengaruhi santri dan ulama bahwa mereka adalah pejuang kemerdekaan</li> <li>3. Mempengaruhi masyarakat akan munculnya komunisme gaya baru</li> </ol>

Sumber : Data Olahan Peneliti

Secara keseluruhan ringkasan berita ini adalah Jenderal Gatot Nurmantyo dianggap melakukan propaganda politik kepada santri dan ulama untuk mendapatkan perhatian publik sebagai upaya mencari panggung dalam pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta. Selain itu, Gatot Nurmantyo juga dianggap menyebarkan ketakutan di Indonesia akan munculnya kembali komunisme dalam bentuk yang baru dengan menyelenggarakan pemutaran ulang film G30S sebagai bentuk pengingat akan kekejaman partai komunisme Indonesia di masa lalu.

**Tabel 6**

***Analisis Framing “Cara Gatot Nurmantyo Cari Panggung Sebelum Pensiun”***

<i>Define problems</i> (Pendefinisian masalah)	Panglima TNI berkali-kali mencuri perhatian media dengan memakai sentimen agama, dalam hal ini kaum Islam, dan memunculkan ketakutan akan kebangkitan "Komunis Gaya Baru".
<i>Diagnose causes</i> (Sumber Masalah)	Jenderal Gatot Nurmantyo merupakan penyebab dari masalah ini. Tirto.id menganggap Gatot Nurmantyo telah melakukan propaganda terhadap ulama dan kaum muslim. Serta Tirto.id menganggap Gatot Nurmantyo ingin menimbulkan ketakutan di masyarakat dengan memunculkan isu kelahiran komunisme gaya baru
<i>Make moral judgments</i> (Membuat keputusan moral)	Pemutaran ulang film G30S dianggap Tirto.id sebagai upaya menyebarkan ketakutan mengenai komunisme gaya baru.
<i>Treatment Recommendation</i> (Solusi yang ditawarkan)	Solusi yang ditawarkan pada masalah ini adalah adanya rekomendasi dari Presiden Joko Widodo untuk membuat film G30S versi terbaru yang dimana film G30S versi lama yang diputar Gatot Nurmantyo dinilai terlalu menampilkan kekejaman PKI dan tidak cocok untuk ditayangkan pada generasi muda.

Sumber: diolah peneliti

***Define problems.*** Masalah yang ditemukan pada berita ini adalah Gatot Nurmantyo yang dibingkai oleh Tirto.id telah “mencuri” perhatian media massa dalam upaya mencari panggung di dunia politik sebelum ia mengakhiri jabatannya

sebagai panglima TNI. Hal tersebut dapat dilihat melalui *headline* berita berikut, “Panglima TNI berkali-kali mencuri perhatian media dengan memakai sentimen agama, dalam hal ini Islam, dan kebangkitan "Komunis Gaya Baru". Terdapat dua pemingkakan oleh Tirto.id tentang bagaimana Gatot Nurmantyo mencari panggung sebelum ia pensiun. Cara pertama adalah dengan menyebarkan isu akan bangkitnya PKI. Gatot Nurmantyo melakukan pemutaran ulang film pengkhianatan G30S di Taman Cijantung, Jakarta Timur. Pemutaran ulang film pengkhianatan G30S tersebut dilakukan menjelang adanya peringatan peristiwa G30S. Pada pemutaran film tersebut, Gatot juga memutar video wawancara dirinya yang berisi tentang adanya ancaman bahwa PKI akan lahir kembali di Indonesia. Gatot Nurmantyo dibingkai telah menyebarkan isu ketakutan akan bangkitnya ideologi komunisme versi terbaru. Tirto.id membingkai bahwa acara pemutaran ulang film G30S tersebut merupakan cara Gatot Nurmantyo untuk “mencuri” panggung dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018. Hal tersebut dapat dilihat melalui kutipan berita Tirto.id berikut.

Setelah isu "Aksi Bela Islam" meredup, dan sempat diisukan bakal diusung sebagai salah satu kandidat dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat pada 2018 mendatang, Gatot kembali mencuri panggung dengan isu "kebangkitan PKI." Ia memprakarsai mobilisasi nonton bareng film *Pengkhianatan G30S PKI*, dan diimbui dengan menyebarkan politik ketakutan mengenai "Komunis Gaya Baru alias KGB." (Lihat lampiran 1)

**Gambar 5**  
**Infografik berita "Cara Gatot Nurmantyo Cari Panggung Sebelum Pensiun"**



Sumber : Tirto.id (2017). Cara Gatot Nurmantyo Cari Panggung Sebelum Pensiun

Selanjutnya cara kedua yang dilakukan oleh Gatot Nurmantyo untuk “mencuri panggung” menurut pembingkai Tirto.id yaitu dengan melakukan “aksi bela Islam”. “Aksi bela Islam” yang dimaksud adalah ketika Gatot Nurmantyo mengunjungi beberapa ulama dan kaum muslim serta mengadakan acara keagamaan di beberapa daerah. Menurut Tirto.id, Gatot Nurmantyo melakukan “Aksi Bela Islam” tersebut mendekati saat ia akan pensiun dari jabatannya sebagai panglima TNI.

Tirto.id juga mengaitkan berita ini dengan laporan Allan Nairn yang sempat dimuat di Tirto.id pada bulan April 2017 dan sempat pula dilaporkan oleh pihak TNI dikarenakan tidak adanya unsur *cover both side*. Terdapat *hyperlink* laporan Allan Nairn pada berita tersebut dengan judul “Investigasi Allan Nairn:



Ahok Hanya Dalih untuk Makar”. Isi laporan tersebut adalah “Aksi bela Islam” pada kasus pencemaran agama yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahya Purnama atau Ahok, yang dimana kegiatan “Aksi Bela Islam” tersebut didukung oleh Jenderal Gatot Nurmantyo. Tirto.id membingkai bahwa “Aksi Bela Islam” yang didukung oleh Gatot Nurmantyo tersebut merupakan suatu usaha untuk menurunkan elektabilitas Ahok di ranah pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Berikut isi kutipan berita Tirto.id mengenai permasalahan tersebut.

Menjelang pensiun dari TNI pada Maret 2018, Jenderal Gatot Nurmantyo gemar jadi sorotan publik. Ia kerap muncul dalam pemberitaan sejak gelombang protes massa di Jakarta dalam apa yang disebut "Aksi Bela Islam" di panggung Pilkada DKI Jakarta demi menggerus popularitas Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama. Gatot sering mendatangi kelompok muslim serta para ulama. (lihat lampiran 1)

“Aksi Bela Islam” lainnya menurut Tirto.id yang dilakukan oleh Gatot Nurmantyo antara lain Istighasah oleh Gatot bersama beberapa ulama di Pangkalan Udara Soewondo Medan, pertemuan dengan ulama di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Safari Ramadhan di Lapangan Apel Yonif Malang, Buka puasa di Tarakan, Mengunjungi Santri di Tasikmalaya, Ceramah kebangsaan di Universitas Ahmad Dahlan, Tausiah Kebangsaan di Semarang. Selain itu, Tirto.id mengaitkan isu “*proxy war*” ke dalam berita tersebut. Terdapat *hyperlink* berita dengan judul “Jenderal Gatot dan Imajinasi Proxy War”. Isi berita tersebut adalah kuliah umum yang disampaikan Gatot Nurmantyo ke beberapa universitas di Indonesia dengan mengangkat isu “*proxy war*”. Dalam berita tentang “*proxy war*” tersebut disebutkan pula bahwa Gatot menilai kasus G30S serta PKI merupakan salah satu bentuk *proxy*.

“Aksi Bela Islam” yang disebutkan oleh Tirto.id di dalam berita tersebut, dinilai oleh Tirto.id sebagai bentuk propaganda yang dilakukan oleh Gatot Nurmantyo terhadap para ulama Indonesia. Propaganda yang dimaksud oleh Tirto.id adalah Gatot Nurmantyo ingin mempengaruhi santri dan ulama Indonesia bahwa kaum muslim di Indonesia merupakan bagian dari pejuang kemerdekaan. Secara implisit, Tirto.id ingin mengkonstruksikan bahwa Gatot Nurmantyo ingin mempengaruhi para santri dan ulama Indonesia untuk ikut berjuang agar merdeka atau terbebas dari penjajahan, dalam kasus ini Komunisme atau PKI dianggap sebagai musuh yang harus diberantas. Kutipan mengenai berita Tirto.id tentang propaganda Gatot Nurmyanto terhadap para ulama dan kaum muslim di Indonesia dapat dilihat melalui gambar 4.2 .

**Gambar 6**

**Infografik berita Berita Polemik Pemutaran Ulang Film G30S**

Cara Gatot Nurmantyo Cari Panggung  
Sebelum Pensiun



Sumber : Tirto.id (2017). Cara Gatot Nurmantyo Cari Panggung Sebelum Pensiun

**Diagnose Cause.** Aktor atau pelaku yang dinilai sebagai penyebab masalah pada berita ini adalah Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai seseorang yang ingin “mencari” panggung di ranah politik sebelum ia pensiun dari jabatannya sebagai Panglima TNI. Hal tersebut dapat dilihat melalui judul berita “Cara Gatot Nurmantyo Cari Panggung Sebelum Pensiun”. Selain itu, foto berita tersebut menunjukkan sosok dari Tokoh Jenderal Gatot Nurmantyo beserta beberapa anggota partai PKS. Sekalipun pada berita tersebut, tidak peneliti temukan keterkaitan antara konteks berita dengan partai PKS.

**Make moral judgement.** Terdapat dua penilaian moral dalam masalah ini. Pertama, sosok Gatot Nurmantyo sebagai panglima TNI yang dibingkai oleh Tirto.id telah menyebarkan ketakutan akan munculnya kembali komunisme di Indonesia. Gatot Nurmantyo dianggap menyebarkan isu bangkitnya lagi komunisme melalui pemutaran ulang G30S serta melalui diskusi umum tentang *proxy war*. Tirto.id membingkai bahwa Gatot Nurmantyo ingin mendapatkan kursi di panggung politik. Terdapat 3 *hyperlink* (Baca Juga) yang Tirto kaitkan dengan berita ini yaitu berita dengan judul “Investigasi Allan Nairn: Ahok Hanya Dalih untuk Makar”, “Jenderal Gatot dan Imajinasi Proxy War” dan “Asal-Usul Jenderal Praetorian”. Berita tersebut membahas dugaan pihak militer Indonesia menyebarkan beberapa isu masalah nasional dengan tujuan agar pihak militer mendapatkan kekuasaan “kembali” di ranah sipil. Secara implisit, Tirto.id ingin membingkai pihak militer, dalam berita ini adalah Jenderal Gatot Nurmantyo dinilai telah melakukan propaganda politik. Sedangkan nilai moral

kedua dalam masalah ini adalah mengenai konteks film G30S yang dinilai tidak cocok ditonton untuk Generasi Milenial.

**Treatment Recommendation.** Solusi yang ditawarkan pada masalah ini adalah adanya pernyataan wawancara dari Presiden Joko Widodo untuk membuat ulang film G30S. Pembuatan ulang film G30S tersebut memiliki tujuan agar film tersebut layak ditonton untuk generasi muda. Hal tersebut dapat dilihat melalui kutipan berita berikut.

Video pertama adalah tanggapan Jokowi tentang pemutaran film G30S dan usulan membuat film versi baru agar cocok dikonsumsi Generasi Milenial dan Generasi Z. (lihat lampiran 1)

#### 4.2.2 Analisis Berita Berjudul “Catatan Sejarahwan Soal Pembuatan Ulang Film G30S/PKI”

**Tabel 7**

##### **5W+1H dalam Berita**

<b>What</b>	Jenderal Gatot Nurmantyo mengadakan pemutaran ulang film G30S di kalangan militer dan masyarakat publik. Presiden Joko Widodo memberikan usulan untuk membuat ulang film tersebut. Sejumlah sejarahwan setuju usulan presiden yang ingin film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI dibuat ulang. Dengan catatan, narasinya berbeda sama sekali dengan yang sudah ada.
<b>How</b>	Membuat ulang film G30S berdasarkan temuan – temuan sejarah baru tanpa memojokkan pihak – pihak tertentu
<b>Who</b>	Jenderal Gatot Nurmantyo dinilai sebagai sosok yang acuh tak acuh terhadap pemutaran ulang film G30S yang dianggap oleh Tirto.id menjadi sebuah polemik di media massa.
<b>Where</b>	Perubahan film G30S dibagian substansinya
<b>When</b>	Menjelang peringatan peristiwa G30S
<b>Why</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dugaan oleh Asvi Adam bahwa pemutaran tersebut memiliki tujuan agar TNI AD mendapatkan kekuasaan kembali pada pemilihan panglima TNI</li> <li>2. Perlunya pembuatan ulang film G30S karena dianggap terlalu memojokkan kelompok tertentu</li> </ol>

Sumber : Data Olahan Peneliti



Secara keseluruhan ringkasan berita ini adalah tentang pendapat beberapa sejarawan yang setuju atas usulan dari presiden Joko Widodo untuk membuat ulang film G30S versi terbaru. Usulan untuk membuat film *remake* G30S bermula setelah Jenderal Gatot Nurmantyo menginstruksikan untuk memutar ulang film G30S tersebut yang menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat.

**Tabel 8**  
**Analisis Framing “Catatan Sejarawan Soal Pembuatan Ulang Film G30S/PKI”**

<i>Define problems</i> (Pendefinisian masalah)	Peneliti utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, menolak atas rencana Panglima TNI yang ingin film G30S/PKI diputar ulang lagi
<i>Diagnose causes</i> (Sumber Masalah)	Jenderal Gatot Nurmantyo merupakan penyebab dari masalah ini yang berawal dari ajakannya untuk menonton ulang film G30S, yang dimana film G30S menyudutkan pihak tertentu.
<i>Make moral judgments</i> (Membuat keputusan moral)	Instruksi menonton ulang film G30S dikaitkan dengan adanya unsur politis, yang dimana berkaitan dengan pergantian kepemimpinan di panglima TNI. Asvi menilai kemungkinan adanya usaha untuk mempertahankan kekuasaan oleh pihak AD yang bersaing melawan pihak AU dalam hal proses pergantian kepemimpinan panglima TNI.
<i>Treatment Recommendation</i> (Solusi yang ditawarkan)	Sejumlah sejarawan setuju usulan presiden yang ingin film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI dibuat ulang. Dengan catatan, narasinya berbeda sama sekali dengan yang sudah ada.

Sumber : Data Olahan Peneliti

**Define problems.** Tirto.id mengidentifikasi pemutaran ulang film G30S yang diinstruksikan oleh Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai suatu polemik atau menjadi perdebatan di media massa beserta di kalangan masyarakat. Ada beberapa penolakan dari masyarakat mengenai instruksi Jenderal Gatot Nurmantyo untuk memutar ulang film tersebut. Pada berita ini, penolakan



ditunjukkan oleh beberapa sejarawan. Selain itu, beberapa kutipan pernyataan dari Gatot Nurmantyo juga menunjukkan bahwa Gatot seolah – olah acuh tak acuh terhadap polemik tersebut. Tirto.id juga mengutip kalimat dari Jenderal Gatot Nurmantyo yang seolah – olah menunjukkan sikap ketidak peduliam. Berikut isi kutipan berita tersebut.

Yang bisa melarang saya hanya pemerintah. Polemik dan ada penentangan dari berbagai pihak itu. (lihat lampiran 2)  
Pemutaran ulang film tersebut menjadi masalah dikarenakan substansi film tersebut dianggap tidak menunjukkan narasi fakta yang seharusnya.

Pada berita ini ada dua bingkai dalam melihat polemik ini. Pertama, masalah ini di bingkai dari sudut sosial budaya. Hal tersebut dikarenakan Tirto.id mempublikasikan berita ini pada rubrik sosial budaya. Selain itu, pemilihan narasumber juga memilih dari beberapa sejarawan Indonesia. Beberapa sejarawan Indonesia memiliki pendapat bahwa film G30S memiliki kesalahan dari segi substansi filmnya. Sumber pertama dari berita ini adalah Doktor Ilmu Sejarah UI, Andi Achdian. Andi Achdian memiliki pendapat bahwa film G30S memiliki substansi yang kurang tepat dikarenakan hanya berisi narasi tunggal sedangkan peristiwa G30S itu sendiri memiliki beberapa narasi dan sudut pandang. Sedangkan sumber kedua dari berita ini adalah Bondan Kanumoyoso, Dosen Departemen Sejarah UI. Ia berpendapat bahwa film G30S yang diputar oleh Jenderal Gatot Nurmantyo terlalu memojokkan pihak Angkatan Udara dan pihak dari PKI.

Selain dibingkai dari sudut pandang sosial budaya, pada bagian akhir, berita ini dibingkai dengan sudut pandang politik. Sama seperti berita

sebelumnya, Tirto.id mengutip lagi pernyataan dari peneliti LIPI, Asvi Warman Adam. Asvi Warman Adam memiliki pendapat bahwa pemutaran ulang film G30S tersebut tidak lepas dari propaganda politik yang dilakukan Gatot Nurmantyo. Asvi berpendapat, pemutaran ulang tersebut merupakan upaya pihak angkatan darat untuk mempertahankan posisinya dalam pergantian kepemimpinan Panglima TNI.

**Diagnose causes.** Penyebab dari polemik ini adalah Jenderal Gatot Nurmantyo selaku seseorang yang menginstruksikan kepada jajaran militer (Babinsa, Koramil dan Kodim) untuk menayangkan ulang film G30S. Pemutaran ulang film tersebut menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan tokoh aktivis dikarenakan film tersebut berhenti ditayangkan pada tahun 1988 dengan mempertimbangkan berbagai alasan. Adanya pemutaran ulang film G30S tersebut menimbulkan pertentangan yang dimana dalam berita ini pertentangan ditunjukkan oleh beberapa sejarawan Indonesia. Pada bagian akhir berita tersebut, Tirto.id membingkai tokoh Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai seseorang yang keras dan acuh tak acuh. Hal tersebut dapat dilihat melalui kutipan berita berikut.

Ia menantang pihak-pihak yang tak sependapat dengan instruksinya. "(Ya), perintah saya, mau apa memangnya," kata Gatot seperti diberitakan Antara. Gatot tak mau peduli dengan polemik yang muncul terkait acara nobar film G30S/PKI. Ia menyatakan hanya pemerintah yang bisa melarang instruksinya. (lihat lampiran 2)

**Make moral judgments.** Penilaian tentang polemik pemutaran ulang film G30S ini dapat dilihat melalui dua sudut pandang yaitu dari sudut pandang tokoh Gatot Nurmantyo selaku penyebab polemik tersebut dan dari sudut pandang substansi film G30S. Dari sudut pandang aktor penyebab masalah, salah satu sumber berita, Asvi Warman Adam menilai tindakan yang dilakukan oleh

Jenderal Gatot Nurmantyo untuk memutar ulang film G30S merupakan tindakan yang kurang tepat dan memiliki kepentingan politik. Asvi menilai bahwa pemutaran ulang film G30S tersebut hanyalah usaha dari pihak militer angkatan darat untuk mendapatkan kedudukan lagi dalam pergantian Panglima TNI. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui kutipan berita berikut.

Tahun depan ada penggantian Panglima TNI. Sekarang AS, jadi kemungkinannya besok AU. Nah apakah tujuannya terkait dengan itu? Ini buat orang bertanya, apa biar tetap AD atau apa? Itu kan dugaan-dugaan yang mungkin. Instruksi untuk menonton film ini jadi sangat politis," kata Asvi. (lihat lampiran 2)

Sedangkan dari segi substansi film, film G30S menurut Asvi memiliki isi cerita yang kurang baik dan memiliki kualitas gambar yang buruk. Asvi menilai bahwa film G30S tersebut terlalu merendahkan tokoh Sukarno. Sedangkan menurut Bondan Kanumoyoso selaku dosen sejarah UI, menilai bahwa film tersebut terlalu memojokkan pihak PKI dan pihak Angkatan Udara. Hal yang sama juga diungkapkan oleh sejarawan Andi Achdian yang menilai film tersebut dapat menghilangkan hak sipil maupun hak politik dari kelompok tertentu. Secara keseluruhan, berita ini memiliki nilai bahwa polemik tersebut hanyalah upaya propaganda politik serta isi dari film G30S itu sendiri juga tidak berimbang yang hanya memojokkan beberapa tokoh saja.

***Treatment Recommendation.*** Rekomendasi atau solusi yang ditawarkan pada berita ini mengenai polemik pemutaran ulang film tersebut adalah usulan dari Presiden Joko Widodo untuk membuat ulang versi terbaru dari film G30S. Beberapa sejarawan selaku sumber dari berita tersebut juga memberikan pendapat agar film tersebut dibuat dengan memperhatikan temuan fakta – fakta baru agar

film tersebut berimbang dan tidak memojokan pihak – pihak tertentu. Menurut Doktor Ilmu Sejarah UI, Andi Achdian, permasalahan mengenai film G30S tersebut tidak hanya dari segi sejarah dari G30S, akan tetapi film tersebut juga memiliki pengaruh atas hilangnya hak sipil dari pihak tertentu. Andi Achdian berpendapat bahwa pembuatan ulang film G30S perlu dilakukan sebagai bentuk rekonsiliasi nasional. Dukungan untuk membuat ulang film G30S tersebut dapat dilihat dari pernyataan Andi melalui kutipan berita berikut.

Problemnya bukan apa itu G30S, tapi ada orang yang terampas hak-haknya. Tujuan film itu untuk kebaikan bersama, rekonsiliasi nasional," kata Andi. (lihat lampiran 2)

#### 4.2.3 Analisis Berita Berjudul “PFN: Perlu Tafsir Ulang Jika Film G30S/PKI Diproduksi Lagi”

**Tabel 9**

**5W+1H dalam Berita**

<b>What</b>	Tanggapan mengenai rencana Presiden Jokowi untuk membuat ulang film G30S. Adanya rencana pembuatan ulang film G30S merupakan akibat adanya pemutaran ulang yang digelar oleh Jenderal Gatot Nurmantyo.
<b>How</b>	Membuat ulang film G30S berdasarkan temuan – temuan baru melalui tafsir sejarah yang melibatkan sejarawan, sineas dan aktivis
<b>Who</b>	Beberapa tanggapan berasal dari sineas Indonesia.
<b>Where</b>	Pembuatan ulang film G30S tidak hanya dari segi teknis tetapi juga dari segi tafsir terhadap cerita
<b>When</b>	Menjelang peringatan peristiwa G30S
<b>Why</b>	Adanya dugaan oleh Totot Indrarto, mantan ketua dewan kesenian Jakarta, yang menduga bahwa pemutaran ulang G30S merupakan usaha pihak militer untuk mengembalikan kekuasannya di ranah masyarakat sipil

Sumber : Data Olahan Peneliti

Secara singkat berita ini membahas tentang pendapat Direktur Perum Produksi Film Negara (PFN), M. Abduh Aziz tentang pernyataan Presiden Joko Widodo untuk membuat ulang film G30S. Abduh Aziz mengatakan bahwa pembuatan ulang film tersebut seharusnya tidak hanya meliputi pembaruan teknis melainkan juga meliputi pembaruan tafsir cerita. Abduh berpendapat perlunya ada tafsir cerita tidak hanya dari pihak pemerintah saja akan tetapi perlu juga mempertimbangkan tafsir cerita dari pihak non pemerintah dari pihak aktivis, sineas dan sejarawan.

**Tabel 10**  
**Analisis *framing* berita “PFN: Perlu Tafsir Ulang Jika Film G30S/PKI**  
**Diproduksi Lagi**

<i>Define problems</i> (Pendefinisian masalah)	Polemik yang terjadi setelah adanya instruksi dari Jenderal Gatot Nurmantyo untuk memutar ulang film G30S. Dikarenakan polemik tersebut presiden Joko Widodo mengusulkan untuk membuat ulang film tersebut yang dimana usulan presiden tersebut ditanggapi beberapa sineas.
<i>Diagnose causes</i> (Sumber Masalah)	Jenderal Gatot Nurmantyo merupakan seseorang yang menyebabkan terjadinya polemik tersebut. Sehingga pemerintah mengusulkan untuk me <i>remake</i> film tersebut.
<i>Make moral judgments</i> (Membuat keputusan moral)	Polemik pemutaran ulang film G30S dianggap Totot Indrarto selaku mantan Ketua Komite Film Dewan Kesenian Jakarta sebagai upaya TNI untuk mengembalikan kekuasaan militer ke dalam peranan di masyarakat publik.
<i>Treatment Recommendation</i> (Solusi yang ditawarkan)	Beberapa sineas memberikan pendapat setelah adanya pernyataan Presiden Jokowi untuk membuat ulang film G30S.

***Define Problems.*** Apa yang menjadi masalah dalam berita ini adalah adanya polemik yang terjadi setelah Jenderal Gatot Nurmantyo menginstruksikan



kepada jajaran militer untuk memutar ulang film G30S. Seperti pada berita sebelumnya, permasalahan dalam berita ini merupakan permasalahan dalam bidang politik. Alasannya dikarenakan Tirto.id memasukkan berita ini ke dalam rubrik politik. Akan tetapi berbeda dengan berita – berita sebelumnya, Tirto.id mengambil narasumber dari sudut pandang seorang senias. Narasumber tersebut memiliki pendapat tentang usulan presiden Joko Widodo untuk membuat ulang film G30S.

Narasumber yang pertama adalah M. Abduh Aziz selaku Direktur Perum Produksi Film Negara (PFN). Abduh Aziz berpendapat bahwa film G30S perlu dibuat versi terbaru yang dimana tidak hanya merubah secara teknik saja akan tetapi perlu juga adanya perubahan tafsir dari isi film tersebut. Abduh menilai perlunya keterlibatan penafsiran oleh aktivis, sejarawan serta sineas. Sedangkan narasumber kedua memiliki perbedaan pendapat. Mantan Ketua Komite Film Dewan Kesenian Jakarta, Totot Indrarto sebagai narasumber kedua memiliki pendapat jika pembuatan ulang film G30S apabila merubah isi maka hal tersebut bukanlah bagian dari *remake* film melainkan membuat film baru. Hanung Bramantyo sebagai salah satu sineas Indonesia juga menjadi narasumber dalam berita tersebut. Hanung Bramantyo mengungkapkan bahwa dalam membuat film akan selalu ada keberpihakan dari si pembuat film itu sendiri.

Beberapa sineas tersebut berpendapat bahwa pembuatan ulang film G30S tidak hanya merubah secara teknis saja akan tetapi juga perlunya tafsir sejarah menurut sineas, sejarawan dan para aktivis. Hanung Bramantyo juga menyebutkan *angle* yang berbeda akan merubah durasi film sehingga pemerintah

perlu untuk mempertimbangkan tersebut. Polemik akan kasus ini terjadi ketika adanya instruksi dari Jenderal Gatot Nurmantyo untuk memutar ulang film tersebut menjelang hari peringatan G30S. Dari polemik tersebutlah, Presiden Joko Widodo mengusulkan untuk membuat ulang film Penghianatan G30S tersebut.

**Diagnose causes.** Seperti pada berita sebelumnya, Tirto.id menonjolkan kembali tokoh Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai penyebab dari permasalahan berita tersebut. Penonjolan tersebut dapat dilihat melalui pernyataan Jenderal Gatot Nurmantyo mengenai hasil wawancaranya mengenai polemik yang terjadi akibat ia menginstruksikan untuk menonton kembali film G30S. Dalam hasil wawancaranya, Gatot Nurmantyo seolah tidak peduli dengan polemik yang terjadi akibat adanya ajakan dari dirinya untuk menonton ulang film G30S. Pada bagian akhir dari berita tersebut, Tirto.id mengutip kembali pernyataan Gatot Nurmantyo yang seolah tidak peduli dengan polemik tersebut. Berikut hasil kutipan beritanya.

Gatot tak mau peduli dengan polemik yang muncul terkait acara nobar film G30S/PKI. Ia menyatakan hanya pemerintah yang bisa melarang instruksinya. “Yang bisa melarang saya hanya pemerintah. Polemik dan ada penentangan dari berbagai pihak itu, ‘memangnya gue pikirin’,” ujarnya. (lihat lampiran 3)

**Make moral judgments.** Penilaian moral dalam berita ini adalah penilaian yang mengarah kepada Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai dari sumber permasalahan berita. Penilaian terhadap Gatot Nurmantyo mengarah kepada adanya propaganda politik yang dilakukannya. Dalam hasil wawancara dari Totot Indarto selaku mantan Ketua Komite Film Dewan Kesenian Jakarta, ia berpendapat bahwa ajakan menonton bersama film G30S yang diinstruksikan oleh Jenderal Gatot Nurmantyo merupakan usaha politik dari pihak TNI untuk

mengembalikan lagi kekuatan militer ke dalam kehidupan masyarakat publik seperti yang sudah dijalankan pada masa jaman Orde Baru. Ia juga berpendapat bahwa ajakan menonton bersama film G30S tersebut merupakan murni ingin mengembalikan kekuatan militer di kalangan masyarakat. Totot juga berpendapat bahwa hal tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan komunisme. Berbeda dengan berita sebelumnya bahwa pemutaran ulang film G30S tersebut memiliki tujuan untuk menyebarkan ketakutan akan hadirnya komunisme di Indonesia. Berikut kutipan berita mengenai pernyataan Totot Indarto mengenai polemik tersebut.

Di [era] Reformasi, kan, tentara dilemahkan. Dia [tentara] ingin memperkuat lagi perannya melalui film itu. Jadi bukan ke komunisnya [agar masyarakat anti terhadap PKI dan komunisme],” katanya. (lihat lampiran 3)

Selain itu nilai atas permasalahan kasus ini juga tidak hanya dilihat dari siapa aktornya akan tetapi juga dapat ditemukan dalam apa objek permasalahannya yaitu isi dari film G30S. Isi dari film G30S itu sendiri menurut narasumber M. Abduh Aziz salah apabila pembuatan film dan wacana tentang kasus tersebut hanya diproduksi oleh Negara saja. M. Abduh Aziz berpendapat bahwa perlunya ada tafsiran sejarah dari luar pemerintah seperti sineas, aktivis dan para sejarawan untuk melihat peristiwa G30S. Lebih lanjut ia berpendapat bahwa apabila tafsiran sejarah berlangsung secara dialektis antara pihak pemerintah dan non pemerintah maka hal tersebut akan menguntungkan masyarakat. Berikut kutipan berita dari pernyataan M. Abduh Aziz.

Ketika kedua belah pihak saling beradu wacana soal narasi tertentu, maka yang sebenarnya diuntungkan adalah publik. Publik bisa menilai siapa yang benar, dan siapa yang salah,” katanya.

***Treatment Recommendation.*** Solusi dari permasalahan polemik pemutaran film G30S adalah usulan dari Presiden Joko Widodo untuk membuat ulang film G30S tersebut. Presiden Joko Widodo mengusulkan agar film G30S dibuat versi terbaru yang dimana agar generasi muda bisa menangkap apa pesan yang ingin disampaikan oleh sejarah dari peristiwa tersebut. Tidak hanya usulan dari Presiden Joko Widodo saja, akan tetapi permasalahan dalam berita ini juga memiliki solusi dari masing – masing narasumber. Solusi yang ditawarkan menurut M. Abduh Aziz adalah pembuatan ulang film tersebut harus memiliki tafsir ulang dengan mempertimbangkan fakta – fakta baru yang sudah ditemukan. Ia juga berpendapat bahwa tafsir ulang atas peristiwa G30S tidak hanya berasal dari pihak pemerintah saja akan tetapi juga harus melibatkan pihak di luar pemerintah seperti aktivis, sejarawan juga para sineas. Sedangkan menurut Hanung Bramantyo, keberpihakan pembuat film dalam melihat suatu peristiwa merupakan suatu hal yang wajar. Hanung berpendapat bahwa pembuat film harus memilih *angle* yang tepat untuk disajikan dengan penonton selanjutnya *angle* tersebut harus di riset dengan keadaan lapangan. Pembuatan ulang film tersebut nantinya tidak bisa menampung segala cerita beserta sudut pandangnya dikarenakan film akan dibatasi durasi.

#### 4.2.4 Analisis Berita Berjudul “Pembuatan Ulang Film G30S/PKI Harus Ungkap Fakta Sejarah”

**Tabel 11**  
**5W+1H dalam Berita**

<b>What</b>	Pandangan Tatiana Lukman, anak dari Wakil Ketua PKI tentang pernyataan Joko Widodo untuk membuat ulang film G30S
<b>How</b>	Pembuatan ulang film tersebut harus sesuai sejarah seperti PKI bukanlah satu satunya pelaku tunggal akan tetapi pihak militer juga terlibat dan keaslian dari Supersemar
<b>Who</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapat dari pihak keluarga PKI.</li> <li>- Gatot Nurmantyo selaku penginstruksi untuk memutar ulang film tersebut</li> </ul>
<b>Where</b>	Pembuatan ulang film tersebut dilihat dari konteksnya.
<b>When</b>	Mendekati peringatan G30S dan setelah adanya usulan dari Joko Widodo untuk membuat ulang film tersebut
<b>Why</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Film G30S tidak sesuai sejarah</li> <li>- Gatot ingin mengalihkan isu masalah nasional dengan membuat isu lahirnya kembali komunisme</li> </ul>

Sumber : Data Olahan Peneliti

Secara keseluruhan berita ini menjelaskan tentang seperti apa sudut pandang Tatiana Lukman selaku anak kandung dari Wakil Ketua CC PKI dalam hal menanggapi tentang polemik pemutaran ulang film G30S beserta usulan presiden Joko Widodo untuk membuat ulang film G30S.

**Tabel 12**  
**Analisis Framing berita “Pembuatan Ulang Film G30S/PKI Harus Ungkap Fakta Sejarah”**

<i>Define problems</i> (Pendefinisian masalah)	Adanya tanggapan dari pihak keluarga anggota PKI tentang usulan Presiden Joko Widodo untuk membuat ulang film G30S. Usulan dari presiden tersebut merupakan tanggapan atas polemik pemutaran ulang G30S yang dilaksanakan oleh Jenderal Gatot Nurmantyo
<i>Diagnose causes</i> (Sumber Masalah)	Jenderal Gatot Nurmantyo merupakan seseorang yang menyebabkan terjadinya polemik setelah ia mengadakan pemutaran ulang film G30S. Dikarenakan hal tersebut,



	muncullah suatu usulan untuk membuat ulang film tersebut.
<i>Make moral judgments</i> (Membuat keputusan moral)	Tatiana Lukman, anak kandung dari , Wakil Ketua CC PKI MH Lukman, berpendapat bahwa pihak militer ingin melakukan satanisasi terhadap tokoh PKI untuk mengalihkan perhatian massa rakyat dari permasalahan nasional.
<i>Treatment Recommendation</i> (Solusi yang ditawarkan)	Tatiana Lukman menanggapi usulan dari presiden Jokowi untuk me <i>remake</i> film G30S. Menurutnya pemerintah harus mengakui tentang fakta – fakta yang sudah ditemukan oleh sejarawan dibalik sejarah peristiwa G30S

**Define Problems.** Apa yang menjadi masalah dalam berita ini adalah sama seperti berita – berita sebelumnya yaitu munculnya sebuah polemik ketika Jenderal Panglima TNI Gatot Nurmantyo menginstruksikan jajarannya untuk memutar ulang film G30S. Pernyataan dari Jenderal Gatot Nurmantyo tersebut ditanggapi oleh presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo berpendapat bahwa film G30S perlu dibuat versi baru agar bisa dikonsumsi untuk generasi milenial. Permasalahan dalam berita ini dibingkai menjadi permasalahan sosial budaya. Hal tersebut dikarenakan Tirto.id memasukkan berita ini ke dalam rubrik sosial budaya. Narasumber berita merupakan salah satu anak kandung dari pihak PKI yaitu Tatiana Lukman, anak kandung MH Lukman, Wakil Ketua CC PKI,

Tatiana Lukman berpendapat bahwa sejarawan melihat adanya temuan – temuan baru dari peristiwa G30S sehingga film yang diputar ulang oleh Jenderal Gatot Nurmantyo kurang menggambarkan kondisi sebenarnya dari peristiwa tersebut. Tatiana berpendapat bahwa film G30S yang diputar Jenderal Gatot Nurmantyo tidak relevan dengan sejarah yang sebenarnya. Tatiana beranggapan pemerintah perlu terbuka terhadap temuan – temuan baru dari fakta sejarah

peristiwa G30S. Berikut kutipan berita yang menyatakan tanggapan Tatiana dalam melihat polemik tersebut.

(Bersediakah pemerintah mengakui bahwa) Supersemar bukanlah pelimpahan kekuasaan Bung Karno kepada Suharto, bahwa Bung Karno tidak pernah menyetujui pembubaran PKI, dan masih banyak lagi. Inilah pernyataan yang harus dijawab lebih dulu oleh Jokowi sebelum bikin film baru yang sesuai dengan konteks kekinian," Tatiana menambahkan. (lihat lampiran 4)

Selain itu Tatiana beranggapan bahwa ajakan menonton bersama yang diinstruksikan oleh Jenderal Gatot Nurmantyo hanyalah upaya militer untuk mengalihkan isu dari permasalahan nasional. Tatiana menilai bahwa pihak – pihak tertentu ingin mengalihkan isu korupsi, isu pengangguran serta isu nasional lainnya dengan mengkambinghitamkan pihak PKI. Tatiana beranggapan bahwa pihak tersebut dalam hal ini pihak militer (Jenderal Gatot Nurmantyo) ingin menyebarkan jika PKI masih menjadi sesuatu yang menakutkan dan perlu untuk diingat kembali. Berikut kutipan berita tentang pernyataan Tatiana tersebut.

Tatiana menilai, pihak-pihak yang terus menerus menghidupkan momok PKI berkepentingan untuk mengalihkan massa dari permasalahan konkret yang mereka hadapi sehari-hari. Seperti semakin meningkatnya harga kebutuhan hidup, upah yang rendah, pengangguran, penyempitan lahan, hingga korupsi. Satanisasi PKI dibutuhkan untuk mengalihkan perhatian massa rakyat. (Lihat lampiran 4)

Sedangkan narasumber kedua, Asvi Warman Adam, salah seorang sejarawan beranggapan bahwa polemik pemutaran ulang film G30S yang diinstruksikan oleh Jenderal Gatot Nurmantyo merupakan masalah politik. Asvi mengatakan bahwa pihak TNI angkatan darat (Gatot Nurmantyo) ingin mencuri perhatian publik menjelang akan dilaksanakannya pergantian Panglima TNI. Asvi berpendapat bahwa pihak TNI angkatan darat juga ingin menjatuhkan pihak

angkatan udara. Berikut kutipan berita yang menggambarkan pendapat asvi tentang polemik tersebut.

Tahun depan ada penggantian Panglima TNI. Sekarang AD, jadi kemungkinannya besok AU. Nah apakah tujuannya terkait dengan itu? Ini buat orang bertanya, apa biar tetap AD atau apa? Itu kan dugaan-dugaan yang mungkin. Instruksi untuk menonton film ini jadi sangat politis," kata Asvi. (lihat lampiran 4)

**Diagnose Causes.** Aktor dari permasalahan pada berita ini adalah Jenderal Gatot Nurmantyo. Jenderal Gatot Nurmantyo merupakan aktor yang menjadi penyebab polemik tentang pemutaran ulang film G30S. Hal tersebut dapat dilihat pada bagian akhir berita, dimana Tirto.id memuat lagi pernyataan Gatot Nurmantyo terkait wawancaranya mengenai polemik tersebut. Dari beberapa kalimat berita tentang Gatot Nurmantyo, Tirto.id membingkai bahwa sosok Jenderal Gatot Nurmantyo merupakan sosok seorang yang arogan dan bersifat acuh tak acuh terhadap masalah publik yang berhubungan dengan dirinya tersebut. Berikut kutipan berita yang menggambarkan Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai aktor dari permasalahan tersebut.

Usulan presiden agar film G30S/PKI dibuat ulang berawal dari instruksi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo kepada Kodim, Koramil, sampai Babinsa, agar film tersebut ditonton bersama. Gatot tidak ambil pusing dengan polemik yang muncul terkait acara nobar film G30S/PKI. Ia menyatakan hanya pemerintah yang bisa melarang instruksinya. "Yang bisa melarang saya hanya pemerintah. Polemik dan ada penentangan dari berbagai pihak itu, 'memangnya gue pikirin'," ujarnya (lihat lampiran 4)

Pembingkaiian sosok Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai sumber dari permasalahan tersebut juga dapat dilihat dari pendapat narasumber Asvi Warman Adam. Asvi menilai adanya usulan dari presiden Joko Widodo untuk membuat ulang film G30S merupakan akibat dari ajakan Gatot Nurmantyo untuk menonton

ulang film tersebut. Asvi juga menilai polemik pemutaran ulang film G30S tersebut tidak lain merupakan usaha dari Gatot Nurmantyo untuk mendapatkan perhatian publik dikarenakan sebentar lagi ia akan lengser dari jabatannya sebagai panglima TNI. Berikut kutipan berita dari pernyataan Asvi yang menggambarkan Gatot Nurmantyo sebagai aktor dari permasalahan berita ini.

Asvi menginterpretasikan usulan Jokowi tersebut sebagai penolakan tidak langsung atas instruksi Panglima TNI yang ingin film G30S/PKI diputar ulang lagi. Asvi juga mengaitkan ini dengan penggantian Gatot Nurmantyo yang direncanakan tahun depan. Tahun depan ada penggantian Panglima TNI. Sekarang AD, jadi kemungkinannya besok AU. Nah apakah tujuannya terkait dengan itu? Ini buat orang bertanya, apa biar tetap AD atau apa? Itu kan dugaan-dugaan yang mungkin. Instruksi untuk menonton film ini jadi sangat politis," kata Asvi. (lihat lampiran 4)

***Make moral judgments.*** Penilaian moral terhadap masalah ini ditujukan kepada Jenderal Gatot Nurmantyo selaku dari aktor permasalahan tersebut. Salah satu narasumber Tatiana Lukman berpendapat bahwa pihak militer (Jenderal Gatot Nurmantyo) ingin menjadikan pihak PKI sebagai sesuatu yang menakutkan bagi masyarakat Indonesia. Tatiana juga mengungkapkan bahwa polemik pemutaran ulang film G30S hanyalah sebuah pengalihan isu dari isu nasional lainnya yang lebih penting seperti isu korupsi, isu pengangguran dan beberapa isu nasional lainnya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh narasumber kedua, Asvi Warman Adam. Asvi berpendapat bahwa polemik pemutaran ulang film G30S tersebut hanyalah akal – akalan dari pihak TNI Angkatan darat (Jenderal Gatot Nurmantyo) untuk mencuri perhatian masyarakat menjelang akan dilengserkannya dirinya dari jabatannya sebagai Panglima TNI. Asvi juga berpendapat bahwa pemutaran ulang film G30S tersebut menyudutkan beberapa



pihak antara lain pihak Soekarno serta pihak AU yang memiliki kemungkinan adanya persaingan dengan Angkatan Darat menjelang akan dilaksanakannya pergantian panglima TNI. Film G30S berhenti ditayangkan dengan mempertimbangkan berbagai alasan salah satunya adalah film tersebut terlalu mengunggulkan pihak Angkatan Darat sebagai sosok pahlawan dan terlalu memojokkan pihak Angkatan Udara yang dinilai ikut terlibat dalam gerakan PKI. Berikut kutipan berita tentang pernyataan Asvi mengenai penilaian moral terhadap tokoh Jenderal Gatot Nurmantyo.

Film itu bertujuan untuk mengangkat kepahlawanan Suharto, tapi di sisi lain untuk merendahkan Sukarno...Tahun depan ada penggantian Panglima TNI. Sekarang AD, jadi kemungkinannya besok AU. Nah apakah tujuannya terkait dengan itu? Ini buat orang bertanya, apa biar tetap AD atau apa? Itu kan dugaan-dugaan yang mungkin. Instruksi untuk menonton film ini jadi sangat politis (lihat lampiran 4)

***Treatment Recommendations.*** Rekomendasi untuk permasalahan ini adalah usulan dari Presiden Joko Widodo untuk membuat ulang film G30S. Tatiana menilai bahwa pihak pemerintah harus mengakui beberapa fakta yang sudah ditemukan oleh para sejarawan kritis terhadap peristiwa G30S. Tatiana menilai bahwa pembuatan ulang film G30S versi terbaru tersebut harus mengungkapkan sejarah yang sebenarnya. Tatiana juga berpendapat bahwa pengungkapan sejarah peristiwa G30S tidak akan merubah nasib dari orang – orang yang selamat dari peristiwa tersebut. Tatiana menilai bahwa Presiden Joko Widodo perlu menimbangkan lagi mengenai pembuatan ulang film tersebut yang dimana film G30S versi terbaru akan relevan bila sudah sesuai dengan fakta sejarah yang ada. Fakta – fakta yang dimaksud adalah seperti tidak adanya penyiksaan kepada 6 jenderal, bahwa PKI bukanlah aktor dari peristiwa G30S



tersebut, bahwa tidak adanya tarian yang dilakukan oleh Gerwani serta dengan fakta tentang Supersemar.

Pendapat mengenai rekomendasi permasalahan polemik pemutaran ulang film G30S menurut Tatiana selaku narasumber dapat ditemukan melalui kutipan berita berikut ini.

Bersediakah pemerintah mengakui bahwa enam jenderal dan seorang kapten itu tidak disiksa atau disayat kemaluannya oleh anggota Gerwani, bahwa yang membunuh mereka bukan PKI, melainkan bagian dari tentara juga, bahwa tarian orgie oleh Gerwani di Lubang Buaya hanyalah khayalan? Bersediakah pemerintah mengakui bahwa Supersemar bukanlah pelimpahan kekuasaan Bung Karno kepada Suharto, bahwa Bung Karno tidak pernah menyetujui pembubaran PKI, dan masih banyak lagi. (lihat lampiran 4)

Selanjutnya rekomendasi dari permasalahan ini juga ditemukan melalui pernyataan narasumber kedua, Asvi Warman Adam. Asvi menilai perlunya ada pembuatan ulang film G30S tersebut dengan mempertimbangkan dua hal yaitu dikarenakan kualitas film yang tidak bagus serta isi dari cerita peristiwa G30S. Asvi menilai bahwa film tersebut terlalu memojokkan Presiden Soekarno. Dan terlihat bahwa Asvi ingin film G30S versi terbaru nantinya bisa memperbaiki isi dari sejarah G30S agar tidak adanya pemojokkan pihak – pihak tertentu. Rekomendasi dari Asvi ini dapat dilihat melalui kutipan berita sebagai berikut.

Film itu bertujuan untuk mengangkat kepahlawanan Suharto, tapi di sisi lain untuk merendahkan Sukarno. Film itu untuk memperlihatkan bahwa Sukarno dekat, bisa diatur, dan membela PKI. Padahal kan tidak demikian," kata Asvi. Asvi menginterpretasikan usulan Jokowi tersebut sebagai penolakan tidak langsung atas instruksi Panglima TNI yang ingin film G30S/PKI diputar ulang lagi. (lihat lampiran 4)

#### 4.2.5 Analisis Berita Berjudul “Film 'G30S' yang dianggap Narasi Sejarah oleh TNI & Sekolah”

**Tabel 13**

**5W+1H dalam Berita**

<b>What</b>	Pemutaran Ulang Film penghinatan G30S yang disosialisasikan oleh Jenderal Gatot Nurmantyo ke kalangan militer dan masyarakat umum serta sosialisasi dari beberapa dinas pendidikan daerah untuk memutar ulang film G30S di beberapa sekolah. Akan tetapi Menteri pendidikan menilai bahwa film tersebut memuat adegan kekerasan sehingga tidak cocok ditayangkan untuk anak - anak
<b>How</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memutar ulang film tersebut dalam acara nobar yang diselenggarakan di Taman Cijantung, Jakarta Timur.</li> <li>- Memutar ulang film tersebut di beberapa sekolah SMP dan SMA</li> </ul>
<b>Who</b>	Instruksi dari Jenderal Gatot Nurmantyo dan arahan dari Dinas Pendidikan Daerah
<b>Where</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nobar di Mall Cijantung, Jakarta Timur</li> <li>- Pemutaran film tersebut di sekolah - sekolah</li> </ul>
<b>When</b>	20 September 2017
<b>Why</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Film tersebut menurut pihak militer adalah bagian dari pembelajaran sejarah</li> </ul>

Sumber : Data Olahan Peneliti

Secara keseluruhan berita ini menjelaskan tentang Jenderal Gatot Nurmantyo yang menginstruksikan kepada seluruh jajaran militer mulai dari tingkat Komando Rayon Militer, Komando Resort Militer , Komando Daerah Militer dan Komando Distrik Militer pada tanggal 20 September 2017. Tidak hanya di kalangan militer saja, akan tetapi film tersebut juga sudah diputar di berbagai daerah termasuk di kalangan masyarakat maupun di sekolah – sekolah antara lain di daerah Padang, Mojokerto, Tebing Tinggi dan Jambi.

**Tabel 14**

**Analisis Framing “Film 'G30S' yang dianggap Narasi Sejarah oleh TNI & Sekolah”**

<i>Define problems</i> (Pendefinisian masalah)	Jenderal Gatot Nurmantyo dan surat edaran dinas pendidikan di daerah memobilisasi warga menonton film seram Orde Baru, Pengkhianatan G30S
<i>Diagnose causes</i> (Sumber Masalah)	Jenderal Gatot Nurmantyo merupakan seseorang yang menginisiasi masyarakat untuk memutar kembali film tersebut. Serta Dinas Pendidikan Daerah yang juga memutar ulang film tersebut ke beberapa daerah.
<i>Make moral judgments</i> (Membuat keputusan moral)	Film yang di sana-sini memuat adegan kekerasan tidak cocok ditonton bagi anak-anak.
<i>Treatment Recommendation</i> (Solusi yang ditawarkan).	Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan akan menegur sekolah yang menayangkan film tersebut, yang memang tidak cocok ditonton bagi anak-anak karena memuat adegan seram.

Sumber : Data diolah penulis

**Define problems.** Permasalahan pada berita ini merupakan permasalahan yang dibingkai dari sudut pandang politik. Hal itu dapat dibuktikan melalui penempatan rubrik berita ini yang ditempatkan pada rubrik politik. Masalah pada berita ini adalah sebuah instruksi dari Jenderal Gatot Nurmantyo untuk melakukan pemutaran film Pengkhianatan G30S kepada jajarannya mulai dari tingkat Komando Rayon Militer, Komando Resort Militer , Komando Daerah Militer dan Komando Distrik Militer pada tanggal 20 September 2017. Pemutaran ulang tersebut dilaksanakan di Taman Cijantung, Jakarta Timur. Instruksinya tersebut tidak hanya dijalankan di kalangan militer saja, akan tetapi juga diikuti oleh Kopassus yang mengadakan pemutaran tersebut bersama keluarga dan masyarakat di sekitar. Beberapa Dinas Pendidikan daerah juga ikut mengadakan pemutaran film tersebut seperti Dinas Pendidikan Padang, Mojokerto, Jambi serta Dinas

Pendidikan Tebing Tinggi. Tirto.id juga mengadakan riset tentang pemutaran ulang film G30S tersebut yang disajikan dalam bentuk infografik.

**Gambar 7**

**Infografik berita “Film 'G30S' yang dianggap Narasi Sejarah oleh TNI & Sekolah”**



Sumber : Tirto.id (2017). Film 'G30S' yang dianggap Narasi Sejarah oleh TNI & Sekolah

Dalam gambar infografik tersebut, Tirto.id menyebutkan bahwa Dinas Pendidikan Daerah mengajak beberapa sekolah untuk menonton film “seram anti-PKI” . Dari diksi tersebut, Tirto.id membingkai bahwa film penghianatan G30S merupakan film seram atau suatu film yang menakutkan untuk ditonton. Hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa Tirto.id tidak setuju dengan pemutaran tersebut mengingat pemutaran tersebut juga ditonton oleh anak – anak sekolah. Dari hasil riset Tirto.id, ditunjukkan juga bahwa penonton film tersebut adalah anak – anak SD dan SMP.

Tidak hanya melalui gambar infografik itu saja, ada beberapa diksi dari berita Tirto.id yang menunjukkan *feedback* negatif atau ketidaksetujuan atas pemutaran ulang film G30S. Seperti kalimat terakhir pada paragraf 6 berita tersebut, Tirto.id menyebutkan :

Sejak Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menginstruksikan para serdadu buat memutar kembali film tersebut, 20 September lalu, seluruh jajaran militer manut belaka.” (lihat lampiran 5)

Diksi “*manut belaka*” dapat diartikan sebagai seseorang yang cenderung terlalu mematuhi perintah baik perintah itu baik maupun buruk. Dalam hal ini bawahan Panglima Jenderal Gatot Nurmantyo dibingkai seolah – olah terlalu menuruti perintah atasannya tersebut tanpa adanya protes. Selanjutnya pada paragraf 11, Tirto.id menyebutkan,

Pada prinsipnya, banyak generasi muda yang tidak tahu tentang sejarah,” dalih Joko, yang meyakini film G30S sebagai narasi sejarah, alih-alih narasi propaganda. (lihat lampiran 5)

Menanggapi pernyataan dari Joko Trihadimantoyo selaku Kepala Penerangan Koppasus, Tirto.id memiliki pendapat berbeda tentang film G30S yang disebut sebagai narasi propaganda. Ada perbandingan dimana Joko Trihadimantoyo menilai film tersebut sebagai narasi sejarah sedangkan Tirto.id menilai film tersebut merupakan sebuah propaganda. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Tirto.id membingkai pemutaran film Penghianatan G30S sebagai sumber atau apa yang menjadi masalah.

**Diagnose causes.** Pemutaran ulang film G30S menjadi polemik dan menjadi sumber dari masalah pada berita ini. Sedangkan penyebab dari masalah ini adalah Jenderal Gatut Nurmantyo selaku panglima TNI yang mensosialisasikan



kepada jajaran militer dan masyarakat untuk menonton film tersebut pada tanggal 25 - 30 September 2017. Berikut kutipan kalimat pembuka dari berita ini.

Instruksi terpusat Jenderal Gatot Nurmantyo dan surat edaran dinas pendidikan di daerah memobilisasi warga menonton film seram Orde Baru. (lihat lampiran 5)

Kalimat pembuka dalam berita tersebut memberikan gambaran bahwa Jenderal Gatot Nurmantyo mengajak warga untuk menonton film yang dianggap seram oleh Tirto.id. Instruksi pemutaran tersebut dimulai pada tanggal 20 September 2017, yang dimana Kopassus selaku bawahan Jenderal Gatot Nurmantyo melakukan pemutaran sepanjang tanggal 20-30 September 2017.

Tidak hanya dari jajaran militer saja, pemutaran ulang film tersebut juga dilakukan di berbagai sekolah oleh arahan dinas pendidikan setempat. Seperti di sekolah SD dan SMP di Padang yang mewajibkan adanya pemutaran ulang film tersebut. Sedangkan di Kota Jambi, sekolah SD memiliki jadwal untuk pemutaran film tersebut. Dan Dinas Pendidikan cabang kota Mojokerto juga melakukan perintah serupa kepada sekolah SMA maupun SMK untuk menggelar acara menonton bersama film Penghianatan G30S. Tirto.id menganggap bahwa dinas pendidikan menggelar pemutaran film tersebut merupakan akibat adanya ajakan TNI untuk mengadakan nobar dengan alasan bahwa film tersebut merupakan bagian dari sejarah. Seperti pada kutipan berita di bawah ini.

Alasan penayangannya *idem ditto* dari alasan TNI menggelar nobar di ruang-ruang publik: film itu memuat sejarah dan berguna bagi generasi muda. (lihat lampiran 5)

Dari kutipan berita tersebut, dapat dilihat bahwa Tirto.id membingkai TNI sebagai aktor dari masalah tersebut sehingga beberapa Dinas Pendidikan daerah juga ikut melaksanakan pemutaran ulang film G30S.

Terdapat sub judul pada berita tersebut yang berisi “Menjalankan Sesuai Komando”. Berita pada kolom tersebut menjelaskan bahwa polemik pemutaran ulang film tersebut berawal dari Jenderal Gatot Nurmantyo yang menginstruksikan kepada seluruh jajaran militer untuk mengadakan acara menonton bersama film Penghianatan G30S. Film tersebut disebarluaskan melalui cakram padat yang didistribusikan oleh Dinas Penerangan TNI AD. Terdapat pemingkaan yang dilakukan oleh Tirto.id bahwa aktor atau penyebab adanya pemutaran ulang film yang dianggap seram oleh Tirto.id tersebut adalah akibat dari Jenderal Gatot Nurmantyo. Seperti yang ditunjukkan melalui kutipan berita di bawah ini.

Ia cerita, sejak ada instruksi dari Jenderal Gatot Nurmantyo, ia mengarahkan jajaran dari Kodim hingga Koramil untuk menyosialisasikan pemutaran film termasuk menggandeng “tokoh masyarakat.” (lihat lampiran 5)

***Make Moral Judgement.*** Beberapa diksi dalam berita ini menggambarkan bahwa film penghianatan G30S yang menjadi objek pemutaran ulang tersebut merupakan film seram yang tidak cocok untuk ditayangkan khususnya pada anak – anak. Seperti pada kutipan berita di bawah ini.

Film yang di sana-sini memuat adegan kekerasan itu memang jadi tontonan wajib bagi siswa-siswi di sekolah selama 14 tahun kekuasaan terakhir Orde Baru. Usai Soeharto lengser, film ini dilarang untuk ditayangkan kembali. (lihat lampiran 5)

Tirto.id menggambarkan bahwa film Penghianatan G30S merupakan film yang dipenuhi dengan adegan kekerasan. Disisi lain tirto.id seolah – olah mengkritisi pemerintahan jaman Orde Lama yang dimana pada jaman tersebut film yang dipenuhi adegan kekerasan itu menjadi sesuatu yang wajib untuk dipelajari oleh anak – anak sekolah sebagai narasi sejarah. Selain itu

pada paragraf 11, Tirto.id menggambarkan bahwa film Penghianatan G30S merupakan sebuah usaha propaganda.

***Treatment Recommendation.*** Solusi yang ditawarkan pada masalah ini adalah tanggapan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, untuk memberhentikan acara penayangan film G30S. Solusi tersebut dapat dilihat melalui kutipan berita berikut.

Rencana pemutaran bagi para siswa ini direspons oleh Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Muhadjir akan menegur sekolah yang menayangkan film tersebut, yang memang tidak cocok ditonton bagi anak-anak karena memuat adegan seram. (lihat lampiran 5)

Pemutaran ulang film G30S tersebut memiliki dua sudut pandang yang berbeda dari beberapa pihak. Pihak militer menganggap bahwa film G30S merupakan suatu narasi sejarah yang perlu untuk ditunjukkan pada masyarakat sebagai pembelajaran tentang kejamnya Partai Komunis Indonesia pada masa lalu. Serupa dengan pihak militer, beberapa dinas pendidikan cabang di beberapa daerah juga melakukan acara menonton bersama film Penghianatan G30S sebagai bahan pembelajaran sejarah untuk siswa dan siswi. Sedangkan hal yang berbeda diungkapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, yang menganggap bahwa film tersebut mengandung banyak unsur kekerasan yang tidak cocok dipertunjukkan untuk anak – anak. Solusi yang ditawarkan pada masalah ini adalah pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menegur sekolah – sekolah yang menayangkan film tersebut karena dinilai terlalu banyak adegan kekerasan.

#### 4.2.6 Analisis Berita Berjudul “TNI Dinilai Tak Sejalan dengan Jokowi

##### Soal Rekonsiliasi 65”

**Tabel 15**

##### **5W+1H dalam Berita**

<b>What</b>	Pemutaran Ulang Film penghianatan G30S yang diinstruksikan oleh Jenderal Gatot Nurmantyo dianggap dapat merusak rencana rekonsiliasi 1965 yang merupakan janji dari Presiden Joko Widodo. Gatot sebagai panglima TNI dinilai melakukan pemberontakan terhadap Presiden Joko Widodo
<b>How</b>	Pemutaran ulang film G30S tersebut dapat mengancam keberadaan seseorang yang diduga memiliki aliran komunis sehingga pemutaran film tersebut dianggap tidak sesuai dengan tujuan rekonsiliasi
<b>Who</b>	Jenderal Gatot Nurmantyo merupakan tokoh yang mengadakan pemutaran ulang tersebut
<b>Where</b>	Jakarta
<b>When</b>	Menjelang peringatan G30S, bulan September 2017
<b>Why</b>	Adanya pendapat dari aktivis yang menganggap bahwa Jenderal Gatot Nurmantyo tidak mendukung rencana rekonsiliasi 165

Sumber : Data Olahan Peneliti

Secara keseluruhan berita ini membahas tentang pendapat Erasmus Napitupulu, peneliti dari ICJR (Institute Criminal and Justice Reform) mengenai polemik pemutaran ulang G30S yang diinstruksikan oleh panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Erasmus berpendapat bahwa adanya intruksi tersebut dapat merusak rencana rekonsiliasi 65 yang sudah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo.

Tabel 16

**Analisis Framing “TNI Dinilai Tak Sejalan dengan Jokowi Soal Rekonsiliasi 65”**

<i>Define problems</i> (Pendefinisian masalah)	Pemutaran film G30S/PKI yang digagas Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo dianggap merusak rencana Rekonsiliasi 1965
<i>Diagnose causes</i> (Sumber Masalah)	Jenderal Gatot Nurmantyo merupakan seseorang yang mengintruksikan untuk memutar ulang film G30S/PKI
<i>Make moral judgments</i> (Membuat keputusan moral)	Penayangan kembali film G30S merupakan bentuk pemberontakan Jenderal Gatot Nurmantyo terhadap Presiden Jokowi
<i>Treatment Recommendation</i> (Solusi yang ditawarkan)	Manajer Human Right Working Group (HRWG), Daniel Awigra menilai tidak ada larangan untuk kembali memutar film G30S. Akan tetapi, Daniel meminta publik tidak langsung percaya dengan apa yang ditayangkan film itu.

Sumber : Data diolah penulis

**Define Problems.** Apa yang menjadi permasalahan dalam berita ini adalah adanya penayangan kembali Film G30S/PKI oleh panglima tertinggi TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo. Penayangan kembali film tersebut mendapat beberapa kritikan, salah satunya berasal dari Erasmus Napitupulu, salah satu peneliti dari Institute Criminal and Justice Reform (ICJR). Erasmus menilai bahwa rencana pemutaran ulang film tersebut dapat mengganggu rencana dari Presiden Jokowi yang berjanji akan melakukan rekonsiliasi terhadap terhadap peristiwa yang terjadi pada tahun 1965.

Erasmus berpendapat bahwa penayangan ulang film penghianatan G30S/PKI dapat mengancam orang atau kelompok yang terduga komunis, serta para anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia. Film G30S menurutnya merupakan upaya pemerintahan untuk membenarkan apa yang terjadi pada jaman



Orde Baru. Hal tersebut menurutnya dapat memecah belah bangsa sehingga rencana rekonsiliasi atas kasus HAM yang terjadi pada tahun 1965 dapat terganggu. Erasmus menunjukkan adanya ketidak sepakatan dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak TNI untuk memutar ulang film tersebut. Adanya harapan yang ditunjukkan oleh Erasmus agar pihak TNI meninggalkan masa lalu (Orde Baru). Ketidaksepakatan tersebut dapat dilihat melalui kutipan berita tersebut.

Kalau para Jenderal melihat bahwa itu suatu konteks yang harus diperhatikan, kan harusnya jangan memperkeruh suasana lah muter-muter film Orde Baru," kata Erasmus.(lihat lampiran 6)

**Diagnose Causes.** Penyebab dari permasalahan pada berita ini adalah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang mengadakan pemutaran film G30/S PKI. Hal tersebut dapat dilihat melalui kalimat pembuka berita tersebut.

Menurut Erasmus, penayangan kembali film G30S bentuk insubordinasi Panglima TNI terhadap Presiden Jokowi sebagai panglima tertinggi. (lihat lampiran 6)

Penayangan kembali film G30S oleh arahan Jenderal Gatot Nurmantyo tersebut, dinilai oleh Erasmus sebagai bentuk pemberontakan seorang panglima TNI terhadap presiden Joko Widodo. Pemberontakan tersebut mengacu pada pemutaran kembali film G30S oleh Jenderal Gatot Nurmantyo yang dimana menurut Erasmus tidak sejalan dengan rencana rekonsiliasi 1965. Selain itu foto pada berita menunjukkan Jenderal Gatot Nurmantyo berdiri di samping Presiden Joko Widodo yang dapat dimaknai bahwa inti dari berita ini adalah permasalahan yang menyangkut dengan kedua tokoh tersebut.

## Gambar 8

### Gambar berita “TNI Dinilai Tak Sejalan dengan Jokowi Soal Rekonsiliasi 65”



Sumber : Tirto.id (2017). TNI Dinilai Tak Sejalan dengan Jokowi Soal Rekonsiliasi 65

***Make moral judgement.*** Nilai moral yang ada pada permasalahan ini adalah ketidak sepakatan Erasmus Napitupulu atas tindakan Jenderal Gatot Nurmantyo untuk merencanakan pemutaran ulang film G30S. Tindakan panglima tertinggi TNI tersebut dinilai tidak tepat dan seolah – olah sedang melakukan pemberontakan terhadap rencana rekonsiliasi yang sudah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo. Anggapan telah melakukan pemberontakan tersebut dikarenakan pemutaran ulang film G30S dinilai dapat memecah kesatuan bangsa serta dapat memunculkan diskriminasi terhadap masyarakat yang dianggap sebagai bagian dari komunis. Selain itu kutipan pernyataan dari Erasmus berikut seolah menunjukkan bahwa adanya ketidak sesuaian antara pihak TNI dengan Presiden Joko Widodo.

Ada kesan baik kita bahwa Panglima TNI tidak melihat ekspresi Presiden bahwa harapannya ada pelurusan sejarah," kata Erasmus di Gedung Ombudsman. (lihat lampiran 6)

**Treatment Recommendations.** Manajer Human Right Working Group (HRWG), Daniel Awigra berharap agar masyarakat lebih kritis terhadap permasalahan tersebut. Ia berharap masyarakat lebih terbuka dan tidak serta merta percaya pada isi dari film G30S. Solusi lain yang ditawarkan adalah masyarakat harus melihat rujukan narasi lain tentang peristiwa 1965 dikarenakan Daniel ragu akan kebenaran film G30S. Pernyataan Daniel sebagai bentuk solusi dari permasalahan berita ini dapat dilihat melalui kutipan berita berikut.

Daniel mengingatkan, film G30S adalah buatan Orde Baru yang diragukan kebenarannya lantaran digunakan sebagai propaganda rezim yang diputar setiap tanggal 30 September. Film itu sendiri, kata dia, digunakan sebagai pembenaran langkah pemerintah dalam memberantas PKI, baik anggota hingga simpatisan. Daniel menambahkan, publik juga harus menonton film G30S di luar milik pemerintah orde baru sehingga tidak terjebak dalam satu pandangan tertentu. (lihat lampiran 6)

#### 4.2.7 Analisis Berita Berjudul “Mempropagandakan Film Seram G30S/PKI”

**Tabel 17**  
**5W+1H dalam Berita**

<b>What</b>	Pemutaran Film G30S yang dianggap sebagai bentuk propaganda politik untuk menebarkan ketakutan akan bangkitnya lagi ideologi komunisme di Indonesia
<b>How</b>	Tiga stasiun televisi (TV Muhammadiyah, TVRI dan TvOne) memiliki rencana untuk memutar kembali film Penghianatan G30S
<b>Who</b>	Arahan Jenderal Gatot Nurmantyo untuk memutar film tersebut yang kemudian mendesak beberapa stasiun televisi untuk memutar juga film tersebut
<b>Where</b>	Di stasiun TV Muhammadiyah, TV One dan TVRI
<b>When</b>	30 September 2017
<b>Why</b>	Film tersebut dianggap sebagai bentuk pembelajaran sejarah, akan tetapi Tirto, id membingkainya sebagai bentuk propaganda politik.

Sumber : Data Olahan Peneliti

Secara keseluruhan ringkasan berita ini adalah adanya pembahasan rencana untuk pemutaran kembali film G30S di stasiun televisi *TV One*. Sejak dibahas kembali rencana pemutaran oleh Jenderal Gatot Nurmantyo, beberapa politikus mulai membahas kembali permasalahan tersebut seperti Fadli Zon di dalam cuitannya di media sosial twitter. Hal ini bertujuan untuk penyampaian sejarah kebangsaan kita pada generasi muda diantara pemberitaan munculnya kembali ideologi komunisme di Indonesia.

**Tabel 18**  
**Analisis *Framing* “Mempropagandakan Film Seram G30S/PKI”**

<i>Define problems</i> (Pendefinisian masalah)	Pembahasan kembali rencana pemutaran kembali film G30S di stasiun televisi <i>TV One</i> menjadi perbincangan hangat di masyarakat
<i>Diagnose causes</i> (Sumber Masalah)	Jenderal Gatot Nurmantyo merupakan penyebab dari masalah ini yang berawal dari sikap dan pernyataannya untuk kembali menonton film G30S di masyarakat, bersama Taufik Kurniawan memiliki tujuan penyampaian sejarah akan PKI yang dikhawatirkan munculnya kembali ideologi komunisme di Indonesia
<i>Make moral judgments</i> (Membuat keputusan moral)	Masalah ini dianggap sebagai sebuah permasalahan kembali dikarenakan sebelumnya pada masa pemerintahan Presiden Soeharto selama 14 tahun film tersebut menjadi tontonan yang wajib namun telah dihentikan dengan beberapa alasan.
<i>Treatment Recommendation</i> (Solusi yang ditawarkan)	Solusi yang ditawarkan pada masalah ini adalah adanya kebijakan rekomendasi dari Presiden Joko Widodo untuk pembuatan film mengenai G30S dengan pengawasan yang ketat dalam penulisan cerita dan pemilihan dalam pengambilan gambar agar dapat menjadi tayangan mengenai sejarah namun tetap aman dan nyaman untuk disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia

Sumber : Data diolah penulis

***Define problems.*** Tirto.id mengidentifikasi bahwa rencana pemutaran kembali film G30S PKI di beberapa stasiun televisi (*TV One*, *TV Muhammadiyah*, *TVRI*) menjadi apa yang dipermasalahkan dalam berita ini. Masalah ini bermula



ketika cuitan dari Fadli Zon yang mengunggah poster rencana penayangan film Pengkhianatan G30S PKI di TVRI yang akan ditayangkan pada Sabtu, 30 September pukul delapan malam tersebut menjadi pembahasan di media sosial. Pembahasan pemutaran kembali film G30S menjadi isu sensitif. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui kutipan berita Tirto.id berikut.

Film yang penuh pabrikan soal peristiwa 1965 ini bakal kembali disiarkan oleh setidaknya dua stasiun teve di tengah histeria anti-komunis. (lihat lampiran 7)

Kehadiran isu ini kemudian menimbulkan dua sikap masyarakat. Pertama, masyarakat menyimpan rasa penasaran akan film yang menjadi pembicaraan tersebut, khususnya bagi generasi muda yang belum pernah menonton film tersebut.

**Gambar 4. 6**  
**Warga Kwitang dan sekitarnya antusias nonton bareng Film G 30 S PKI**

Mempropagandakan Film Seram G30S  
PKI



Sumber: Tirto.id (2017). Mempropagandakan Film Seram G30S PKI.

Kedua, masyarakat yang khususnya hidup pada jaman kepemimpinan Presiden Soeharto yang telah menonton film tersebut selama 14 tahun atau yang



mengalami masa ketika isu PKI tersebut menjadi isu sensitif yang tidak ingin diungkit kembali.

Permasalahan lainnya dalam berita ini adalah adanya kelompok tertentu yang menimbulkan ketakutan dan trauma akan paham komunisme di Indonesia. Ketakutan akan kebangkitan Partai Komunis Indonesia menyebabkan pembatalan paksa atas desakan kelompok-kelompok non demokrasi pada seminar bertajuk “Pengungkapan Kebenaran sejarah Indonesia 1965-1966” di Gedung YLBHI yang dikarenakan selentingan kabar alias hoaks ditebar, lewat grup-grup aplikasi pesan dan media sosial bahwa seminar tersebut adalah tanda "kebangkitan PKI" dan pembatalan kembali acara "Asik-Asik Aksi" yaitu aksi solidaritas tentang demokrasi dengan alasan yang tidak jauh berbeda.

Berdasarkan hal tersebut, Tirto.id ingin membingkai bahwa pemutaran film ini didorong oleh seseorang yang memiliki sikap yang keras di tengah polemik masyarakat yang menjadikan isu PKI adalah isu sensitif namun seiring dengan pemberitaan tersebut kemudian menimbulkan rasa penasaran dari sebagian masyarakat yang tertarik akan hal tersebut. Walaupun begitu, dua tahun sebelumnya, TV Muhammadiyah juga telah menayangkannya namun tidak terjadi isu pembahasan yang cukup dianggap penting. Film G30S ini dibingkai oleh Tirto.id sebagai bentuk propaganda politik jaman orde baru. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui infografik dalam berita berikut

**Gambar 4. 7**  
**Infografis Nonton Kembali Film Propaganda Anti PKI**



Sumber: Tirto.id (2017). Mempropagandakan Film Seram G30S PKI.

**Diagnose Causes.** Penyebab masalah yang dibingkai Tirto.id dalam berita ini adalah tokoh Jenderal Gatot Nurmantyo yang mendesak beberapa stasiun televisi untuk memutar ulang film G30S. Desakan tersebut diikuti oleh tanggapan dari Gatot bahwa pemutaran tersebut telah mendapatkan izin dari Mendagri, Tjahjo Kumolo. Hal tersebut dapat dilihat melalui kutipan berita berikut.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengeluarkan instruksi kepada para serdadu buat menggelar nonton bersama film *Pengkhianatan G30S PKI*. Rencana ini diikuti desakan agar stasiun televisi swasta menayangkan film itu di dalam gedung parlemen. Apalagi Gatot mengklaim bahwa instruksi ini sudah "mendapat izin" dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

**Make moral judgement.** Terdapat dua penilaian moral mengenai pemutaran ulang film G30S. Pertama penilaian moral yang berasal dari narasumber. Anggota dari Partai PAN, Taufik Kurniawan, menilai pemutaran

ulang film G30S tersebut perlu dilakukan sebagai pembelajaran sejarah kepada generasi muda dan juga sebagai peringatan hari kesaktian Pancasila. Hal yang sama juga disampaikan oleh Jenderal Gatot Nurmantyo bahwa pemutaran ulang tersebut merupakan bagian pembelajaran sejarah untuk generasi muda. Disisi lain, Dirut TV Muhammadiyah, Brillianto K.S Jaya, menilai pemutaran ulang tersebut sebagai pengingat akan bahayanya komunisme. Hal tersebut dapat dilihat melalui kutipan berita berikut.

Ada organisasi yang memiliki ideologi bertentangan dengan Pancasila dan perlu diwaspadai,” ujar Brillianto, menambahkan berkas film yang diputar memakai cakram padat orisinal. Jangan lihat PKI sebagai partai, tapi ideologi komunisme. Partai boleh tidak ada, tapi ideologi tidak pernah mati. Soviet dan Jerman Timur boleh tumbang, tapi ideologi komunisme tidak bakal hilang,” ujarnya (lihat lampiran 7)

Disisi lain, terdapat nilai moral yang secara eksplisit menolak pemutaran ulang film G30S. Juwono Sudarsono selaku Menteri Pendidikan berpendapat bahwa isi dari film tersebut tidak berimbang dan tidak sesuai dengan kurikulum siswa. Sedangkan Menteri Penerangan, Yunus Yosfiah berpendapat bahwa film tersebut tidak sesuai dengan dinamika reformasi. Tirto.id sendiri memiliki pembingkaiannya sendiri mengenai pemutaran ulang film tersebut. Tirto.id melalui beberapa kutipan beritanya menyimpulkan bahwa film tersebut memiliki unsur propaganda dengan cara menyebarkan ketakutan akan ideologi komunisme.

***Treatment Recommendation.*** Solusi dari permasalahan ini adalah pernyataan dari Menteri Pendidikan, Juwono Sudarsono kepada ahli sejarah untuk melihat ulang kurikulum sekolah tingkat SMP dan SMA mengenai sejarah tersebut agar informasinya lebih berimbang. Pemutaran ulang film G30S di

beberapa televisi tersebut dibatalkan dengan alasan film tersebut tidak sesuai lagi dengan sistem reformasi di Indonesia. Sedangkan solusi yang ditawarkan menurut Departemen Penerangan adalah mengganti film G30S dengan menayangkan film lain yang berjudul *Bukan Sekadar Kenangan*.

#### 4.3 Pembahasan

Pembingkaiian menurut Entman melibatkan tahap seleksi isu (*selection*) dan adanya penonjolan (*salience*) pada bagian tertentu dari suatu realitas (Entman, 193, h.52). Menurut Eriyanto (2008, h.187), penonjolan suatu isu dapat dilakukan melalui cara berikut seperti penempatan di bagian yang mencolok seperti di bagian depan halaman atau bagian *headline*, penggunaan grafik sebagai data pendukung, pengulangan kata, pemberian label terhadap orang atau realitas tertentu.

##### a. Pengulangan Kata

Hasil yang ditemukan peneliti adalah terdapat penonjolan berupa pengulangan kalimat yang dilakukan oleh Tirto.id dengan mengutip satu kalimat wawancara yang sama dan menempatkan kutipan wawancara tersebut di beberapa berita (Berita kedua, berita ketiga, berita keempat, berita ketujuh). Kalimat tersebut merupakan pernyataan Gatot Nurmantyo mengenai polemik pemutaran ulang G30S tersebut. Berikut kutipan berita tersebut.

Emang gue pikirin,” ujar Gatot.

Yang bisa melarang saya hanya pemerintah.” (lihat lampiran 7)

Kalimat tersebut ingin menunjukkan bahwa Jenderal Gatot Nurmantyo bersikap acuh tak acuh terhadap masalah pemutaran ulang film G30S tersebut.

b. Pemberian label

Peneliti menemukan beberapa label yang diberikan oleh Tirto.id terhadap kasus ini. Seperti pada kata “polemik” untuk menggambarkan kasus pemutaran ulang film G30S ini. Polemik sendiri menurut kbbi (2018), memiliki arti suatu masalah yang didebatkan di dalam suatu media massa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemutaran ulang film G30S tersebut sudah dari awal dibingkai oleh Tirto.id sebagai suatu masalah atau *problem*.

Pelabelan selanjutnya adalah film Penghianatan G30S yang dilabeli oleh Tirto.id sebagai “film seram”. Hal tersebut dapat ditemukan pada berita kelima yang menunjukkan bahwa film penghianatan G30S tersebut memiliki adegan – adegan kekerasan yang tidak layak untuk ditontonkan kepada anak – anak.

Selanjutnya peneliti juga menemukan pelabelan “propaganda” pada berita kesatu dan ketujuh yang diberikan oleh Tirto.id untuk menggambarkan pemutaran ulang film G30S yang dinilai merupakan suatu usaha untuk mempersuasi masyarakat akan lahirnya “komunisme gaya baru”.

#### 4.3.1 Pembungkai berita pemutaran film G30S

Dalam membungkai polemik pemutaran ulang G30S, Tirto.id cenderung mengaitkan hal tersebut dengan propaganda politik. Hal tersebut dapat dilihat melalui analisis *framing* tabel 4.1, tabel 4.2, tabel 4.3, tabel 4.4, tabel 4.6 dan tabel 4.7. *Define problems* secara keseluruhan yang dibingkai Tirto.id dalam kasus ini



adalah adanya intruksi dari Jenderal Gatot Nurmantyo untuk memutar ulang film G30S. Film G30S tersebut menjadi kasus dikarenakan film tersebut sudah berhenti ditayangkan sejak tahun 1998 dikarenakan beberapa alasan. Melalui riset dan hasil wawancara yang dilakukan oleh Tirto.id dari berbagai narasumber ditemukan bahwa pemutaran ulang G30S sangat kuat berhubungan dengan propaganda politik yang dilakukan oleh Jenderal Gatot Nurmantyo.

Beberapa alasan Jenderal Gatot Nurmantyo diduga melakukan propaganda antara lain agar mendapatkan kursi di panggung pemilihan Gubernur DKI. Gatot Nurmantyo dibingkai menjadi seseorang yang ingin menyebarkan ketakutan politik akan lahirnya kembali komunisme di Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan panggung baik di pilkada DKI Jakarta maupun di panggung pergantian panglima TNI. Selain itu Gatot Nurmantyo juga dinilai ingin mengembalikan kekuatan militer di masyarakat sipil seperti pada masa orde baru.

*Diagnose cause* pada kasus ini adalah Jenderal Gatot Nurmantyo beserta beberapa jajaran militer yang dibingkai sebagai penyebab dari masalah. Jenderal Gatot Nurmantyo merupakan aktor yang melakukan intruksi kepada jajaran militer untuk memutar ulang film G30S.

*Make moral judgement* dalam kasus ini, Tirto.id membingkai bahwa jenderal Gatot Nurmantyo seseorang yang memiliki posisi panglima TNI dianggap telah melakukan pemberontakan kepada Presiden Joko Widodo. Hal tersebut dapat dilihat melalui hasil analisis 4.1.6 . Pemutaran ulang film G30S dianggap sebagai suatu ketidak setujuan atas rencana rekonsiliasi 1965 yang diusung oleh pemerintah. Hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang salah karena pihak militer

seharusnya mengikuti rencana presiden. Selain itu evaluasi moral yang dibingkai dalam kasus ini adalah adanya pemilihan beberapa narasumber yang berpendapat bahwa perlu adanya suatu pembuatan ulang film G30S. Film G30S dianggap sebagai film “seram” yang mengandung beberapa unsur kekerasan dan juga dianggap sebagai sesuatu yang memiliki fakta berbeda dengan sejarah yang ada. Pada analisis 4.1.7, Tirto.id juga menyimpulkan bahwa film tersebut merupakan suatu bentuk propaganda politik pada masa orde baru.

*Treatment recommendation* pada berita ini adalah adanya usulan dari Presiden Joko Widodo untuk membuat ulang film G30S agar film tersebut layak ditonton khususnya bagi usia remaja atau anak – anak. Selain itu rekomendasi pilihan yang lain adalah adanya usulan dari beberapa sejarawan, sineas dan beberapa tokoh agar film tersebut dibuat berdasarkan fakta dan temuan baru mengenai peristiwa G30S. Selanjutnya melalui hasil analisis 4.1.6, solusi yang ditawarkan menurut Manajer Human Right Working Group (HRWG), Daniel adalah untuk tidak melarang kembali memutar film G30S. Akan tetapi, Daniel meminta publik tidak langsung percaya dengan apa yang ditayangkan film itu.

#### **4.3.2 Framing terhadap implementasi Jurnalisme Presisi**

Jurnalisme presisi menempatkan proses jurnalisme ke dalam suatu ilmu pengetahuan, menggunakan metode ilmiah, obyektifitas yang bersifat ilmiah, dan menggunakan proses ilmiah terhadap keseluruhan proses komunikasi massa (Meyer, 1979, hal 2). Hal tersebut menunjukkan bahwa di dalam jurnalisme presisi keobyektifitas berita harus diuji secara ilmiah. Akan tetapi menurut hasil temuan, peneliti menemukan beberapa kalimat yang mengandung opini dari

Tirto.id . Opini tersebut menunjukkan subjektifitas yang dimiliki oleh Tirto.id. Seperti contoh pada berita kesatu yang berjudul “Cara Gatot Nurmantyo Cari Panggung Sebelum Pensiun”. Pada berita tersebut, peneliti menemukan 4 kalimat yang mengandung opini, antara lain : “Minggu itu, pasangan ini punya janji kencan yang *“agak ideologis”* (pada paragraf 1) “, “Ia kaget ketika menonton film itu, *“yang dibuat demi menunjukkan kekejaman Partai Komunis Indonesia”* (pada paragraf 12), “Menjelang pensiun dari TNI pada Maret 2018, Jenderal Gatot Nurmantyo *“gemar”* jadi sorotan publik (pada paragraf 15), “Ia kerap muncul dalam pemberitaan sejak gelombang protes massa di Jakarta dalam apa yang disebut “Aksi Bela Islam” di panggung Pilkada DKI Jakarta *demi menggerus popularitas Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama.”* (pada paragraf 16) .

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Secara keseluruhan, *define problem* dalam pemberitaan pemutaran film G30S tersebut dibingkai dari sudut pandang politik. Tirto.id mengaitkan pemutaran film G30S tersebut dengan propaganda politik yang dilakukan oleh pihak militer (Jenderal Gatot Nurmantyo) dengan tujuan antara lain mendapatkan “panggung” dalam pemilu Gubernur DKI Jakarta, mempertahankan kursi di pemilihan Panglima TNI, memperluas bidang kekuasaan militer ke ranah sipil. Selanjutnya *diagnose cause* dalam kasus ini adalah melihat sosok Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai penyebab dari masalah tersebut bermula ketika ia menginstruksikan kepada jajaran militer untuk memutar ulang film G30S.
2. *Make moral judgement* dalam kasus ini adalah adanya penilaian moral dari segi konteks film G30S yang dinilai mengandung banyak adegan kekerasan. Sedangkan penilaian terhadap pemutaran ulang tersebut adalah adanya penyebaran ketakutan akan lahirnya komunisme di Indonesia. Terakhir, *treatment recommendation* dalam kasus ini adalah pendapat dari presiden Joko Widodo untuk membuat ulang film G30S tersebut disertai

pendapat dari sejarawan, aktivis dan sineas untuk merubah pula substansi dari film tersebut.

3. Tirto.id mengklaim sebagai jurnalisme presisi. Akan tetapi, menurut hasil temuan peneliti, peneliti menemukan beberapa kalimat opini yang ditulis oleh Tirto.id di beritanya. Sedangkan suatu berita dianggap sebagai bagian dari jurnalisme presisi apabila memiliki objektivitas yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

## 5.2 Saran

Saran dari peneliti yang berkaitan dengan analisis framing tentang pemberitaan pemutaran ulang film G30S ini adalah:

1. Penelitian ini hanya menggunakan satu analisis saja yaitu analisis *framing* model Robert Entman. Analisis *framing* merupakan analisis bersifat mikro yang memiliki arti bahwa data yang diteliti hanya data yang berasal dari permukaan saja. Pasalnya, isu tentang komunisme masih sangat sensitif di Indonesia. Peneliti berharap akan adanya penelitian selanjutnya tentang topik ini dengan menggunakan analisis yang lebih dalam lagi.
2. Selanjutnya saran untuk media online Tirto.id adalah sebagai jurnalisme presisi, Tirto.id seharusnya dapat memberikan berita – berita yangimbang. Tirto.id juga peneliti harapkan agar dapat menggunakan bahasa yang lebih netral agar tidak terjadinya sebuah opini di dalam berita. Tirto.id memang menggunakan riset dan referensi di dalam beritanya, akan lebih baik bila



referensi yang dipilih oleh Tirto.id dapat mengandung unsur *cover both side* atau memilih referensi yang imbang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aidit, D.N (1955). *Lahirnja PKI dan perkembangnja*. Jakarta : Jajasan Pembaruan
- Apinino, Rio. (2017, September 19). *PFN Perlu Tafsir Ulang Jika Film G30S PKI Diproduksi Lagi*. Diakses dari <https://tirto.id/pfn-perlu-tafsir-ulang-jika-film-g30s-pki-diproduksi-lagi-cwUp>
- Apinino, Rio. (2017, September 20). *Catatan Sejarawan Soal Pembuatan Film G30S*. Diakses dari <https://tirto.id/catatan-sejarawan-soal-pembuatan-ulang-film-g30s-pki-cwWj>
- Apinino, Rio. (2017, September 20). *Pembuatan Ulang Film G30S PKI Harus Ungkap Fakta Sejarah*. Diakses dari <https://tirto.id/pembuatan-ulang-film-g30s-pki-harus-ungkap-fakta-sejarah-cwWr>
- APJII. (2016). *Infografis Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia*. Diakses dari <http://www.apjii.or.id/survei2017/download/1yiEaDLJxep6nPvGf0rb5C7YlhQoqO>
- Asril, S. (2017, April 23). *Politisi PKS ini Minta Jokowi Bela TNI terhadap Investigasi Allan Nairn*. Diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2017/04/23/06213601/politisi.pks.ini.minta.jokowi.bela.tni.terhadap.investigasi.allan.nairn>
- Biagi, S. (2010). *Media impact: an introduction to mass media*, 9 th. Jakarta: Salemba Humanika.
- Brewer, Paul R. (2003). *Priming or Framing. Media Influence on Attitudes Toward Foreign Countries*. Sage Publication. DOI : 10.1177/0016549203065006005
- Danesi, M. (2009). *Dictionary of Media and Communications*. New York: M.E. Sharpe.
- Domke, David & Shah, Dhavan & B. Wackman, Daniel. (1998). *Media Priming Effects: Accessibility, Association, and Activation*. *International Journal of Public Opinion Research*. 10. 51-74. DOI : 10.1093/ijpor/10.1.51.
- Entman, R. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication* 43(4), 51-58.
- Erdianto (2011). *12 Maret 1966, Soeharto Bubarkan PKI*. Diakses dari <http://kompas.com/nasional/read/2016/03/12/06310001/12.Maret.1966.Soeharto.Bubarkan.PKI>
- Eriyanto. (2002). *Analisis framing: konstruksi, ideologi dan politik media*. Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara.
- Ewoldsen, B. (2002). *The Sage Handbook of Media Processes and Effects*. California : Sage Publication
- Gromico, A. (2016, Agustus 03). *Ahok dan Rusdiantara Meresmikan Tirto.id*. Diakses dari <http://www.tirto.id/ahok-dan-rusdiantara-meresmikan-tirtoid-bw7R>
- Gunter, B. (2003). *News and the Net*. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.
- Hassin, R. R., Ferguson, M. J., Shidlovski, D., & Gross, T. (2007). *Subliminal exposure to national flags affects political thought and behavior*.

- Proceedings of the National Academy of Sciences*. DOI : 104(50), 19757-1976
- Haryanto, A. (2017, September 19). *TNI Dinilai Tak Sejalan dengan Jokowi Rekonsiliasi 65*. Diakses dari <https://tirto.id/tni-dinilai-tak-sejalan-dengan-jokowi-soal-rekonsiliasi-65-cwVP>
- Hassig, R. (2009). *The Hidden People of North Korea*. Maryland : Rowman & Littlefield Publisher
- Janssen, M. C. (2010). *A Framing Analysis of Weblogs and Online Newspapers*. Diakses Mei 5, 2018, dari San Jose State University Repository: [http://scholarworks.sjsu.edu/etd\\_theses/3811](http://scholarworks.sjsu.edu/etd_theses/3811)
- Johnson, R. (2007). *Applied Multivariate Stastical Analysis*. New Jersey : Prentice Hall.
- KBBI. *Definisi Polemik*. Diakses dari <https://kbbi.web.id/polemik>
- Kresna, M. (2017, September 29). *Cara Gatot Nurmantyo Cari Panggung Sebelum Pensiun*. Diakses dari <http://tirto.id/cara-gatot-nurmantyo-cari-panggung-sebelum-pensiun>.
- Kurniawan, F. (2017, Oktober 03). *Seberapa Ramai Komunisme Diperbincangkan di Masyarakat*. Diakses dari <http://www.tirto.id/Seberapa-Ramai-Komunisme-Diperbincangkan-di-Masyarakat>.
- Matanasi, P. (09 Mei 2017). *Henk Sneevliet : Mahaguru Pendiri PKI*. Diakses dari <http://www.tirto.id/henk-sneevliet-mahaguru-pendiri-pki>.
- McCombs, M., Cole, R., Stevenson, R., & Shaw, D. (1981). Precision Journalism: An Emerging Theory and Technique of News Reporting. *Gazette* 27, 21-34.
- McQuail, D. (2000). *Mass Communication Theory*. London : Sage
- Meyer, P. (1979). *Paper Route : Finding My Way to Precision Journalism*. Indiana : IUUniverse
- Morissan. (2013). *Teori Komunikasi : Individu hingga Massa*. Jakarta : Kencana
- Moelong, DR. Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Nairn, A. (2017, April 19). *Investigasi Allan Nairn : Ahok Hanyallah Dalih untuk Makar*. Diakses dari <http://www.tirto.id/investigasi-allan-nairn-ahok-hanyallah-dalih-untuk-makar-cm2X>
- Neuman, W. L. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi 7*. Jakarta : Indeks.
- Nurkinan, Drs,MM. (2017). *Dampak Media Online Terhadap Perkembangan Media Konvensional*, Diakses Mei 5, 2018, dari Jurnal Politikom Indonesiana: <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/download/962/792>
- Nuruddin. (2009). *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta : Rajawali Pers
- Tim Redaksi Tirtoid. (2016). *Tentang Kami ; Jernih, Mengalir, Mencerahkan bersama Tirto.id*. Diakses dari <http://tirto.id/insider/about-us>
- Pratomo, A,Y. (2014, Februari 22). *Menjejaki asal muasal masuknya komunisme di Indonesia*. Diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/menjejaki-asal-muasal-masuknya-komunisme-di-indonesia.html>

- Putu Agung. (2016). *Tirto.id Raih Gelar Laman Berita Terbaik versi PANDI*. Diakses dari <http://tirto.id/Tirtoid-Raih-Gelar-Laman-Berita-Terbaik-versi-PANDI>
- Rakhmat, J. (2007). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Reese, S., Gandy, O., & Grant, A. (2001). *Framing public life: Perspectives on media and our understanding of the social world*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
- Romli, K. (2011). *Komunikasi Organisasi Lengkap*. Jakarta : PT. Grasindo
- Saputri, M. (22 September 2017). *Isu PKI Ramai di Medsos Gara-gara Ajakan Nobar Film G30S/PKI*. Diakses dari <http://www.tirto.id/Isu-PKI-Ramai-di-Medsos-Gara-gara-Ajakan-Nobar-Film-G30S/PKI>
- Samanhudi, M. (2017, September 18). *Tiga Tokoh di Balik Penghentian Pemutaran Film G 30 SPKI*. Diakses dari <http://www.nasional.tempo.co/amp/910042/tiga-tokoh-di-balik-penghentian-pemutaran-film-g30-spki>
- Samsudin. (2004). *Mengapa G30S/PKI Gagal. Suatu Analisis*. Yogyakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Saptohadhi, S. (2011). *Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia*. Purwokerto : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
- Sobur, A. (2012). *Analisis Teks Media : Suatu Pengantar Analisa Wacana, Analisis Semiotika dan Analisis Framing*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Sugiarto, E. (2017). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis: Suaka Media*. Yogyakarta : Diandra Kreatif
- Sumandoyo, Arbi. (2017, September 29). *Film G30S yang Dianggap Narasi Sejarah Oleh TNI*. Diakses dari <https://tirto.id/film-039g30s039-yang-dianggap-narasi-sejarah-oleh-tni-amp-sekolah-cxta>
- Sumandoyo, Arbi. (2017, September 29). *Mempropagandakan Film Seram G30S/PKI*. Diakses dari <https://tirto.id/mempropagandakan-film-seram-g30s-pki-cxsV>
- Taufan, M. (2016). *Sosiologi Hukum Islam : Kajian Empirik Komunitas Sempalan*. Yogyakarta : Deepublish
- Tewksbury, D. (2007). *Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution of Three Media Effects Models*. *International Communication Association*. DOI : 10.1111/j.1460-2466.2006.00326.x
- Tim Redaksi Tirtoid. (2016). *Tentang Kami ; Jernih, Mengalir, Mencerahkan bersama Tirto.id*. Diakses dari <http://tirto.id/insider/about-us>
- Tim Sosiologi. (2007). *Sosiologi, Suatu Kajian Masyarakat*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Van Gorp, B. (2007). *The Constructionist Approach to Framing: Bringing Culture Back In*. *Journal of Communication* 57(1), 60-78.
- Wahyudi, I. (2017, April 26). *Dewan Pers nilai tirto.id tidak berimbang*. Diakses dari <http://www.antaranews.com/berita/626091/dewan-pers-nilai-tirtoid-tidak-berimbang>
- Wazis, K. (2012). *Media massa dan konstruksi realitas*. Malang : Tlogomas



- Widhana, D.H. (14 November 2016) . *Menjerat Para Penyebar Komunisme Lewat Revisi KUHP*. Diakses dari <http://tirto.id/menjerat-para-penyebar-komunisme-lewat-revisi-kuhp>
- Yohanes, P. (2017, April 24). Diadukan Mabes TNI ke Dewan Pers, Tirto.id : Kami Kooperatif. Tempo. Diakses dari <http://nasional.tempo.co/read/869137/Diadukan-Mabes-TNI-ke-Dewan-Pers-Tirto-id-Kami-Kooperatif>
- Winter dan Eyal (Severin 2011 273) agenda media menjadi public 4-6 minggu.Stone McCombs 2-6 bulan.
- Yulika, N.C. (2018, Januari 20). *Tirto, Media Indonesia Pertama yang Lolos Verifikasi IFCN*. Diakses dari <http://tirto.id/tirto-media-indonesia-pertama-yang-lolos-verifikasi-ifcn>





## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Secara keseluruhan, *define problem* dalam pemberitaan pemutaran film G30S tersebut dibingkai dari sudut pandang politik. Tirto.id mengaitkan pemutaran film G30S tersebut dengan propaganda politik yang dilakukan oleh pihak militer (Jenderal Gatot Nurmantyo) dengan tujuan antara lain mendapatkan “panggung” dalam pemilu Gubernur DKI Jakarta, mempertahankan kursi di pemilihan Panglima TNI, memperluas bidang kekuasaan militer ke ranah sipil. Selanjutnya *diagnose cause* dalam kasus ini adalah melihat sosok Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai penyebab dari masalah tersebut bermula ketika ia menginstruksikan kepada jajaran militer untuk memutar ulang film G30S.
2. *Make moral judgement* dalam kasus ini adalah adanya penilaian moral dari segi konteks film G30S yang dinilai mengandung banyak adegan kekerasan. Sedangkan penilaian terhadap pemutaran ulang tersebut adalah adanya penyebaran ketakutan akan lahirnya komunisme di Indonesia. Terakhir, *treatment recommendation* dalam kasus ini adalah pendapat dari presiden Joko Widodo untuk membuat ulang film G30S tersebut disertai

pendapat dari sejarawan, aktivis dan sineas untuk merubah pula substansi dari film tersebut.

3. Tirto.id mengklaim sebagai jurnalisme presisi. Akan tetapi, menurut hasil temuan peneliti, peneliti menemukan beberapa kalimat opini yang ditulis oleh Tirto.id di beritanya. Sedangkan suatu berita dianggap sebagai bagian dari jurnalisme presisi apabila memiliki objektivitas yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

## 5.2 Saran

Saran dari peneliti yang berkaitan dengan analisis framing tentang pemberitaan pemutaran ulang film G30S ini adalah:

1. Penelitian ini hanya menggunakan satu analisis saja yaitu analisis *framing* model Robert Entman. Analisis *framing* merupakan analisis bersifat mikro yang memiliki arti bahwa data yang diteliti hanya data yang berasal dari permukaan saja. Pasalnya, isu tentang komunisme masih sangat sensitif di Indonesia. Peneliti berharap akan adanya penelitian selanjutnya tentang topik ini dengan menggunakan analisis yang lebih dalam lagi.
2. Selanjutnya saran untuk media online Tirto.id adalah sebagai jurnalisme presisi, Tirto.id seharusnya dapat memberikan berita – berita yangimbang. Tirto.id juga peneliti harapkan agar dapat menggunakan bahasa yang lebih netral agar tidak terjadinya sebuah opini di dalam berita. Tirto.id memang menggunakan riset dan referensi di dalam beritanya, akan lebih baik bila

referensi yang dipilih oleh Tirto.id dapat mengandung unsur *cover both side* atau memilih referensi yang imbang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aidit, D.N (1955). *Lahirnja PKI dan perkembangnja*. Jakarta : Jajasan Pembaruan
- Apinino, Rio. (2017, September 19). *PFN Perlu Tafsir Ulang Jika Film G30S PKI Diproduksi Lagi*. Diakses dari <https://tirto.id/pfn-perlu-tafsir-ulang-jika-film-g30s-pki-diproduksi-lagi-cwUp>
- Apinino, Rio. (2017, September 20). *Catatan Sejarawan Soal Pembuatan Film G30S*. Diakses dari <https://tirto.id/catatan-sejarawan-soal-pembuatan-ulang-film-g30s-pki-cwWj>
- Apinino, Rio. (2017, September 20). *Pembuatan Ulang Film G30S PKI Harus Ungkap Fakta Sejarah*. Diakses dari <https://tirto.id/pembuatan-ulang-film-g30s-pki-harus-ungkap-fakta-sejarah-cwWr>
- APJII. (2016). *Infografis Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia*. Diakses dari <http://www.apjii.or.id/survei2017/download/1yiEaDLJxep6nPvGf0rb5C7YlhQoqO>
- Asril, S. (2017, April 23). *Politisi PKS ini Minta Jokowi Bela TNI terhadap Investigasi Allan Nairn*. Diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2017/04/23/06213601/politisi.pks.ini.minta.jokowi.bela.tni.terhadap.investigasi.allan.nairn>
- Biagi, S. (2010). *Media impact: an introduction to mass media*, 9 th. Jakarta: Salemba Humanika.
- Brewer, Paul R. (2003). *Priming or Framing. Media Influence on Attitudes Toward Foreign Countries*. Sage Publication. DOI : 10.1177/0016549203065006005
- Danesi, M. (2009). *Dictionary of Media and Communications*. New York: M.E. Sharpe.
- Domke, David & Shah, Dhavan & B. Wackman, Daniel. (1998). *Media Priming Effects: Accessibility, Association, and Activation*. *International Journal of Public Opinion Research*. 10. 51-74. DOI : 10.1093/ijpor/10.1.51.
- Entman, R. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication* 43(4), 51-58.
- Erdianto (2011). *12 Maret 1966, Soeharto Bubarkan PKI*. Diakses dari <http://kompas.com/nasional/read/2016/03/12/06310001/12.Maret.1966.Soeharto.Bubarkan.PKI>
- Eriyanto. (2002). *Analisis framing: konstruksi, ideologi dan politik media*. Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara.
- Ewoldsen, B. (2002). *The Sage Handbook of Media Processes and Effects*. California : Sage Publication
- Gromico, A. (2016, Agustus 03). *Ahok dan Rusdiantara Meresmikan Tirto.id*. Diakses dari <http://www.tirto.id/ahok-dan-rusdiantara-meresmikan-tirtoid-bw7R>
- Gunter, B. (2003). *News and the Net*. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.
- Hassin, R. R., Ferguson, M. J., Shidlovski, D., & Gross, T. (2007). *Subliminal exposure to national flags affects political thought and behavior*.



- Proceedings of the National Academy of Sciences*. DOI : 104(50), 19757-1976
- Haryanto, A. (2017, September 19). *TNI Dinilai Tak Sejalan dengan Jokowi Rekonsiliasi 65*. Diakses dari <https://tirto.id/tni-dinilai-tak-sejalan-dengan-jokowi-soal-rekonsiliasi-65-cwVP>
- Hassig, R. (2009). *The Hidden People of North Korea*. Maryland : Rowman & Littlefield Publisher
- Janssen, M. C. (2010). *A Framing Analysis of Weblogs and Online Newspapers*. Diakses Mei 5, 2018, dari San Jose State University Repository: [http://scholarworks.sjsu.edu/etd\\_theses/3811](http://scholarworks.sjsu.edu/etd_theses/3811)
- Johnson, R. (2007). *Applied Multivariate Stastical Analysis*. New Jersey : Prentice Hall.
- KBBI. *Definisi Polemik*. Diakses dari <https://kbbi.web.id/polemik>
- Kresna, M. (2017, September 29). *Cara Gatot Nurmantyo Cari Panggung Sebelum Pensiun*. Diakses dari <http://tirto.id/cara-gatot-nurmantyo-cari-panggung-sebelum-pensiun>.
- Kurniawan, F. (2017, Oktober 03). *Seberapa Ramai Komunisme Diperbincangkan di Masyarakat*. Diakses dari <http://www.tirto.id/Seberapa-Ramai-Komunisme-Diperbincangkan-di-Masyarakat>.
- Matanasi, P. (09 Mei 2017). *Henk Sneevliet : Mahaguru Pendiri PKI*. Diakses dari <http://www.tirto.id/henk-sneevliet-mahaguru-pendiri-pki>.
- McCombs, M., Cole, R., Stevenson, R., & Shaw, D. (1981). Precision Journalism: An Emerging Theory and Technique of News Reporting. *Gazette* 27, 21-34.
- McQuail, D. (2000). *Mass Communication Theory*. London : Sage
- Meyer, P. (1979). *Paper Route : Finding My Way to Precision Journalism*. Indiana : IUUniverse
- Morissan. (2013). *Teori Komunikasi : Individu hingga Massa*. Jakarta : Kencana
- Moelong, DR. Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Nairn, A. (2017, April 19). *Investigasi Allan Nairn : Ahok Hanyallah Dalih untuk Makar*. Diakses dari <http://www.tirto.id/investigasi-allan-nairn-ahok-hanyallah-dalih-untuk-makar-cm2X>
- Neuman, W. L. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi 7*. Jakarta : Indeks.
- Nurkinan, Drs,MM. (2017). *Dampak Media Online Terhadap Perkembangan Media Konvensional*, Diakses Mei 5, 2018, dari Jurnal Politikom Indonesia: <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesia/article/download/962/792>
- Nuruddin. (2009). *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta : Rajawali Pers
- Tim Redaksi Tirtoid. (2016). *Tentang Kami ; Jernih, Mengalir, Mencerahkan bersama Tirto.id*. Diakses dari <http://tirto.id/insider/about-us>
- Pratomo, A,Y. (2014, Februari 22). *Menjejaki asal muasal masuknya komunisme di Indonesia*. Diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/menjejaki-asal-muasal-masuknya-komunisme-di-indonesia.html>



- Putu Agung. (2016). *Tirto.id Raih Gelar Laman Berita Terbaik versi PANDI*. Diakses dari <http://tirto.id/Tirtoid-Raih-Gelar-Laman-Berita-Terbaik-versi-PANDI>
- Rakhmat, J. (2007). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Reese, S., Gandy, O., & Grant, A. (2001). *Framing public life: Perspectives on media and our understanding of the social world*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
- Romli, K. (2011). *Komunikasi Organisasi Lengkap*. Jakarta : PT. Grasindo
- Saputri, M. (22 September 2017). *Isu PKI Ramai di Medsos Gara-gara Ajakan Nobar Film G30S/PKI*. Diakses dari <http://www.tirto.id/Isu-PKI-Ramai-di-Medsos-Gara-gara-Ajakan-Nobar-Film-G30S/PKI>
- Samanhudi, M. (2017, September 18). *Tiga Tokoh di Balik Penghentian Pemutaran Film G 30 SPKI*. Diakses dari <http://www.nasional.tempo.co/amp/910042/tiga-tokoh-di-balik-penghentian-pemutaran-film-g30-spki>
- Samsudin. (2004). *Mengapa G30S/PKI Gagal. Suatu Analisis*. Yogyakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Saptohadhi, S. (2011). *Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia*. Purwokerto : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
- Sobur, A. (2012). *Analisis Teks Media : Suatu Pengantar Analisa Wacana, Analisis Semiotika dan Analisis Framing*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Sugiarto, E. (2017). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis: Suaka Media*. Yogyakarta : Diandra Kreatif
- Sumandoyo, Arbi. (2017, September 29). *Film G30S yang Dianggap Narasi Sejarah Oleh TNI*. Diakses dari <https://tirto.id/film-039g30s039-yang-dianggap-narasi-sejarah-oleh-tni-amp-sekolah-cxta>
- Sumandoyo, Arbi. (2017, September 29). *Mempropagandakan Film Seram G30S/PKI*. Diakses dari <https://tirto.id/mempropagandakan-film-seram-g30s-pki-cxsV>
- Taufan, M. (2016). *Sosiologi Hukum Islam : Kajian Empirik Komunitas Sempalan*. Yogyakarta : Deepublish
- Tewksbury, D. (2007). *Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution of Three Media Effects Models*. *International Communication Association*. DOI : 10.1111/j.1460-2466.2006.00326.x
- Tim Redaksi Tirtoid. (2016). *Tentang Kami ; Jernih, Mengalir, Mencerahkan bersama Tirto.id*. Diakses dari <http://tirto.id/insider/about-us>
- Tim Sosiologi. (2007). *Sosiologi, Suatu Kajian Masyarakat*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Van Gorp, B. (2007). *The Constructionist Approach to Framing: Bringing Culture Back In*. *Journal of Communication* 57(1), 60-78.
- Wahyudi, I. (2017, April 26). *Dewan Pers nilai tirto.id tidak berimbang*. Diakses dari <http://www.antaraneews.com/berita/626091/dewan-pers-nilai-tirtoid-tidak-berimbang>
- Wazis, K. (2012). *Media massa dan konstruksi realitas*. Malang : Tlogomas

- Widhana, D.H. (14 November 2016) . *Menjerat Para Penyebar Komunisme Lewat Revisi KUHP*. Diakses dari <http://tirto.id/menjerat-para-penyebar-komunisme-lewat-revisi-kuhp>
- Yohanes, P. (2017, April 24). Diadukan Mabes TNI ke Dewan Pers, Tirto.id : Kami Kooperatif. Tempo. Diakses dari <http://nasional.tempo.co/read/869137/Diadukan-Mabes-TNI-ke-Dewan-Pers-Tirto-id-Kami-Kooperatif>
- Winter dan Eyal (Severin 2011 273) agenda media menjadi public 4-6 minggu.Stone McCombs 2-6 bulan.
- Yulika, N.C. (2018, Januari 20). *Tirto, Media Indonesia Pertama yang Lolos Verifikasi IFCN*. Diakses dari <http://tirto.id/tirto-media-indonesia-pertama-yang-lolos-verifikasi-ifcn>



## DAFTAR PUSTAKA

- Aidit, D.N (1955). *Lahirnja PKI dan perkembangannya*. Jakarta : Jajasan Pembaruan
- Apinino, Rio. (2017, September 19). *PFN Perlu Tafsir Ulang Jika Film G30S PKI Diproduksi Lagi*. Diakses dari <https://tirto.id/pfn-perlu-tafsir-ulang-jika-film-g30s-pki-diproduksi-lagi-cwUp>
- Apinino, Rio. (2017, September 20). *Catatan Sejarawan Soal Pembuatan Film G30S*. Diakses dari <https://tirto.id/catatan-sejarawan-soal-pembuatan-ulang-film-g30s-pki-cwWj>
- Apinino, Rio. (2017, September 20). *Pembuatan Ulang Film G30S PKI Harus Ungkap Fakta Sejarah*. Diakses dari <https://tirto.id/pembuatan-ulang-film-g30s-pki-harus-ungkap-fakta-sejarah-cwWr>
- APJII. (2016). *Infografis Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia*. Diakses dari <http://www.apjii.or.id/survei2017/download/1yiEaDLJxep6nPvGf0rb5C7YlhQoqO>
- Asril, S. (2017, April 23). *Politisi PKS ini Minta Jokowi Bela TNI terhadap Investigasi Allan Nairn*. Diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2017/04/23/06213601/politisi.pks.ini.minta.jokowi.bela.tni.terhadap.investigasi.allan.nairn>
- Biagi, S. (2010). *Media impact: an introduction to mass media*, 9 th. Jakarta: Salemba Humanika.
- Brewer, Paul R. (2003). *Priming or Framing. Media Influence on Attitudes Toward Foreign Countries*. Sage Publication. DOI : 10.1177/0016549203065006005
- Danesi, M. (2009). *Dictionary of Media and Communications*. New York: M.E. Sharpe.
- Domke, David & Shah, Dhavan & B. Wackman, Daniel. (1998). *Media Priming Effects: Accessibility, Association, and Activation*. *International Journal of Public Opinion Research*. 10. 51-74. DOI : 10.1093/ijpor/10.1.51.
- Entman, R. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication* 43(4), 51-58.
- Erdianto (2011). *12 Maret 1966, Soeharto Bubarkan PKI*. Diakses dari <http://kompas.com/nasional/read/2016/03/12/06310001/12.Maret.1966.Soeharto.Bubarkan.PKI>
- Eriyanto. (2002). *Analisis framing: konstruksi, ideologi dan politik media*. Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara.
- Ewoldsen, B. (2002). *The Sage Handbook of Media Processes and Effects*. California : Sage Publication
- Gromico, A. (2016, Agustus 03). *Ahok dan Rusdiantara Meresmikan Tirto.id*. Diakses dari <http://www.tirto.id/ahok-dan-rusdiantara-meresmikan-tirtoid-bw7R>
- Gunter, B. (2003). *News and the Net*. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.
- Hassin, R. R., Ferguson, M. J., Shidlovski, D., & Gross, T. (2007). *Subliminal exposure to national flags affects political thought and behavior*.

- Proceedings of the National Academy of Sciences*. DOI : 104(50), 19757-1976
- Haryanto, A. (2017, September 19). *TNI Dinilai Tak Sejalan dengan Jokowi Rekonsiliasi 65*. Diakses dari <https://tirto.id/tni-dinilai-tak-sejalan-dengan-jokowi-soal-rekonsiliasi-65-cwVP>
- Hassig, R. (2009). *The Hidden People of North Korea*. Maryland : Rowman & Littlefield Publisher
- Janssen, M. C. (2010). *A Framing Analysis of Weblogs and Online Newspapers*. Diakses Mei 5, 2018, dari San Jose State University Repository: [http://scholarworks.sjsu.edu/etd\\_theses/3811](http://scholarworks.sjsu.edu/etd_theses/3811)
- Johnson, R. (2007). *Applied Multivariate Stastical Analysis*. New Jersey : Prentice Hall.
- KBBI. *Definisi Polemik*. Diakses dari <https://kbbi.web.id/polemik>
- Kresna, M. (2017, September 29). *Cara Gatot Nurmantyo Cari Panggung Sebelum Pensium*. Diakses dari <http://tirto.id/cara-gatot-nurmantyo-cari-panggung-sebelum-pensium>.
- Kurniawan, F. (2017, Oktober 03). *Seberapa Ramai Komunisme Diperbincangkan di Masyarakat*. Diakses dari <http://www.tirto.id/Seberapa-Ramai-Komunisme-Diperbincangkan-di-Masyarakat>.
- Matanasi, P. (09 Mei 2017). *Henk Sneevliet : Mahaguru Pendiri PKI*. Diakses dari <http://www.tirto.id/henk-sneevliet-mahaguru-pendiri-pki>.
- McCombs, M., Cole, R., Stevenson, R., & Shaw, D. (1981). Precision Journalism: An Emerging Theory and Technique of News Reporting. *Gazette* 27, 21-34.
- McQuail, D. (2000). *Mass Communication Theory*. London : Sage
- Meyer, P. (1979). *Paper Route : Finding My Way to Precision Journalism*. Indiana : IUUniverse
- Morissan. (2013). *Teori Komunikasi : Individu hingga Massa*. Jakarta : Kencana
- Moelong, DR. Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Nairn, A. (2017, April 19). *Investigasi Allan Nairn : Ahok Hanyallah Dalih untuk Makar*. Diakses dari <http://www.tirto.id/investigasi-allan-nairn-ahok-hanyallah-dalih-untuk-makar-cm2X>
- Neuman, W. L. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi 7*. Jakarta : Indeks.
- Nurkinan, Drs,MM. (2017). *Dampak Media Online Terhadap Perkembangan Media Konvensional*, Diakses Mei 5, 2018, dari Jurnal Politikom Indonesia: <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesia/article/download/962/792>
- Nuruddin. (2009). *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta : Rajawali Pers
- Tim Redaksi Tirtoid. (2016). *Tentang Kami ; Jernih, Mengalir, Mencerahkan bersama Tirto.id*. Diakses dari <http://tirto.id/insider/about-us>
- Pratomo, A,Y. (2014, Februari 22). *Menjejaki asal muasal masuknya komunisme di Indonesia*. Diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/menjejaki-asal-muasal-masuknya-komunisme-di-indonesia.html>



- Putu Agung. (2016). *Tirto.id Raih Gelar Laman Berita Terbaik versi PANDI*. Diakses dari <http://tirto.id/Tirtoid-Raih-Gelar-Laman-Berita-Terbaik-versi-PANDI>
- Rakhmat, J. (2007). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Reese, S., Gandy, O., & Grant, A. (2001). *Framing public life: Perspectives on media and our understanding of the social world*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
- Romli, K. (2011). *Komunikasi Organisasi Lengkap*. Jakarta : PT. Grasindo
- Saputri, M. (22 September 2017). *Isu PKI Ramai di Medsos Gara-gara Ajakan Nobar Film G30S/PKI*. Diakses dari <http://www.tirto.id/Isu-PKI-Ramai-di-Medsos-Gara-gara-Ajakan-Nobar-Film-G30S/PKI>
- Samanhudi, M. (2017, September 18). *Tiga Tokoh di Balik Penghentian Pemutaran Film G 30 SPKI*. Diakses dari <http://www.nasional.tempo.co/amp/910042/tiga-tokoh-di-balik-penghentian-pemutaran-film-g30-spki>
- Samsudin. (2004). *Mengapa G30S/PKI Gagal. Suatu Analisis*. Yogyakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Saptohadhi, S. (2011). *Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia*. Purwokerto : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
- Sobur, A. (2012). *Analisis Teks Media : Suatu Pengantar Analisa Wacana, Analisis Semiotika dan Analisis Framing*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Sugiarto, E. (2017). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis: Suaka Media*. Yogyakarta : Diandra Kreatif
- Sumandoyo, Arbi. (2017, September 29). *Film G30S yang Dianggap Narasi Sejarah Oleh TNI*. Diakses dari <https://tirto.id/film-039g30s039-yang-dianggap-narasi-sejarah-oleh-tni-amp-sekolah-cxta>
- Sumandoyo, Arbi. (2017, September 29). *Mempropagandakan Film Seram G30S/PKI*. Diakses dari <https://tirto.id/mempropagandakan-film-seram-g30s-pki-cxsV>
- Taufan, M. (2016). *Sosiologi Hukum Islam : Kajian Empirik Komunitas Sempalan*. Yogyakarta : Deepublish
- Tewksbury, D. (2007). *Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution of Three Media Effects Models*. *International Communication Association*. DOI : 10.1111/j.1460-2466.2006.00326.x
- Tim Redaksi Tirtoid. (2016). *Tentang Kami ; Jernih, Mengalir, Mencerahkan bersama Tirto.id*. Diakses dari <http://tirto.id/insider/about-us>
- Tim Sosiologi. (2007). *Sosiologi, Suatu Kajian Masyarakat*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Van Gorp, B. (2007). *The Constructionist Approach to Framing: Bringing Culture Back In*. *Journal of Communication* 57(1), 60-78.
- Wahyudi, I. (2017, April 26). *Dewan Pers nilai tirto.id tidak berimbang*. Diakses dari <http://www.antaranews.com/berita/626091/dewan-pers-nilai-tirtoid-tidak-berimbang>
- Wazis, K. (2012). *Media massa dan konstruksi realitas*. Malang : Tlogomas



- Widhana, D.H. (14 November 2016) . *Menjerat Para Penyebar Komunisme Lewat Revisi KUHP*. Diakses dari <http://tirto.id/menjerat-para-penyebar-komunisme-lewat-revisi-kuhp>
- Yohanes, P. (2017, April 24). Diadukan Mabes TNI ke Dewan Pers, Tirto.id : Kami Kooperatif. Tempo. Diakses dari <http://nasional.tempo.co/read/869137/Diadukan-Mabes-TNI-ke-Dewan-Pers-Tirto-id-Kami-Kooperatif>
- Winter dan Eyal (Severin 2011 273) agenda media menjadi public 4-6 minggu.Stone McCombs 2-6 bulan.
- Yulika, N.C. (2018, Januari 20). *Tirto, Media Indonesia Pertama yang Lolos Verifikasi IFCN*. Diakses dari <http://tirto.id/tirto-media-indonesia-pertama-yang-lolos-verifikasi-ifcn>

